



TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014

TRANSFORMATION OF JAPAN DEFENSE POLICY IN 2014

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Wildan Faisol

NIM 100910101045

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2015



TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014

TRANSFORMATION OF JAPAN DEFENSE POLICY IN 2014

SKRIPSI

Oleh
Wildan Faisol
NIM 100910101045

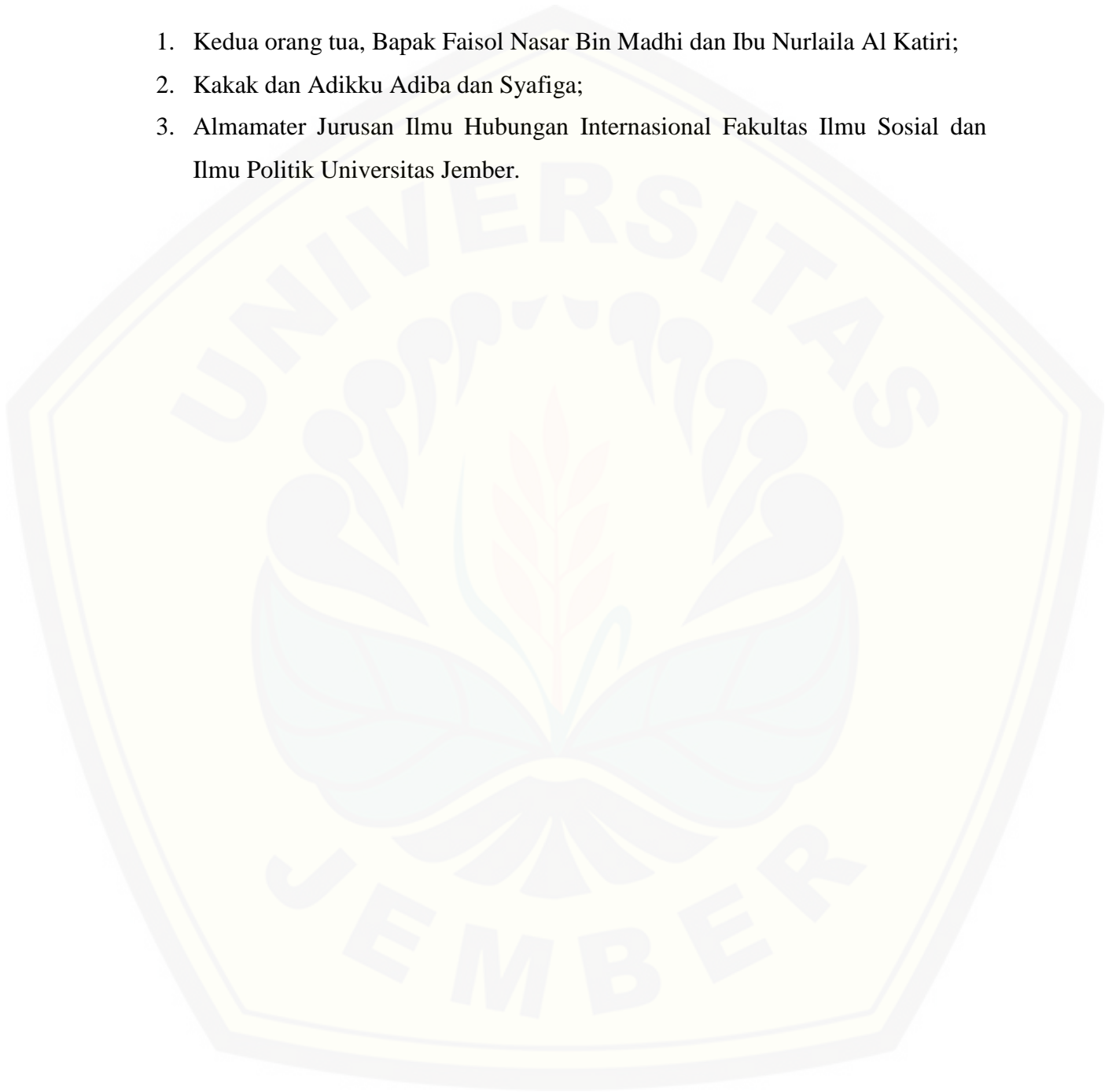
JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Faisol Nasar Bin Madhi dan Ibu Nurlaila Al Katiri;
2. Kakak dan Adikku Adiba dan Syafiga;
3. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“I believe it is important that Japanese write a constitution for ourselves that would reflect the shape of the country we consider desirable in the 21st century”- Shinzo Abe¹



¹ Jonathan Schell.2007.The Seventh Decade: The New Shape of Nuclear Danger. Macmillan. Hsl.147

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Wildan Faisol

NIM : 100910101045

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014 ” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang telah disebutkan sumbernya. Karya ilmiah ini juga belum pernah diajukan pada instansi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Agustus 2015

Yang menyatakan

Wildan Faisol

NIM. 100910101045

SKRIPSI

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG:

TAHUN 2014

Oleh

Wildan Faisol

NIM 100910101045

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Agus Trihartono. M.A., Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Kamis
tanggal : 20 Agustus 2015
waktu : 09.00
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua

Drs. Abubakar Eby Hara M.A, Ph.D
NIP 19640208989021001

Sekretaris I

Sekretaris II

Agus Trihartono, M.A.,Ph.D.
NIP 196908151995121001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si Ph.D
NIP 197812242008122001

Anggota I

Anggota II

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 195803171985031003

Drs. Agung Purwanto M.Si
NIP 196810221993031002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

“Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014” ; Wildan Faisol 100910101045; 2015; 76 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pemerintah Jepang pada tahun 2014 meluncurkan dokumen strategi keamanan nasional (*NSS*) dan garis besar program pertahanan tahun 2014 (*NDPG 2014*). Dalam dokumen tersebut pemerintah Jepang memperkenalkan konsep baru dalam pengambilan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yaitu konsep kontribusi proaktif pada perdamaian (*proactive contribution to peace*).

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti transformasi kebijakan pertahanan Jepang pasca perang dingin dan penerapan konsep *proactive contribution to peace* oleh pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data berupa data sekunder dan kemudian dianalisa secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam menerapkan konsep *proactive contribution to peace* ialah untuk meningkatkan kemandirian Jepang dalam menentukan posisinya di dunia global. Prinsip tersebut menuntut Jepang agar lebih aktif berperan dalam menciptakan perdamaian di level regional dan internasional.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014**” . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Trihartono, S.Sos.,M.A.,Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama dan bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Drs. Djoko Susilo, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademi atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan Ibu dosen dan staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
4. Ayahanda Faisol Nasar Bin Madhi dan Ibunda Nurlaila; Kakak Adiba dan Adik Syafiga
5. Sahabat dan kawan-kawan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Angkatan 2006 sampai 2014 yang telah berbagi cerita, cinta, mimpi, serta harapan selama penulis menempuh pendidikan;
6. Sahabat dan kawan – kawan Universitas Jember yang pernah berbagi pengalaman dalam organisasi bersama penulis dalam Himahi (11/12 & 12/13), UKM Bola Basket (Fisip & Unej) dan AIESEC Universitas Jember
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Agustus 2015
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi.....	9
1.2.2 Batasan Waktu.....	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Landasan Teori	11
1.5.1 Konsep Proaktif Pasifisme.....	12
1.6 Argumen Utama	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.7.2 Teknik Analisis Data.....	14
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB 2. SEJARAH UMUM KEBIJAKAN MILITER DAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 1868-1976	17

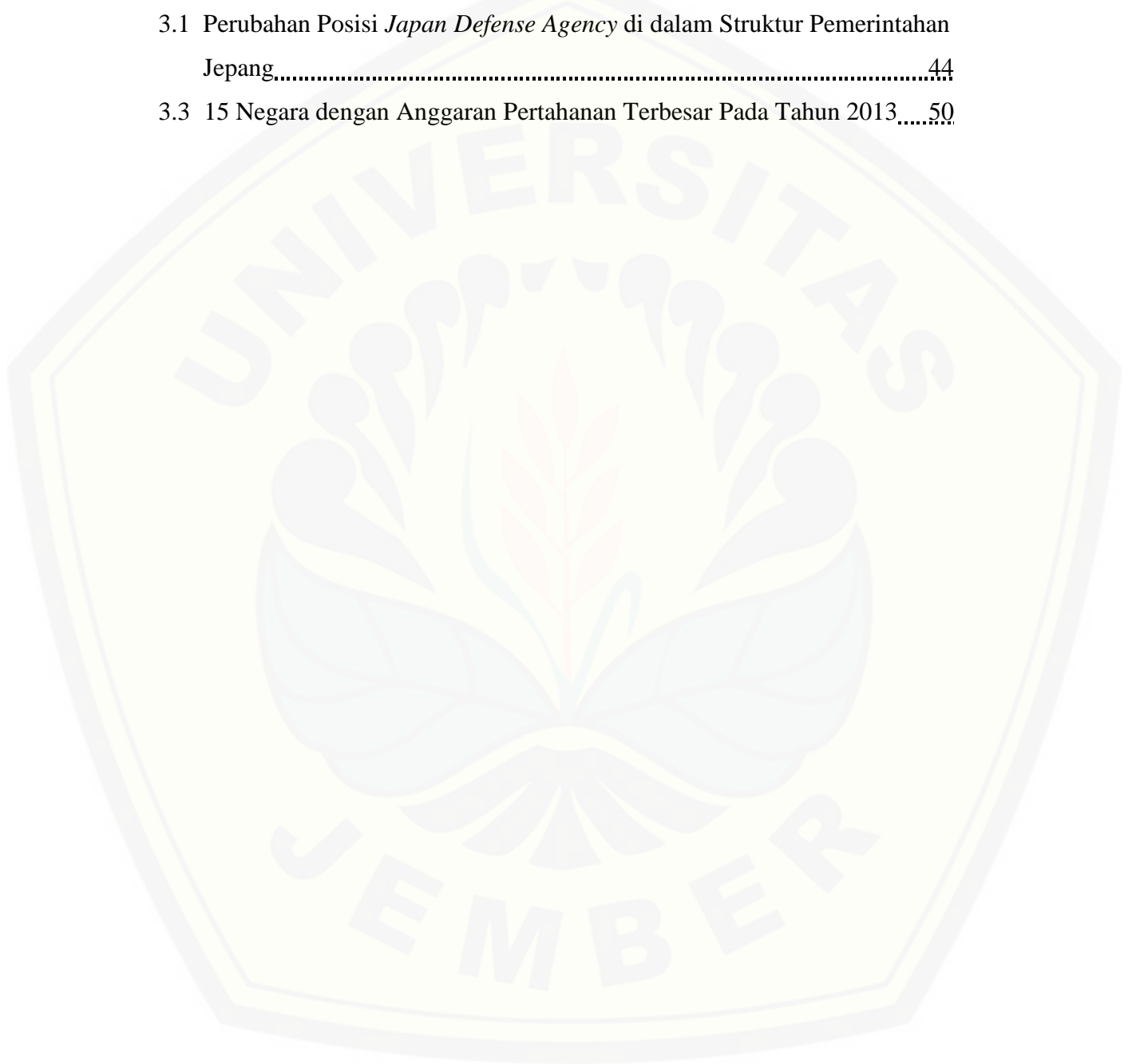
2.1	Sejarah Umum Kebijakan Militer dan Pertahanan Jepang Sebelum Perang Dunia II.....	18
2.2	Sejarah Umum Kebijakan Militer dan Pertahanan Jepang Setelah Perang Dunia II.....	24
BAB 3.	TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 1996-2014	33
3.1	Faktor Internal dan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 1996-2014.....	33
3.1.1	<i>National Defense Program Guidelines 1996</i>	33
3.1.2	<i>National Defense Program Guidelines 2005</i>	34
3.1.3.	Transformasi <i>Japan Defense Agency</i> menjadi Kementerian Pertahanan	37
3.1.4.	<i>National Defense Program Guidelines 2011</i>	39
3.1.5.	<i>National Security Council</i>	40
3.1.6.	Peningkatan Anggaran Dasar Pertahanan Jepang Tahun 2013.....	42
3.1.7.	Peningkatan Anggaran Dasar Pertahanan Jepang Tahun 2014.....	45
3.1.8.	Perubahan Larangan Ekspor Peralatan Militer Jepang	48
3.2.	Faktor Eksternal Dalam Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang.....	51
BAB 4.	KONSEP <i>PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE</i> DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014	54
4.1	Publikasi <i>National Security Strategy</i> oleh NSS.....	54
4.2	<i>National Defense Program Guidelines 2014</i>	55
4.3	<i>Proactive Contribution To Peace</i> Sebagai Dasar Prinsip Jepang Dalam Dunia Internasional.....	56
4.4	Penafsiran Ulang Pasal 9 Sebagai Implikasi Penerapan Konsep <i>Proactive Contribution To Peace</i>	58

BAB 5. Kesimpulan	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

2.1 Total Biaya Kerugian Perang Oleh Jepang Untuk Negara – Negara yang Dijajah Selama Tahun 1941 – 1945	30
3.1 Perubahan Posisi <i>Japan Defense Agency</i> di dalam Struktur Pemerintahan Jepang.....	44
3.3 15 Negara dengan Anggaran Pertahanan Terbesar Pada Tahun 2013.....	50



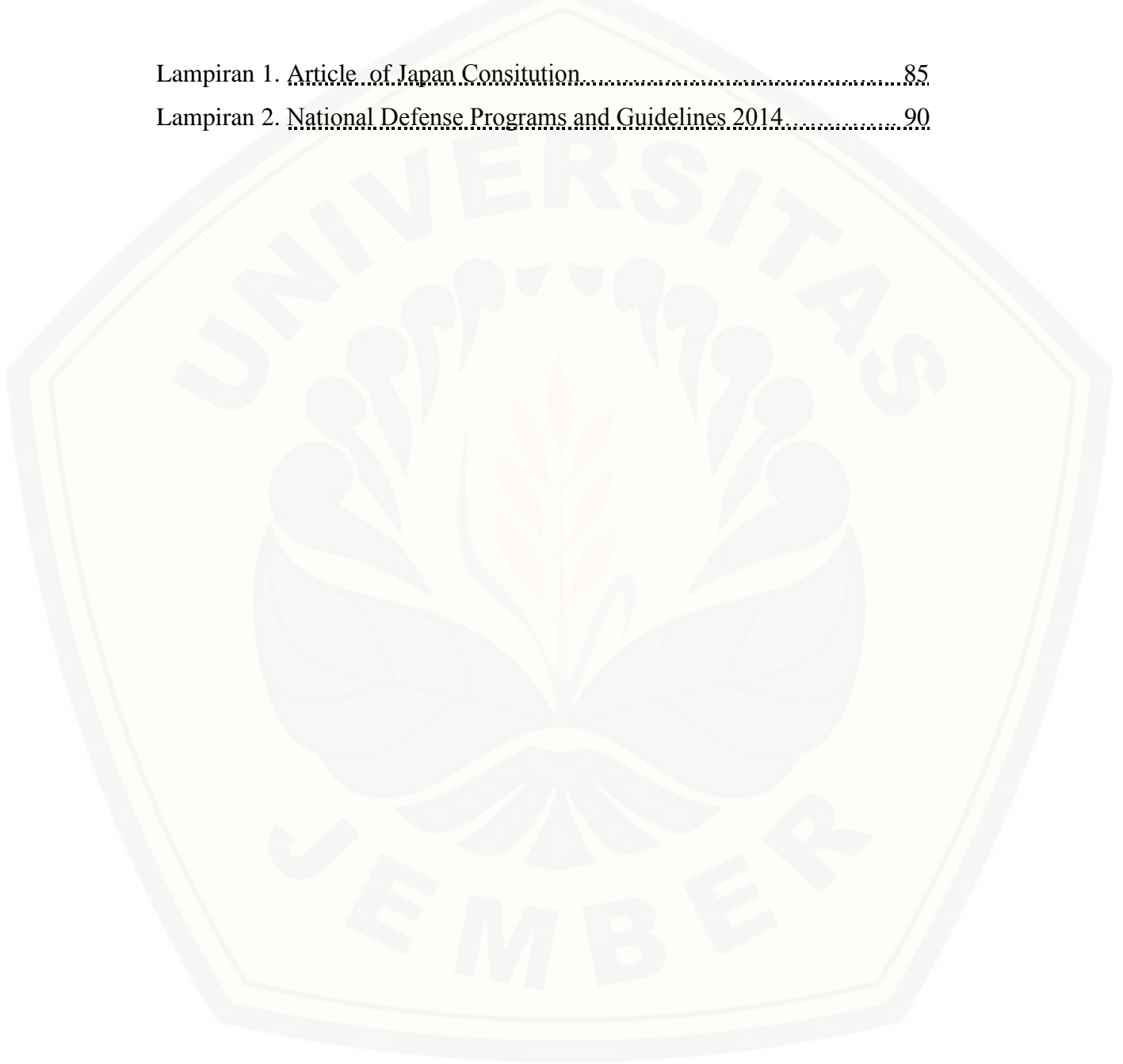
DAFTAR GRAFIK

3.1 Anggaran Pertahanan Jepang 2010-2013	47
3.2 Anggaran Pertahanan Jepang 2010-2014	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Article of Japan Consitution.....	85
Lampiran 2. National Defense Programs and Guidelines 2014.....	90



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Perang Dunia II (PD II), Jepang menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer yang kuat dalam blok negara sentral bersama Italia dan Jerman. Kekuatan militer yang dimiliki Jepang tersebut, mengakibatkan Jepang berani menginvasi Cina pada tahun 1937², Uni Soviet pada tahun 1904 dan 1938³ dan pangkalan militer Amerika Serikat yaitu Pearl Harbour pada tahun 1942.⁴ Aksi-aksi Jepang tersebut akhirnya membuat negara-negara yang tergabung di blok Sekutu (Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Cina) bertindak tegas. Negara-negara dalam blok Sekutu di PD II berusaha membendung kekuatan Jepang dengan membentuk Deklarasi Postdam yang diprakarsai oleh Amerika Serikat, Inggris dan Cina⁵. Dalam Deklarasi Postdam, Jepang diberikan dua opsi yaitu memaksa Jepang mengakhiri perang atau blok Sekutu melakukan penghancuran total ke negara Jepang.

Deklarasi Postdam menyatakan bahwa Jepang harus tunduk pada pemerintahan sekutu untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam deklarasi ini ketiga negara (kecuali Uni Soviet) tersebut sepakat mengesahkan beberapa poin diantaranya menghapus paham militerisme, melucuti perlengkapan militer, menghukum panglima – panglima militer sebagai penjahat-penjahat perang, dan mendukung nilai-nilai demokrasi.⁶ Jepang pada awalnya memilih untuk mengabaikan kesepakatan deklarasi Postdam tersebut. Permohonan untuk menyerah terhadap sekutu tersebut pada awalnya diabaikan Jepang dikarenakan pihak Jepang masih menginginkan status Kaisar sebagai pemegang kedaulatan

² Ian Nish. 2002. "Japanese Foreign Policy In The Interwar period". London. Praeger Publisher. Hal. 1

³ Ibid

⁴ Ibid

⁵ National Diet Library. 1945. "Postdam Declaration" diakses dari <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html> pada tanggal 7 November 2014

⁶ Ibid

tertinggi. Namun Amerika Serikat merespon tindakan Jepang tersebut dengan menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima pada tahun 1945. Pada kesempatan kedua yang diberikan kepada pihak Jepang untuk menyerah kepada pihak sekutu akhirnya disetujui oleh Jepang.⁷

Keputusan Jepang dalam penyerahan diri terhadap sekutu dalam deklarasi Postdam mempengaruhi perubahan konsitusi undang-undang dasar Jepang tahun 1947.⁸ Dalam perubahan tersebut akhirnya membawa prinsip-prinsip baru dalam kontitusi Jepang, diantaranya prinsip kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia dan penolakan perang. Salah satu perubahan konstitusi pada pasal 9 sebagai berikut:

“Bercita-cita tulus menciptakan perdamaian Internasional yang dilandasi hukum dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang untuk menyelesaikan permasalahan Internasional. Untuk melengkapi paragraf sebelumnya, kekuatan militer di darat, laut dan udara serta aspek kekuatan militer potensial lainnya tidak akan di pertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.”⁹

Karena perubahan pasal tersebut, Jepang menjadi pemain yang pasif dalam bidang militer. Sektor militer menjadi sepenuhnya dikendalikan Amerika Serikat. Saat ini kekuatan militer Jepang berpusat pada pasukan tentara bela diri Jepang (*Japan Self Defense Force, JSDF*) yang ditempatkan di pulau-pulau di sekitar Jepang dan tidak diizinkan untuk beroperasi di luar negeri.

Pada tahun 1976, Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency, JDA*) meresmikan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Outlines, NDPO*) untuk menyediakan definisi yang jelas dan tersurat tentang doktrin pertahanan serta arah hubungan dan aktivitas pertahanan Jepang.¹⁰ Dokumen ini merupakan dokumen yang mengatur fungsi-fungsi fundamental

⁷ Andrew Gordon.2003.”In The Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present”. New York. Oxford University Press.Hal. 226

⁸Loc.Cit Hal. 231

⁹ Ministry of Defense. 1947. “Chapter II. The Reuncitation of War. Article 9 dalam The Constitution of Japan, 1946” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html pada tanggal 28 Oktober 2014

¹⁰ Christopher W. Hughes.1999.”Japan’s Economic Powers and Security: Japan and North Korea”. London: Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series. Hal 174

sistem pemerintahan, sistem keamanan, serta sistem pertahanan Jepang. NDPO tersebut mempunyai tujuan yaitu demi lebih berperan aktif dalam keamanan internasional serta dalam rangka menghadapi ancaman dari luar, terutama kawasan Asia Pasifik.

Perubahan sistem internasional pasca Perang Dingin dan semakin meningkatnya ancaman-ancaman yang muncul di kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk membahasnya kembali. NDPO 1976 tersebut dirasa tidak lagi relevan sebagai pedoman kebijakan pertahanan Jepang pada pasca Perang Dingin. Dalam hal ini, pemerintah Jepang akhirnya menghasilkan pedoman kebijakan pertahanan baru yang disebut dengan Garis Besar Program Pertahanan Nasional 1996 (NDPG 1996) pada tahun 1995.¹¹

Pada tahun 2004, pemerintah Jepang kembali merumuskan NDPG tersebut, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan JSDF, menghadapi ancaman Terrorisme, senjata pemusnah massal,¹² ancaman rudal balistik dan mempererat kerjasama aliansi Jepang-Amerika Serikat. NDPG tersebut dibentuk ketika tahun 2004 dan dijalankan pada tahun 2005. NDPG tersebut ditetapkan sebagai pedoman kebijakan pertahanan baru Jepang dalam membangun kekuatan pertahanan.¹³ Dalam kebijakan tersebut Jepang akhirnya meningkatkan kerjasama yang lebih intensif dengan Amerika Serikat terkait keamanan kawasan Pasifik. Kebijakan selanjutnya ialah merubah status JDA menjadi Kementerian Pertahanan pada tahun 2007.¹⁴ Perubahan tersebut otomatis membuat departemen pertahanan Jepang mempunyai kekuatan penuh dalam menentukan anggaran dan kebijakan untuk urusan keamanan dan pertahanan. Aktor yang sangat berperan dalam merealisasikan kebijakan tersebut ialah Perdana Menteri Shinzo Abe. Perdana

¹¹Ministry of Defense.2006.Chapter 2 The Basics of Japan,s Defense Policy.Diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/2-2-1.pdf pada tanggal 8 April 2015.

¹²Ibid

¹³Ministry of Defense. 2004. “Nation Defense Program Guidelines FY 2005-“ diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf pada tanggal 28 Oktober 2014

¹⁴ Anthony Faiola. 2006. “Japan Upgrades Its Defense Agency” diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/15/AR2006121501707.html> pada tanggal 28 Oktober 2014

Menteri Shinzo Abe yang menggantikan Junichiro Koizumi, selalu menyerukan peningkatan peran Jepang dalam sektor keamanan regional maupun global.¹⁵

Jepang kembali merumuskan NDPG pada akhir tahun 2010 untuk diimplementasikan pada tahun 2011.¹⁶ Dalam NDPG tahun 2011 tersebut terdapat perubahan dan peningkatan penggunaan kekuatan yang terdapat dalam NDPG tersebut. Salah satunya ialah perubahan konsep dalam pertahanan Jepang. Pada masa sebelumnya melalui konsep dasar pertahanan (*Basic Defense Force Concept*) menitik beratkan pada pembangunan kekuatan pertahanan dan lebih pasif dalam menciptakan daya tangkal melalui *Japan Self Defense Force* dan pada NDPG tahun 2011, konsep dasar tersebut berubah menjadi *Dynamic Defense Force* yang memaksa *Japan Self Defense Force* melakukan tindakan yang lebih aktif yaitu dengan menjalankan serangkaian operasi militer secara rutin dengan kegiatan-kegiatan seperti operasi intelijen dalam kondisi normal sekalipun.¹⁷

Perubahan-perubahan yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap pertahanannya tidak berhenti pada revisi NDPG pada tahun 2011 dan perubahan status JDA. Pemerintah Jepang juga meningkatkan anggaran pertahanan untuk pertama kalinya setelah 11 tahun pada tahun 2013.¹⁸ Ketegangan di kawasan Laut Cina Timur dan daerah kepulauan Senkaku yang semakin mengancam territorial Jepang membuat pemerintahan Shinzo Abe kembali memutuskan untuk melakukan suatu perubahan dalam pertahanannya.¹⁹ Pemerintahan Jepang memutuskan untuk kembali menaikkan anggaran pertahanan Jepang tahun 2014

¹⁵ Kersten Rikki. 2012. "The Koizumi–Abe Revolution in Japanese Security Policy: Normative Transformation and Democratic Maturity" dalam buku William T. Tow. 2012. "Bilateral Perspectives on Regional Security Australia, Japan and the Asia-Pacific Region". London: Palgrave and Macmillan. Hal 48

¹⁶ Ministry of Defense. 2010. "Content of the 2010 NDPG" diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

¹⁷ Ibid

¹⁸ Isabel Reynolds. 2013. "Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11 Years" diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/print/2013-01-29/japan-s-defense-spending-to-increase-for-first-time-in-11-years.html> pada tanggal 27 Oktober 2014

¹⁹ Martin Fackler. 2013. "Japan Is Weighing Raising Military Spending" diakses dari <http://www.nytimes.com/2013/01/08/world/asia/witheonchinajapanweighsraisingmilitaryspending.html?pagewanted=print> pada tanggal 14 Juli 2015

menjadi 47,8 Triliun Yen, setelah tahun sebelumnya menganggarkan 46,8 Triliun Yen.²⁰

Usaha Jepang dalam mentransformasikan militernya berlanjut pada tahun 2014 ketika pemerintah Jepang merubah larangan ekspor peralatan militer untuk pertama kali setelah 50 tahun. Pada masa sebelumnya Jepang dilarang untuk mengekspor peralatan militer kecuali kepada Amerika Serikat.²¹ Hal ini bertolak belakang dengan 3 prinsip dalam peraturan ekspor peralatan militer (*Three Principles on Arms Exports*) yang telah diatur oleh parlemen (*Diet*) Jepang pada tahun 1967 sebagai dari bagian doktrin kebijakan pertahanan dan luar negeri.²² Dalam peraturan ekspor peralatan militer sebelumnya mengatur bahwa Jepang dilarang mengekspor peralatan militer kepada negara-negara berideologi Komunis, negara-negara yang terkena larangan impor peralatan militer oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dan negara-negara yang terlibat dalam konflik internasional.²³ Pada peraturan yang baru mengganti larangan mengekpor peralatan militer menjadi peraturan transfer peralatan teknologi dan pertahanan (*Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology*).

Pada akhir tahun 2013, Jepang juga kembali merumuskan NDPG terbaru yaitu NDPG 2014 dan juga membentuk dewan keamanan nasional (*National Security Council, NSC*) yang mengeluarkan kebijakan strategi kebijakan keamanan (*National Security Strategy, NSS*). Proses perumusan NDPG 2014 telah dimulai sejak tahun 2013 setelah Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan akan melakukan peninjauan ulang terhadap NDPG sebelumnya yaitu NDPG tahun

²⁰ Stockholm International Peace Research Insitute.2014 diakses dari http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/Milex_April_2014 pada tanggal 24 Mei 2015

²¹ Willy Haryono.2014. “Jepang Cabut Larangan Ekspor Peralatan Militer” diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/04/01/225509/jepang-cabut-larangan-ekspor-peralatan-militer> pada tanggal 27 Oktober 2014

²² Ministry of Foreign Affairs.1967. “Japan Policies to Control Arms Export” diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/> pada tanggal 28 Oktober 2014

²³ Stephen Harner.2014. “Abe's New 'Three Principles on Arms Exports' Deserve Support” diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2014/02/24/abes-new-three-principles-on-arms-exports-deserve-support/> pada tanggal 28 Oktober 2014

2011.²⁴ NDPG tahun 2014 mengedepankan konsep kontribusi proaktif untuk perdamaian (*Proactive Contribution to Peace*) dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang. Dalam NDPG tahun 2014 tersebut, Jepang berusaha meningkatkan kekuatan militer sebagai usaha untuk menunjukkan eksistensi Jepang kepada dunia global dan juga untuk meningkatkan partisipasi Jepang dalam berkontribusi terhadap perdamaian internasional.

Jepang kembali melakukan transformasi dalam kebijakan pertahanan dan luar negerinya dengan melakukan perubahan penafsiran terhadap pasal 9 (*article 9*) berupa pembelaan diri secara kolektif (*Collective Self Defense*) yang dapat diartikan salah satunya bahwa Jepang diperbolehkan ikut menggunakan kekuatan militernya ketika negara sekutunya terancam oleh serangan dari negara lain.²⁵ Kebijakan ini ada pada pasal 9 dalam konstitusi Jepang tahun 1946 tentang penolakan terhadap perang (*Renunciation of War*).²⁶ Pada pasal 9 sebelumnya dalam konstitusi Jepang hanya mengatur hak untuk membela diri (*self defense*) dari ancaman atau serangan bersenjata terhadap negara Jepang. Sebelumnya pasal 9 tersebut mengandung penafsiran dalam memakai kekuatan militer harus dalam memenuhi 5 kondisi sebagai berikut:

1. Hak untuk mempertahankan dan membela diri yang diizinkan untuk Jepang pada konstitusinya harus sesuai dengan kebutuhan
2. Pelaksanaan untuk melakukan pembelaan diri hanya terbatas pada dua kondisi, yaitu ketika telah adanya suatu tindakan agresif dari negara lain yang mengancam Jepang dan tidak ada pilihan lain selain membela diri.
3. Penggunaan kekuatan militer secara minimum dalam rangka melaksanakan hak bela dirinya

²⁴ Ministry of Defense.2013.Press Confrence by Minister of Defense, January 25th 2013” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html> pada tanggal 12 April 2015

²⁵ Norihiro Kato. 2014. “Japan breaks with Peace” diakses dari http://www.nytimes.com/2014/07/17/opinion/norihiro-kato-japans-break-with-peace.html?_r=0 pada tanggal 28 Oktober 2014

²⁶Ministry of Defense.1947.“Chapter II.The Reuncitation of War.Article 9 dalam The Constitution of Japan, 1946” Op. Cit.

4. Kekuatan bersenjata Jepang hanya untuk digunakan melindungi Jepang dan bukan untuk melindungi negara sekutu Jepang.
5. Meskipun Jepang mempunyai hak untuk membela diri, tetapi hak tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menyatakan perang terhadap negara lain

Dalam perubahan penafsiran yang dilakukan pemerintah Jepang terhadap pasal 9 akhirnya memunculkan penafsiran baru dalam memakai kekuatan militer, yaitu harus dalam memenuhi 3 kondisi sebagai berikut:²⁷

1. Ketika suatu kekuatan bersenjata mengancam Jepang atau mengancam negara lain yang memiliki kedekatan dengan Jepang dan mengancam keselamatan warga Jepang.
2. Ketika tidak ada pilihan lagi untuk mengusir ancaman dan demi menjamin keselamatan rakyatnya
3. Menggunakan kekuatan pada tingkat minimum.

Kebijakan ini lantas mendapatkan kecaman dari rakyat Jepang, pemerintahan negara Cina, dan Korea Selatan.²⁸ Rakyat Jepang menolak penafsiran ulang isi konstitusi tersebut karena sebuah kemunduran bagi status Jepang yang tidak pernah terlibat perang dengan negara lain sejak setelah perang dunia II. Penduduk Jepang masih merasakan trauma atas kondisi negaranya ketika perang dunia II yang menyebabkan Jepang mengalami kehancuran. Salah satu media di Jepang yaitu *The Asahi Simbun* melakukan polling dengan mengambil sample dari 3000 orang dengan hasil 63% dari 3000 orang tersebut tidak mendukung kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe dalam perubahan penafsiran terhadap *article 9* tersebut.²⁹ Sedangkan pihak Cina dan Korea Selatan dalam

²⁷Ibid

²⁸ Euan McKirdy.2014. "Japan Nation Mulls End of Pacifism" diakses dari <http://edition.cnn.com/2014/07/01/world/asia/japan-constitution-protests/> pada tanggal 28 Oktober 2014.

²⁹The Asahi Simbun. 2014. "Asahi poll: 63% oppose Abe's attempt to lift ban on collective self-defense" diakses dari http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201404070067 pada tanggal 12 Desember 2014

menanggapi perubahan tersebut berasumsi bahwa Jepang tidak mentaati semangat sebagai negara yang selalu mengedepankan terciptanya perdamaian (*pacifism state*).

Dengan adanya perubahan dari prinsip-prinsip pertahanan Jepang mulai dari periode pertama era pemerintahan perdana menteri Shinzo Abe yang merubah NDPG pada tahun 2004 hingga peluncuran dokumen NDPG tahun 2014. Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi beberapa perubahan dalam bidang pertahanan Jepang sejak berakhirnya Perang Dingin. Dengan munculnya fenomena-fenomena tersebut, penulis mencoba merumuskan dalam penelitian skripsi berjudul:

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penelitian berjalan sistematis diperlukan sebuah ruang lingkup untuk membatasi sebuah permasalahan. Dengan demikian tidak melebar dan fokus. Ruang lingkup juga memberikan kemudahan pada penulis dalam pencarian data dan menganalisisnya untuk mempermudah dalam penganalisisan kejadian-kejadian pada kurun waktu tertentu. Pembatasan masalah berkaitan dengan adanya berupa batas dalam peringkasan materi, menyempitkan batasan waktu, dan kemampuan intelektual untuk menyelidiki semua persoalan. Ruang lingkup pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu:

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk menunjuk fokus terhadap materi yang dijadikan fokus utama permasalahan dalam sebuah karya ilmiah. Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah fenomena yang dianalisa. Sutrisno Hadi mengatakan bahwa:

Sekali suatu perumusan telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberi formulasi – formulasi yang tegas dalam permasalahan tersebut. Bagi penyidik sendiri, penegasan tersebut akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada laporan penelitian ini hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerapuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya.³⁰

Supaya karya ilmiah ini sesuai dengan apa yang menjadi tema tersebut diatas, maka penulis lebih fokus pada penerapan konsep *Proactive contribution to peace* dalam kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang tahun 2014. Pada skripsi ini juga akan dijelaskan mengenai transformasi kebijakan pertahanan Jepang sejak diterbitkan NDPO 1996 hingga NDPG 2014.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yang dimaksud di sini adalah mengenai rentang waktu mulai kapan dan sampai kapan materi kajian ini berlangsung. Tujuannya adalah untuk menghindari kekaburan tulisan. Batasan waktu yang dipakai dimulai sejak merumuskan garis besar pertahanan nasional (*NDPO*) pertama kali pada tahun 1996 hingga ketika tahun 2014 ketika Jepang menerapkan konsep *Proactive contribution to peace* pada setiap kebijakan pertahanan Jepang. Ketika pemerintah Jepang menerbitkan NDPO 1996 sebagai titik awal batasan waktu dikarenakan kebijakan tersebut sebagai langkah awal Jepang untuk menata ulang prinsip-prinsip dalam perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yang disesuaikan dengan kondisi dunia paca perang dingin.

1.3. Rumusan Masalah

Permasalahan sangat penting dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah karena akan memberikan suatu pusat pemikiran agar pembahasan dan analisa dapat berlangsung dengan baik. Permasalahan bisa dianalogikan sebagai jiwa

³⁰ Sutrisno Hadi.1984. *Metdologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM

penelitian yang menuntut jawaban. Sehingga permasalahan tersebut perlu dipecahkan, baik mengenai wawasan atau pengertiannya. Dengan hal ini, diharapkan akan ditemukan suatu jawaban dari permasalahan yang kita kaji. Sehingga tidak semua kajian bisa disebut sebagai masalah.

Dalam hal ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan konsep *Proactive Contribution to Peace* dalam kebijakan pertahanan Jepang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, tujuan utama dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan tentang evolusi kebijakan pertahanan Jepang sejak tahun era kekaisaran Meiji hingga tahun 2014 dan penerapan konsep *proactive contribution to peace* terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang.

1.5. Landasan Teori

Dalam melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, diperlukan adanya teori maupun konsep sebagai pijakan awal. Teori maupun konsep berfungsi sebagai pisau analisa untuk menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan dan hipotesa yang sudah dibentuk. Konsep menurut Maso'ed adalah abstraksi yang mewakili objek, sifat suatu objek, atau fenomena tertentu. Kita menggunakannya sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang kompleks dan relevan bagi kita.³¹

³¹ Mochtar Mas'oed. 1990." Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Jakarta: LP3ES, Hal. 94

1.5.1. Proaktif Pasifisme (*Proactive Pacifism*)

Konsep pasifisme dalam perkembangannya memunculkan beberapa bentuk baru, salah satunya pasifisme kondisional (*Contingent Pacifism*). Larry May professor hukum dan filsafat dari Universitas Vanderbilt berasumsi bahwa *contingent pacifism* tidak selalu menolak segala perang yang terjadi, dikarenakan berdasarkan dari pengalaman bahwa situasi dunia bisa berubah pada suatu masa ke masa yang susah untuk diantisipasi.³² Hal tersebut yang membuat *contingent pacifism* tidak mengharamkan perang meskipun konsep pasifisme masih menjadi konsep yang mereka anut. Sejalan dengan May, Martin Ceadel professor ilmu politik dari Universitas Oxford memiliki asumsi pada *contingent pacifism* sebagai bentuk pasifisme yang masih menerima fakta bahwa kebijakan untuk berperang yang dilakukan suatu negara bisa jadi merupakan salah satu cara dalam usaha menciptakan perdamaian.³³ Dalam dunia politik internasional, pandangan pasifisme kontingen ini menyerupai pandangan pasifisme yang disuarakan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang ingin membawa Jepang menjadi negara pasifis yang proaktif. Jika menjadi pasifisme yang lebih proaktif maka Jepang akan lebih leluasa dalam memilih berbagai opsi terutama terkait keamanan kawasan Asia Timur. Konsep Pasifisme Proaktif tersebut ditegaskan oleh pemerintahan Shinzo Abe dengan nama *proactive contribution to peace* dalam perumusan NDPG 2014. NDPG 2014 mendefinisikan prinsip dasar dalam kebijakan keamanan nasional. Berpedoman terhadap NDPG sebelumnya pada tahun 2011 yang berkomitmen terhadap kebijakan keamanan yang dirancang khusus untuk pertahanan nasional, namun masih berjanji untuk tidak mentransformasikan kekuatan militer Jepang yang dapat memberikan ancaman terhadap negara lain dan berpegang dengan tiga prinsip Non-Nuklir (*Three Non – Nuclear Principles*) yaitu tidak akan memproduksi dan memiliki senjata militer dengan kekuatan tenaga Nuklir. Pada NDPG 2014 yang dikeluarkan pemerintah Jepang pada akhir tahun 2013 menambahkan poin penting dalam kebijakan

³² Larry May.2012.Selective, Refusal, Contingent Pacifism and International Legal Theory. Berkeley. University of California

³³ Martin Ceadel.1980. Pacifism in Britain, 1914-1945: The Defining of a Faith.Oxford. Clarendon Press

pertahanan yang dirancang agar berkonsep *proactive contribution to peace* atau lebih proaktif dalam menciptakan perdamaian. Definisi *proactive contribution to peace* Jepang menurut NDPG 2014 ialah:³⁴

Proaktif berkontribusi untuk perdamaian dunia berdasarkan prinsip kerjasama Internasional. Lebih lanjutnya hal ini memerlukan tatanan pertahanan yang komprehensif untuk memperkuat sistem yang mampu mencegah dan merespon berbagai macam ancaman. Bentuk implementasinya antara lain dalam memperkuat aliansi Jepang-Amerika Serikat, menyuarakan kerjasama keamanan dengan negara lain dan membangun kapabilitas pertahanan yang terintegrasi dan efektif berdasarkan kebijakan pertahanan nasional yang berada dibawah konsitusi dan tidak menjadi kekuatan militer yang dapat memunculkan ancaman kepada negara lain.

Dalam konsep ini Jepang ingin lebih aktif berkerja sama dengan negara lain untuk aktif berkontribusi dalam keamanan internasional dan tidak hanya bereaksi untuk mencegah terjadinya peristiwa – peristiwa yang telah terjadi dengan Jepang di masa lalu. Menurut asumsi Badan Strategi Keamanan Jepang (*National Security Strategy, NSS*) meningkatnya tantangan – tantangan keamanan dalam kawasan Asia Pasifik membutuhkan kebijakan internasional yang membutuhkan koordinasi antar negara. Meskipun pada kegiatan kegiatan Jepang pada sebelumnya telah melibatkan Jepang untuk aktif menciptakan perdamaian dunia, seperti aktif dalam forum – forum PBB, bantuan kemanusiaan dan program rekonstruksi pasca bencana alam, kebijakan – kebijakan tersebut dirasa belum cukup untuk memberikan efek besar dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu konsep *proactive contribution to peace* didaulat sebagai konsep baru dalam setiap perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang. Dalam kebijakan pertahanannya, Jepang berusaha meningkatkan kekuatan militer sebagai upaya pencegahan (*deterrence*) untuk mempertahankan diri dari berbagai

³⁴Ministry of Defense.2013.Press Confrence by Minister of Defense, January 25th 2013” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html> pada tanggal 12 April 2015

acaman dan juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi Jepang dalam meningkatkan kontribusinya dalam menjaga perdamaian dunia. NDPG 2014 dengan konsepnya *proactive contribution to peace* merupakan sebuah langkah baru yang diambil oleh pemerintahan Jepang, jika melihat bagaimana Jepang selama ini bergantung terhadap kehadiran pasukan militer Amerika Serikat dan pasukan JSDF yang menjadi penjamin keamanan negerinya.

1.6. Argumen Utama

Perubahan dalam lingkungan keamanan Jepang setelah Perang Dingin mendorong Jepang untuk mengubah secara fundamental dan struktural dalam strategi dan doktrin pertahanannya yang sampai berakhirnya Perang Dingin hanya bergantung terhadap kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu dengan kembali munculnya instabilitas keamanan di kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk merombak ulang strategi dan doktrin fundamental dalam kebijakan- kebijakan pertahanannya. Dengan tatanan politik internasional yang berubah menjadi semakin rumit, maka Jepang sebagai salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat di kawasan Asia Timur diharapkan melakukan perubahan peran demi dapat beradaptasi dan berkontribusi pada tatanan politik internasional yang baru. Perubahan peran yang dimaksud ialah Jepang diharapkan menjadi lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi kawasan dan dunia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah teknik untuk mencari dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang terkait. Metode penelitian digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan sebelumnya agar mendapatkan hasil yang optimal. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan karya tulis ilmiah ini agar situasi sosial dapat dipahami secara mendalam dan menyeluruh. Data yang diperoleh bersifat data sekunder. Data sekunder ialah

informasi yang dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber lain secara tidak langsung.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik penelitian studi pustaka (*Literature Research*). Pengumpulan data yang digunakan lebih difokuskan pada informasi yang berasal dari buku, dokumen, jurnal dan surat kabar baik cetak maupun elektronik. Selain itu, sebagai data pendukung peneliti data hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar, akademisi maupun pihak terkait yang berhubungan dengan pembahasan karya ilmiah ini. Data yang diperoleh berupa data sekunder, atau dengan kata lain peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk meneliti. Oleh karena itu untuk mendapatkan data penelitian yang relevan, penulis menggunakan pusat informasi diantaranya :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3. Media internet
4. Koleksi Pribadi
5. Media cetak

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Data kualitatif bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena secara *riil* dan apa adanya.³⁵ Pada karya ilmiah ini data sekunder yang digunakan berasal dari ulasan berita media massa, pendapat dan penelitian para pengamat, ahli, akademisi, serta pejabat negara yang terkait dengan dinamika kebijakan pertahanan Jepang. Selain itu penulis juga menggunakan data yang diperoleh dari publikasi jurnal dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis. Berdasarkan data-data

³⁵Kartini, Kartono. 1990. Metodologi Riset. Bandung: CV.Mandar Maju. Hal.63

tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang bagaimana evolusi kebijakan-kebijakan pertahanan Jepang sejak tahun 1976 dan bagaimana konsep *proactive contribution to peace* diterapkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dalam kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Bab I akan membahas mengenai garis besar penelitian karya ilmiah. Garis besar penelitian tersebut ialah latar belakang, ruang lingkup permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argument utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Sejarah Umum Militer dan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 1868-1976

Bab II akan menjelaskan mengenai sejarah umum militer dan kebijakan pertahanan Jepang sejak era kekaisaran Meiji hingga dibentuknya NDPO 1976.

BAB 3 Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang Sejak Tahun 1996-2014

Bab III merupakan jawaban atas rumusan masalah yang pertama tentang kebijakan Jepang dalam mentransformasi kebijakan pertahanan Jepang sejak tahun 1996 hingga 2014. Karena pada tahun 1996 Jepang menerbitkan garis besar pertahanan nasionalnya (NDPG) pertama pasca usainya perang dingin hingga ketika kembali menerbitkan NDPG yang terbaru pada tahun 2014.

BAB 4 Konsep *Proactive Contribution To Peace* dalam Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 2014

Bab IV merupakan jawaban atas rumusan masalah yang kedua pada karya ilmiah ini. Pada bab ini penulis juga akan menuliskan bagaimana pemerintahan Shinzo Abe menerapkan konsep *Proactive contribution to Peace* terhadap kebijakan-kebijakannya.

BAB 5 Kesimpulan

Bab V merupakan bagian akhir dari karya ilmiah, pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari bab- bab yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB 2

SEJARAH UMUM MILITER DAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 1868-1976

2.1. Sejarah Umum Militer dan Kebijakan Pertahanan Jepang sebelum Perang Dunia II

Dalam membahas sejarah perkembangan Jepang pada sebelum Perang Dunia hingga menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan politik, Jepang tidak bisa terlepas dari faktor peran militer dalam negara Jepang. Militer memiliki peran sentral dalam perkembangan Jepang dimulai sejak era Meiji. Era Meiji diawali dengan beberapa kejadian yang pada puncaknya terjadi pengembalian kekuasaan di Jepang kepada kaisar pada tahun 1868. Proses pengembalian kekuasaan kaisar Jepang tersebut dikenal sebagai Restorasi Meiji. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik Jepang. Restorasi Meiji ini berlangsung selama tahun 1866 hingga 1869, sejak tahun – tahun terakhir zaman Edo hingga ketika memasuki awal zaman Meiji. Pada era Meiji (1868 – 1912) juga memfokuskan pada peningkatan industrialisasi dan perekonomian Jepang yang bertujuan untuk dijadikan modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905. Pada era ini juga digaungkan konsep “ negara kaya, militer kuat “ (*fukoku kyouhei*).³⁶ Penerapan konsep ini dilaksanakan demi mewujudkan pembangunan industri yang massif dan juga untuk memodernisasi kekuatan militer Jepang. Pembangunan industri secara massif mampu menjadikan Jepang memiliki posisi kuat dalam perkenomian sedangkan dalam modernisasi militer membuat Jepang mampu mengubah kondisi sebaliknya, jika dimana perjanjian – perjanjian yang dilakukan Jepang dengan negara asing selalu dilakukan dengan tidak adil oleh negara – negara asing tersebut. Konsep *fukoku kyouhei* mengubah Jepang dalam kurun waktu 40 tahun dari Jepang yang awalnya

³⁶ Richard J. Samuels.1994. *Recalculating Autonomy: Japan,s Choices In The New World Order*. Seattle. The National Bureau of Asian Reasearch Vol.5, No 4

tradisional dan feodal menjadi negara yang mampu menjalankan semangat imperialisme.

Pada era Meiji, pemerintah Jepang membentuk tentara modern dan menghapuskan golongan samurai. Pada tahun 1873, pemerintah Jepang mengadakan wajib militer. Segala bentuk perlengkapan militer tersebut dibeli dari negara – negara barat. Kebijakan ini berlanjut pada dibentuknya undang – undang wajib militer yang menegaskan bahwa setiap laki – laki Jepang yang telah berusia 20 tahun dari segala golongan yang ada di Jepang wajib masuk militer. Rakyat Jepang pada saat itu diwajibkan menempuh pendidikan militer selama 3 tahun. Pada era Meiji, kementerian pertahanan Jepang tidak bertanggung jawab kepada parlemen Jepang namun kepada Kaisar.³⁷ Hal ini mengawali munculnya pemerintahan diktator militer Jepang (*gunbatsu*). Selain itu, pada era Meiji juga menanamkan ideologi *bushido* yang memberikan kesadaran terhadap prajurit – prajurit Jepang akan tingginya martabat dalam menjaga kehormatan bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan. Selain itu pemerintah Jepang juga melakukan modernisasi dalam bidang maritim dengan mendirikan departemen angkatan laut pada tahun 1872.³⁸ Selang 1 tahun kemudian Jepang juga membangun akademi angkatan laut dan rumah sakit angkatan laut.³⁹

Dengan kekuatan militer yang besar ditambah dengan semangat imperialism, pada tahun 1894 Jepang memutuskan untuk menyerang Cina yang berakhir dengan kemenangan Jepang. Perang tersebut diakhiri dengan perjanjian *Shimonoseki* pada tahun 1895 yang mengakibatkan Cina kehilangan Korea, pulau Formosa dan Port Arthur.⁴⁰ Korea menjadi negara merdeka sedangkan Jepang mendapatkan kepemilikan pulau Formosa dan pelabuhan Port Arthur yang terletak di semenanjung Liaotung. Kemenangan Jepang terhadap Cina menjadikan Jepang lebih bernafsu menyebarkan pengaruhnya di kawasan Timur.

³⁷ Aulia Fadhli. 2007. Menjadi Pemenang Seperti Bangsa Jepang. Yogyakarta : Pinus. Hal. 18-19

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Taiwan Document Project. 1895. Treaty of Shimonoseki diakses dari <http://www.taiwanbasic.com/treaties/Shimonoseki.htm> pada tanggal 18 Mei 2015

Ekspansi Jepang terhadap Cina menimbulkan kekhawatiran terhadap Rusia. Rusia berambisi menguasai daerah Manchuria dan semenanjung Korea, selain itu Rusia juga berusaha memaksa Jepang untuk mengembalikan semenanjung Liaotung kepada Cina. Namun Jepang tetap berpegang pada hasil perjanjian *Shimonoseki*. Oleh karena itu Rusia hanya mendapat sebagian kecil wilayah di semenanjung Liaotung dan kemudian membangun jalur kereta *Trans Siberia*. Hal itulah yang pada akhirnya ketika tahun 1904 hingga 1905 Jepang memutuskan untuk berperang dengan Rusia yang berakhir dengan Kemenangan Jepang.⁴¹ Kemenangan Jepang atas Rusia tidak terlepas dari kekuatan angkatan laut Jepang. Pada awalnya ketika Jepang menyerang kapal Rusia yang sedang berpatroli, serangan – serangan tersebut mampu mengejutkan pihak Rusia meskipun tidak mengakibatkan kerusakan fatal pada kapal – kapal Rusia. Setelah itu Jepang merumuskan rencana untuk strategi yang dapat melindungi kawan Port Arthur dari kapal – kapal Rusia. Jepang mengerahkan lima kapal perangnya untuk melaksanakan strategi tersebut. Strategi tersebut sukses menaklukkan armada kapal – kapal Rusia. Pada momen yang sama, armada kapal – kapal Jepang dibawah arahan Jenderal Togo kembali menyerang armada kapal – kapal Rusia di sekitar kawasan Laut Kuning. Pada pertempuran tersebut armada kapal – kapal Jepang kembali mampu menaklukkan armada kapal – kapal Rusia.

Pada tanggal 27 Mei 1904, armada kapal – kapal Rusia kembali bertempur dengan armada kapal – kapal Jepang.⁴² Angkatan laut Jepang dalam hal ini membawa skuadron yang lebih besar dari pertempuran – pertempuran dengan Rusia sebelumnya. Pertempuran tersebut kembali dimenangkan oleh Jepang yang pada akhirnya kedua negara merumuskan kesepakatan perdamaian di Amerika Serikat pada tahun 1905. Kesepakatan perdamaian tersebut dinamakan perjanjian *Port Mouth* yang memaksa Rusia mengakui kekuasaan Jepang di semenanjung Korea dan Jepang diberikan hak untuk menduduki kepulauan Kurilen dan Sachalin. Perang antara Jepang dan Rusia juga mengakibatkan bangkitnya

⁴¹ Geoffrey Jukes.2002.The Russo-Japanese War 1904-1905.Oxford.Osprey Publishing. Hal. 14-15

⁴² Ibid

semangat nasionalisme di benua Asia. Bangsa – bangsa di Asia mulai bangkit melawan kolonialisme negara – negara barat. Bangsa – bangsa di Asia tersebut seperti yang terjadi di Cina, Filipina, India dan Indonesia.

Pada era Showa (1926- 1989) , pihak militer Jepang semakin menguasai kontrol pemerintah Jepang.⁴³ Pihak militer dari angkatan laut dan darat juga mendominasi penempatan – penempatan prajurit – prajuritnya di beberapa kantor-kantor penting pemerintahan Jepang. Pada saat tersebut banyak terjadi pembunuhan – pembunuhan bermotif politik terhadap lawan – lawan politik kaum konservatif ultranasionalis Jepang. Hingga puncaknya ketika perdana menteri Jepang pada tahun 1930 Hamaguchi Osachi juga ditembak mati oleh kaum ultranasionalis.⁴⁴ Ketika pusat pemerintahan Jepang sedang dalam kondisi kacau, pada tahun 1931 pihak militer mengadakan forum Manshujihen yaitu mengambil kebijakan perang melawan Cina tanpa mempedulikan kondisi pemerintahan Jepang. Serangan Jepang kepada Cina pada tahun 1931 dikenal sebagai insiden Manchuria, disebabkan oleh terjadinya ledakan pada jalur rel kereta di daerah Manchuria yang pelakunya dituduhkan kepada tentara – tentara Cina oleh pihak militer Jepang.⁴⁵ Peristiwa tersebut yang mengawali aksi pihak militer Jepang menguasai Manchuria yang pada akhirnya pada tahun 1932 pihak Jepang memerdekakan Manchuria dari Cina.⁴⁶ Sementara itu, Cina mengadakan aksi Jepang dalam merebut Manchuria dari Cina ke Liga Bangsa Bangsa (LBB) sebagai bentuk agresi Jepang. Keluhan – keluhan Cina tersebut didengar oleh LBB dan pihak LBB memerintahkan Jepang agar keluar dari kawasan Manchuria. Pihak Jepang dalam hal tersebut justru mengambil kebijakan untuk keluar dari LBB pada tahun 1933.⁴⁷

⁴³ Japan Guide.2002. Militarism and WW2 (1912-1945) diakses dari <http://www.japan-guide.com/e/e2129.html> pada tanggal 11 Mei 2015

⁴⁴ History Channel.2014. Imperial Japan diakses dari <http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-ww2/imperial-japan> pada tanggal 11 Mei 2015

⁴⁵ History Channel.2014. Sino – Japanese War diakses dari <http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-ww2/sino-japanese-war> pada tanggal 11 Mei 2015

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

Pada Juli tahun 1937, pihak Jepang kembali menyerang Cina untuk ketiga kalinya. Hal ini dimulai ketika tentara Jepang menuduh tentara Cina melepaskan tembakan kepada tentara Jepang ketika tentara Jepang sedang berpatroli di Jembatan Marcopolo, dekat Beijing. Tuduhan ini menjadi alasan bagi pihak Jepang untuk kembali menyerang Cina. Jepang menyerang Cina hingga dapat merebut kota Nanking dan Shanghai. Pada saat itu serangan Jepang terhadap Cina merupakan yang terbesar yang mengakibatkan hampir 20 juta warga Cina meninggal dunia.⁴⁸ Serangan – serangan Jepang berakhir pada tahun 1940 ketika pihak Uni Soviet berusaha menekan kesepakatan terhadap Jepang untuk menghentikan serangan. Pihak Uni Soviet mengkhawatirkan serangan – serangan Jepang dapat mengancam perbatasan – perbatasan negaranya di bagian timur.

Pada tahun 1940, pihak Jepang membuat suatu semboyan yang menyerupai propaganda yaitu semboyan Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (*The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere*).⁴⁹ Semboyan tersebut mengajak benua Asia terutama Asia Timur, Asia Tenggara dan daerah Oseania untuk membangun sebuah blok negara – negara Asia dibawah pimpinan Jepang dan bebas dari hegemoni negara – negara Barat. Setelah Jepang menggaungkan semboyan tersebut, Jepang juga menekan kesepakatan lain dengan Jerman dan Italia pada tahun 1941. Kesepakatan tersebut jadi awalnya terbentuknya blok sentral selama Perang Dunia II. Ekspansi yang dilakukan oleh Jepang terhadap negara – negara Asia membuat kekhawatiran negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara barat berusaha membatasi pasokan bahan mentah ke Jepang. Jepang pada saat itu sangat bergantung pada pasokan bahan mentah seperti getah, minyak dan biji timah yang dapat diperoleh di kawasan Asia Tenggara yang pada saat itu dikuasai oleh negara-negara Barat. Hal tersebut ternyata membuat Jepang menjadi terdesak dan terpaksa menyerang tanah jajahan imperialis barat di Asia Tenggara.

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ William L. Swan. 1996. Japan ,s Intentions for Its Greater East Asia Co-Prosperity Sphere as Indicated In Its Policy Plans for Thailand. Singapore. Journal of Southeast Asian Studies vol.27. National University of Singapore

Untuk mencapai ambisi Jepang tersebut, pada akhir tahun 1941 Jepang mulai menyerang pangkalan armada laut Amerika Serikat “*Pearl Harbour*” di Kepulauan Hawaii dan di daerah Guam hingga pangkalan tersebut hancur. Jepang menyerang “*Pearl Harbour*” dengan menggunakan kekuatan angkatan udaranya. Dalam waktu 6 bulan Jepang mampu memperlebar kekuasaannya dari area Pasifik hingga perbatasan India. Serangan Jepang terhadap “*Pearl Harbour*” tersebut menjadi awal dari Perang Dunia II. Amerika Serikat dibawah Presiden Roosevelt melancarkan serangan balasan kepada Jepang sejak tahun 1942 hingga 1945. Selama tiga tahun tersebut Amerika Serikat mampu mencegah invasi Jepang ke daratan Australia dan sekitar kepulauan Pasifik. Selain itu Amerika Serikat juga mengalahkan Jepang di Guadalcanal pada tahun 1943, merebut kembali Guam pada tahun 1944 dan juga memenangkan pertempuran di Okinawa dan Iwo Jima pada tahun 1945. Hingga pada akhirnya tanggal 11 Juli 1945, para pemimpin negara – negara Sekutu berkumpul di Postdam untuk menyetujui sebuah kesepakatan yang dinamakan sebagai Deklarasi Postdam. Deklarasi Postdam diprakarsai oleh pemimpin – pemimpin negara Amerika Serikat, Inggris dan China⁵⁰.

Deklarasi Postdam bertujuan untuk memaksa Jepang agar menyerah kepada blok sekutu. Dalam Deklarasi Postdam, Jepang diberikan dua opsi yaitu memaksa Jepang mengakhiri perang atau blok Sekutu melakukan penghancuran total ke negara Jepang. Deklarasi Postdam menyatakan bahwa Jepang harus tunduk pada pemerintahan sekutu untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam deklarasi ini ketiga negara tersebut sepakat mengesahkan beberapa poin diantaranya menghapus paham militerisme, melucuti perlengkapan militer, menghukum penjahat-penjahat perang, dan mendukung nilai-nilai demokrasi.⁵¹ Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Kantaro Suzuki pada awalnya memilih untuk mengabaikan kesepakatan deklarasi Postdam.

⁵⁰ National Diet Library. 1945. “Postdam Declaration” diakses dari <http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html> pada tanggal 7 November 2014

⁵¹ Ibid

Permohonan untuk menyerah terhadap sekutu tersebut pada awalnya diabaikan oleh Perdana Menteri Kantaro Suzuki dikarenakan pihak Jepang masih mengkhawatirkan munculnya invasi dari Uni Soviet kepada Jepang jika pada akhirnya Jepang menerima hasil Deklarasi Postdam tersebut.⁵² Sikap Kantaro Suzuki dalam mengabaikan kesepakatan dalam Deklarasi Postdam disebut “*mokusatsu* “. ⁵³ Definisi *mokusatsu* dalam istilah Jepang merujuk pada sikap mendiamkan atau mengabaikan. ⁵⁴ Sedangkan salah satu kantor berita internasional mendefinisikan *mokusatsu* sebagai bentuk penolakan terhadap hasil deklarasi Postdam.⁵⁵ Amerika Serikat dibawah Presiden Harry Truman merespon sikap “*mokusatsu* “ tersebut dengan menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945.⁵⁶ Bom atom tersebut menewaskan 80.000 warga Nagasaki dan 140.000 warga Hiroshima. Pada tanggal yang sama pada 9 Agustus 1945, 1,5 juta tentara Uni Soviet menginvasi Jepang yang berakhir dengan lepasnya daerah Manchuria dan kawasan kepulauan Kuril dan Sakhalin ke tangan Uni Soviet.⁵⁷ Serangan bom atom oleh Amerika Serikat dan serangan Uni Soviet pada saat yang bersamaan kepada Jepang memperparah kehancuran Jepang pada Perang Dunia II. Hingga pada puncaknya tanggal 15 Agustus 1945 waktu Jepang, kaisar Hirohito secara resmi mengumumkan untuk menerima hasil deklarasi Postdam. Berlanjut ketika tanggal 2 September 1945 berlokasi di dek kapal laut Missouri, Jenderal Shigemitsu dan Jenderal Umezu di hadapan Jenderal Douglas Mac Arthur menandatangani dokumen resmi bahwa Jepang telah menyerah dari Sekutu.⁵⁸

⁵² Kazuo Kawai.1950. Mokusatsu, Japan’s Response to the Postdam Declaration. Los Angeles.Pacific Historical Review, Vol. 19, No. 4.University of California Press

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ History Channel.2015.Bombing on Hiroshima and Nagasaki diakses dari <http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki> pada tanggal 13 Mei 2015

⁵⁷ Slobodan Lekic.2005. A Soviet Push Helped Force Japan to Surrender diakses dari <http://www.themoscowtimes.com/news/article/a-soviet-push-helped-force-japan-to-surrender/210764.html> pada tanggal 13 Mei 2015

⁵⁸ History Channel.2015. Japan Surrenders diakses dari <http://www.history.com/this-day-in-history/japan-surrenders> pada tanggal 13 Mei 2015

2.2. Sejarah Umum Militer dan Kebijakan Pertahanan Jepang setelah Perang Dunia II

2.2.1. Kesepakatan Deklarasi Postdam (*Postdam Declaration*)

Keputusan Jepang untuk menyepakati kesepakatan Deklarasi Postdam menimbulkan banyak perubahan bagi Jepang pasca Perang Dunia II. Beberapa diantaranya ialah perubahan konstitusi yang menyangkut kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Pasca Jepang menyepakati hasil Deklarasi Postdam, pemerintah Jepang mengumumkan susunan konstitusi baru yaitu konstitusi 1947 yang disusun pada tahun 1946. Poin – poin penting dalam konstitusi 1947 tersebut ialah merubah status Kaisar hanya sebagai simbol kesatuan warga, bukan pemegang kedaulatan tertinggi, mulai membatasi kekuatan militer dan meminimalisir keterlibatan dalam perang dan mengakui kedaulatan rakyat. Pasal 9 (*article 9*) dalam konstitusi 1947 menjadi pasal yang menegaskan konsep Pasifisme yang dianut Jepang pasca Perang Dunia II. *Article 9* tersebut sebagai berikut:

“Bercita-cita tulus menciptakan perdamaian Internasional yang dilandasi hukum dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang untuk menyelesaikan permasalahan Internasional. Untuk melengkapi paragraf sebelumnya, kekuatan militer di darat, laut dan udara serta aspek kekuatan militer potensial lainnya tidak akan di pertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.”⁵⁹

Dibawah *article 9* konstitusi 1947 tersebut secara tegas melarang Jepang untuk mengembangkan kekuatan militernya. Dibawah konstitusi tersebut Jepang tidak lagi berprinsip Imperialis dalam menjalankan politik luar negerinya. Untuk bidang pertahanan dan keamanan Jepang bergantung kepada kekuatan Amerika Serikat. Penempatan tentara – tentara Amerika Serikat di wilayah Jepang sebagai bentuk untuk mencegah serangan – serangan dari luar yang mengincar Jepang.

⁵⁹ Ministry of Defense. 1947. “Chapter II. The Reunited of War. Article 9 dalam The Constitution of Japan, 1946” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html pada tanggal 28 Oktober 2014

2.2.2. Kesepakatan Perjanjian Keamanan oleh Jepang dengan Amerika Serikat (*Security Treaty Between the United States and Japan*)

Perang dingin yang terjadi pasca Perang Dunia II oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat Jepang menyerahkan masalah keamanan dan pertahanan dilindungi oleh Amerika Serikat. Hal ini ditandai dengan peresmian perjanjian keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat pada tanggal 8 September 1951. Landasan dari perjanjian tersebut yaitu kepentingan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin untuk membendung pengaruh ideology Komunis yang dibawa oleh Uni Soviet dan Cina di Asia. Amerika Serikat melihat Jepang sebagai salah satu negara yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sekutu utama dalam benua Asia. Perjanjian ini baru berlaku efektif pada 28 April 1952 yang menjadikan Jepang menjadi bergantung kepada Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Kutipan dari pembukaan perjanjian kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1951:⁶⁰

Keinginan Jepang dalam mengatur bidang pertahanan diserahkan kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat harus menjaga angkatan bersenjata sendiri sekaligus mencegah serangan – serangan yang ditujukan kepada Jepang. Demi kepentingan perdamaian dan keamanan, Amerika Serikat bersedia untuk meletakkan angkatan bersenjata di sekitar Jepang.

Dalam perjanjian keamanan tersebut dinyatakan bahwa Amerika Serikat akan membantu perlindungan secara militer bagi Jepang yang sedang menjalani proses demiliterisasi selama pendudukan Sekutu. Penjaminan bidang keamanan oleh Amerika Serikat yang akhirnya membuat Jepang sejak tahun 1951

⁶⁰ Gleen D. Hook. 2001. *Japan, s International Relations: Politics Economics and Security*. London. Routledge Taylor & Francis Group. Hal. 32

menitikberatkan politik luar negeri dan kebijakan – kebijakan lainnya berorientasi pembangunan ekonomi, pendidikan serta budaya.

2.2.3. Kesepakatan Perjanjian Damai (*San Fransisco Peace Treaty*)

Pada waktu yang bersamaan dengan ditanda tangannya perjanjian keamanan oleh Jepang dan Amerika Serikat, juga dilangsungkan Perjanjian damai San Fransisco (*San Fransisco Peace Treaty*) yang diusung oleh Amerika Serikat dan Jepang untuk mengakhiri secara resmi kedudukan Jepang diatas negara – negara jajahannya dan juga turut memberi kompensasi ganti rugi atas kerusakan – kerusakan infrastruktur yang disebabkan militer Jepang kepada negara – negara jajahan tersebut.⁶¹

Berikut biaya kerugian yang harus dibayar oleh Jepang:

Tabel 2.1 Total Biaya Kerugian Perang Oleh Jepang Untuk Negara-Negara Yang Dijajah Selama Tahun 1941–1945

No.	Negara	Total Yen ¥	Total US \$	Tanggal Pembayaran
1.	Myanmar	72.000.000.000	200.000.000	5 November 1955
2.	Filipina	198.000.000.000	550.000.000	9 Mei 1956
3.	Indonesia	80.388.000.000	223.080.000	20 Januari 1958
4.	Vietnam	14.400.000.000	38.000.000	13 Mei 1959
	TOTAL	¥364.348.800.000	US\$1.012.080.000	

Sumber : Ajeng Karina.2012. *Peningkatan Kekuatan Militer Jepang Pasca NDPG 2005*.Jember. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Jember. Hal. 19

⁶¹ United Nations.1951. San Fransisco Peace Treaty diakses dari <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20136/volume-136-I-1832-English.pdf> pada tanggal 14 Mei 2015

Jepang menandatangani perjanjian San Fransisco dengan 49 negara dan menghasilkan 54 kesepakatan bilateral yang menekankan pembayaran kompensasi atas kerusakan akibat perang yang dilakukan militer Jepang. Mengacu pada pasal 14 dalam perjanjian San Fransisco, Jepang diharuskan untuk membayar kompensasi biaya kerugian perang terhadap negara – negara jajahannya, dan Jepang juga diharuskan untuk menjalin kerjasama dengan aliansi negara – negara sekutu. Beberapa negara – negara kawasan Asia Tenggara mendapat kompensasi biaya kerugian perang dengan biaya terbesar dari pihak Jepang. Seperti Myanmar, Indonesia dan Filipina yang mendapatkan total biaya kompensasi sebesar 350 juta Yen.

2.2.4. Pembentukan Pasukan Bela Diri Jepang (*Japan Self Defense Force*)

Ketika perang Korea terjadi pada tahun 1950, tentara – tentara Amerika Serikat yang berada di Jepang dikirimkan ke Korea untuk terlibat dalam peperangan tersebut. Karena pengiriman tentara tersebut mengakibatkan kekosongan tentara yang menjaga keamanan Jepang. Hal tersebut membuat Jenderal Douglas Mac Arthur memerintahkan Perdana Menteri Yoshida Sigeru untuk membentuk Kesatuan Polisi Cadangan Nasional (*Keisatsu Yobitai*). Kesatuan Polisi Cadangan Nasional tersebut secara resmi dibentuk pada tahun 1950 dengan beranggotakan 75.000 personil.⁶² Meskipun pembentukan *Keisatsu Yobitai* tersebut melanggar konstitusi 1947, Amerika Serikat tetap berharap kepada Jepang agar ikut bertanggung jawab atas keamanan nasionalnya.

Ketika tugas *Keisatsu Yobitai* selesai pada tahun 1952, Perdana Menteri Yoshida Sigeru merencanakan untuk membentuk pasukan keamanan nasional baru yang tugas dan fungsinya disesuaikan dengan situasi keamanan internasional saat itu. Akhirnya terbentuknya Pasukan Pertahanan Laut (*Kaijo Keibitai*) pada bulan April tahun 1952 kemudian dibentuknya Badan Keamanan Nasional (*Hoancho*) pada bulan Agustus tahun 1952 dilanjutkan dengan perubahan *Keiatsu Yobitai* menjadi Pasukan Keamanan Nasional (*Hoantai*) yang pada akhirnya

⁶² Jeff Kingston.2011.Contemporary Japan History,Politic and Social Change since 1980s.West Sussex.Wiley Blackwell. Hal. 129

menjadi Pasukan Bela Diri Jepang (*Japan Self Defense Force* atau *Jietai*) pada tahun 1954. Perubahan tersebut disuarakan oleh Perdana Menteri Yoshida Sigeru dan Ketua Partai Progresif Jepang Shigemitsu Mamoru. Kemudian pada bulan Maret tahun 1954 dibawah persetujuan perjanjian saling membantu pertahanan (*Sogo Boet Kujo Kyotei*) akhirnya kabinet Yoshida menyetujui Rancangan Undang – Undang Pembentukan Badan Pertahanan Nasional Jepang dan Pasukan Bela Diri Jepang. Rancangan Undang – Undang tersebut disetujui oleh parlemen Jepang pada tanggal 2 Juni 1954. Pada waktu yang sama juga dibentuk *Japan Self Defense Forces* yang terdiri dari Pasukan Bela Diri Darat (*Ground Self Defense Forces*), Pasukan Bela Diri Laut (*Marine Self Defense Force*) dan Pasukan Bela Diri Udara (*Air Self Defense Force*). Ketika dibentuknya *Japan Self Defense Force* disahkan atas 3 kemungkinan penggunaan kekuatan yaitu ketika terjadi agresi mendadak yang mengancam keamanan nasional Jepang, apabila ketika tidak ada cara lain untuk melakukan serangan balasan yang memadai dan menggunakan kekuatan minimum yang diperlukan untuk mengusir agresi tersebut.

Keamanan nasional Jepang menjadi fungsi utama keberadaan *Japan Self Defense Force*. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dalam konstitusi Jepang yaitu:

Misi Penting dari Pasukan Bela Diri Jepang ialah untuk membina perdamaian dan kemerdekaan Negara, dan untuk mempertahankan Jepang terhadap ancaman agresi langsung dan tidak langsung yang mengancam keamanan negara. Pasukan bela diri juga akan digunakan untuk membina ketertiban umum apabila dibutuhkan

2.2.5 Pembentukan Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional Jepang

Pada 20 Mei 1957, kabinet pemerintahan Perdana Menteri Yoshida Sigeru menyetujui kebijakan dasar pertahanan nasional Jepang yang diadopsi oleh Badan Pertahanan Jepang (*National Defense Council*). Kemunculan kebijakan tersebut menjadi awal bagi Jepang untuk kembali

melakukan kebijakan terkait pertahanannya, meskipun secara eksplisit tidak menunjukkan perubahan besar pada sektor pertahanan. Tujuan pertahanan nasional adalah untuk mencegah agresi langsung maupun tidak langsung dan untuk menolak segala jenis agresi untuk tujuan melindungi kemerdekaan dan perdamaian Jepang yang telah berdiri diatas ideologi demokrasi. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan – kebijakan yang dibuat harus mengandung unsur sebagai berikut:⁶³

1. Mendukung segala aktivitas PBB dan menyuarakan kerjasama demi perdamaian dunia.
2. Berusaha menstabilisasi kehidupan umat manusia, menyuarakan semangat patriotism mereka dan membangun dasar – dasar yang dibutuhkan untuk keamanan nasional.
3. Dalam batas yang dibutuhkan dalam pertahanan, membangun kapabilitas pertahanan yang efisien disesuaikan dengan kekuatan negara dan situasi yang terjadi.
4. Menghadapi segala bentuk ancaman agresi dari luar berdasarkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan PBB. Sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif untuk mencegah segala bentuk ancaman diwaktu yang akan datang.

2.2.6. Perjanjian Kerjasama dan Keamanan antar Jepang dan Amerika Serikat (*Treaty of Mutual Cooperation and Security between The United States and Japan*)

Dalam *Treaty of Mutual Cooperation and Security between The United States and Japan* yang diperbaharui pada tanggal 19 Januari tahun 1960, perjanjian ini mewajibkan Amerika Serikat untuk mempertahankan Jepang dan menjamin bahwa suatu ancaman bersenjata yang ditujukan terhadap Jepang akan

⁶³ Ministry of Foreign Affairs.1957. Basic Defense Policy diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/english.pdf pada tanggal 30 Mei 2015

dihadapi secara langsung, tidak hanya oleh *Japan Self Defense Force* sendiri tetapi juga oleh kekuatan militer Amerika Serikat.⁶⁴ Jepang memang sempat berjanji kepada Amerika Serikat bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Amerika Serikat apabila ada ancaman terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik. Janji Jepang tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam beberapa dekade setelah itu dengan ditawarkannya kerjasama pembagian tugas kepada Jepang. Sejak pertengahan 1960-an, Amerika Serikat menghadapi persaingan yang sulit dengan Uni Soviet dalam bidang militer. Amerika Serikat banyak menghabiskan anggarannya untuk memperkuat militer-militernya. Akibatnya, militer-militer Amerika Serikat tersebut mulai tidak sanggup untuk menyediakan jaminan keamanan kepada sekutu- sekutu terdekatnya, termasuk salah satunya Jepang. Di sisi lain, kondisi ekonomi Jepang meningkat dan terus mengalami surplus. Hal tersebut menyebabkan Amerika Serikat merasa sedikit frustrasi dengan keadaan Jepang yang bisa dengan bebas mengurus ekonominya sambil menikmati jaminan keamanan yang terus diperoleh dari Amerika Serikat.

2.2.7. Peraturan Larangan Ekspor Peralatan Militer (*Three Principles on Arms Export*)

Pada tahun 1947 hingga 1951, ketika Amerika Serikat masih melakukan demiliterisasi sebagai langkah pertama terhadap Jepang pasca Perang Dunia II. Jepang diperkenankan untuk menghidupkan kembali aktivitas industrinya namun tidak dapat memproduksi senjata. Komandan Tertinggi Sekutu (*Supreme Commander of Allied Powers*, *SCAP*) yang dikomandoi oleh Jenderal Douglas Mac Arthur mengambil alih arsenal, instalasi penerbangan dan laboratorium yang berhubungan dengan bidang pertahanan. Sehingga pada era tersebut riset dan pengembangan teknologi pada bidang pertahanan Jepang sama sekali tidak berfungsi. Dampak yang muncul ketika industri – industri berat yang sejak lama menyuplai Jepang dalam penyediaan mesin-mesin perang seperti Kawasaki, Nakajima, dan Fuji beralih ke industri otomotif demi kepentingan sipil seperti bus hingga tahun 1952 dimana Amerika kembali menyerahkan instalasi pertahanan dan

⁶⁴ Wolf Mendl.1995. *Japan,s Asia Policy Regional Security*.New York. Routledge. Hal. 23

memperbolehkan kembali Jepang untuk melanjutkan produksi alutsista. Hal ini merupakan awal bagi bangkitnya kembali industri pertahanan Jepang pasca Perang Dunia II. Namun pada tahun 1967 Jepang mengeluarkan kebijakan larangan ekspor persenjataan.⁶⁵ Meskipun larangan tersebut hanya diperuntukkan bagi negara komunis dan negara yang terlibat dalam konflik internasional, namun pada realisasinya tidak ada produk industri pertahanan Jepang yang keluar ke negara lain.

2.2.8 Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Guidelines, NDPG*) Jepang Tahun 1976

Pada tahun 1976, Badan Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency, JDA*) meresmikan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Outlines, NDPO*) untuk menyediakan definisi yang jelas dan tersurat tentang doktrin pertahanan serta arah hubungan dan aktivitas pertahanan Jepang.⁶⁶ Dokumen ini merupakan dokumen yang mengatur fungsi-fungsi fundamental sistem pemerintahan, sistem keamanan, serta sistem pertahanan Jepang. NDPO tersebut mempunyai tujuan yaitu demi lebih berperan aktif dalam dunia keamanan internasional serta dalam rangka menghadapi ancaman dari luar, terutama kawasan Asia Pasifik. Ketentuan pokok yang masih berlaku dalam NDPO ini adalah larangan untuk memiliki dan memproduksi senjata nuklir. Beberapa prinsip yang terdapat dalam NDPO antara lain:⁶⁷

1. Kebijakan yang berfokus pada pertahanan negara
2. Tidak membentuk kekuatan militer yang besar
3. Menerapkan peraturan-peraturan dalam hal pemakaian tenaga Nuklir (*Three non-Nuclear Principles*)⁶⁸

⁶⁵ Ministry of Foreign Affairs.1967. Japan Policies on The Control of Arms Export diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/> pada tanggal 31 Mei 2015

⁶⁶ Christopher W. Hughes.1999."Japan's Economic Powers and Security: Japan and North Korea". London: Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series. Hal. 174

⁶⁷ Ministry Of Defense.1976. "Japan's Defense Policy and The Japan-U.S. Security Arrangements" diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

⁶⁸ 1. Tidak akan membuat / memproduksi senjata nuklir,

4. Mempertahankan legitimasi pihak sipil atas militer
5. Menerapkan tiga prinsip transfer peralatan pertahanan (*Three Principles on Army Export*)⁶⁹
6. Menetapkan anggaran pertahanan sebesar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

NDPO tahun 1976 disusun dengan kondisi Perang Dingin dan kebutuhan akan pertahanan pada tahun 1970-an seperti ancaman peningkatan kehadiran tentara Uni Soviet di kawasan Asia Timur terhadap pertahanan Jepang. NDPO 1976 menggambarkan bahwa Jepang berasumsi Perang Dingin masih akan berlanjut dalam waktu yang lama oleh karena itu pedoman pertahanan yang diusung difokuskan pada penanggulangan dari dalam negeri.⁷⁰ Selain itu NDPO 1976 juga memberikan pondasi baru terhadap perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang yaitu konsep kekuatan pertahanan saat damai. NDPO 1976 memberikan jawaban bagi peningkatan kontrol sipil, peningkatan fungsi operasional pasukan bela diri, peningkatan kerjasama antara militer Jepang dan militer Amerika Serikat dalam misi-misi di kawasan internal Jepang.⁷¹

2. Tidak akan memiliki senjata nuklir, dan
3. Tidak akan mengizinkan senjata nuklir dibawa masuk ke wilayah Jepang untuk alasan apapun

⁶⁹1. Dilarang mengekspor peralatan militer terhadap negara Komunis
2. Dilarang mengekspor peralatan militer terhadap negara yang terkena sanksi larangan impor peralatan militer oleh dewan keamanan PBB
3. Dilarang mengekspor peralatan militer terhadap negara yang terlibat dalam konflik internasional

⁷⁰Ministry of Defense.2006.Chapter 2 The Basics of Japan,s Defense Policy.Diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/2-2-1.pdf pada tanggal 8 April 2015.

⁷¹Ibid

BAB 3
TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN
1996 -2014

3.1. Faktor Internal dan Kebijakan Pertahanan Jepang Tahun 1996-2014

Kehancuran Jepang dalam Perang Dunia II membuat Jepang harus memperbaiki kehancuran-kehancuran yang dialami melalui perbaikan-perbaikan diberbagai sektor, salah satunya di bidang ekonomi dan pertahanan. Dalam rangka memperbaiki bidang ekonomi, Jepang menyerahkan proses-proses perbaikan dibidang pertahanan kepada Amerika Serikat. Namun pada masa pasca Perang Dingin, Jepang kembali memfokuskan diri pada bidang pertahanan dan ekonomi demi untuk bertahan diri pada dinamika politik internasional. Kondisi tersebut memaksa Jepang untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan juga mempererat melalui aliansinya dengan Amerika Serikat. Dalam Bab III ini penulis akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan transformasi kebijakan pertahanan Jepang sejak era tahun 1996 hingga 2014. Yaitu dimulai dengan pembentukan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*National Defense Program Guidelines, NDPG*) tahun 1996, dilanjut pada revisi pada tahun 2005, 2011 dan terakhir pada tahun 2014. Selain itu bab ini juga akan membahas perubahan status Biro Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*) menjadi Kementerian Pertahanan Jepang dan juga peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang terjadi dua kali ketika tahun 2013 dan tahun 2014.

3.1.1 Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Guidelines, NDPG*) Jepang Tahun 1996

Perubahan sistem internasional pasca Perang Dingin dan semakin meningkatnya ancaman-ancaman yang muncul di kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk membahasnya kembali. NDPO 1976 tersebut dirasa tidak lagi relevan sebagai pedoman kebijakan pertahanan Jepang pada pasca Perang Dingin. NDPO 1976 tidak memberikan penjelasan secara fundamental mengenai hubungan bilateral dengan suatu negara dalam menghadapi kemungkinan terjadi ancaman di suatu kawasan. Oleh karena itu pemerintah Jepang melakukan peninjauan kembali terhadap NDPO 1976 tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah Jepang akhirnya menghasilkan kebijakan baru yang disebut dengan Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*National Defense Programs Guidelines, NDPG*) pada tahun 1995.⁷²

Sesuai dengan kesimpulan dari NDPG 1995 yang menekankan keamanan lingkungan yang stabil belum dapat tercipta jika elemen- elemen yang diperlukan belum terpenuhi.⁷³ NDPG 1995 juga didasari untuk menghadapi ancaman- ancaman agresi skala kecil terhadap keamanan internal Jepang. Walaupun konsep dasar tidak ada perubahan besar, namun NDPG 1995 telah memfokuskan terhadap perubahan- perubahan yang terjadi di lingkungan keamanan internasional, peningkatan fungsi pasukan bela diri Jepang (*Japan Self Defense Force*) dan membuat sejumlah peninjauan ulang terhadap tingkat kapabilitas kekuatan pertahanan Jepang.

3.1.2. Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Guidelines, NDPG*) Jepang Tahun 2005

Pada tahun 2004, pemerintah Jepang kembali merevisi NDPG tersebut. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasukan bela diri Jepang (*Japan Self Defense Force, JSDF*), menghadapi ancaman Terrorisme, senjata pemusnah massal,⁷⁴ ancaman rudal balistik dan mempererat kerjasama aliansi Jepang-Amerika Serikat. NDPG tersebut dibentuk ketika tahun 2004 dan dijalankan pada tahun 2005. NDPG tersebut ditetapkan sebagai pedoman baru Jepang dalam membangun kekuatan pertahanan. Dalam hal ini, kekuatan yang dimaksud ialah upaya stabilisasi lingkungan keamanan nasional dan kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan keamanan global. Dalam NDPG tersebut terdapat beberapa konsep baru dalam sistem pertahanan dan keamanan Jepang yaitu :⁷⁵

1. Ide-ide dasar

Dalam NDPG tersebut, disebutkan bahwa Jepang harus membangun kekuatan pertahanan dan keamanan Jepang secara langsung yang sesuai dengan ancaman keamanan nasional yang Jepang terima. NDPG telah dibuat pada masa Perang

⁷²Ibid

⁷³National Institute for Defense Studies. 2011. East Asian Strategic Review 2011: Chapter 8. Diakses dari http://www.nids.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2011/east-asian_e2011_08.pdf pada tanggal 9 April 2015.

⁷⁴Ibid

⁷⁵Ministry of Defense.2004. "National Defense Program Guidelines, FY 2005,-" diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

Dingin ditandai dengan adanya perubahan struktur politik internasional dan status pasukan *Japan Self Defense Force* yang semestinya tidak dikirim untuk perang di luar kawasan Jepang. Pasca Perang Dingin, beberapa masalah keamanan di dunia cenderung keluar batas-batas secara geografis dan oleh karena itu bentuk-bentuk kerjasama internasional secara bilateral maupun multilateral menjadi sangat penting. Dalam lingkup militer, peran pasukan militer menjadi semakin bias, dan hal ini menjadi umum untuk memaksimalkan fungsi kekuatan militer dengan tujuan misi kemanusiaan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu tujuan dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dalam kedaulatan Jepang dilakukan dengan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan tiga peran kekuatan pertahanan yang didefinisikan dalam NDPG tahun 2005 tersebut.

2. Usaha-usaha Jepang sendiri

Kemampuan suatu negara dalam menjaga pertahanan nasionalnya wajib memiliki sebuah angkatan militer yang dipersiapkan dengan memiliki mobilitas, fleksibilitas, keberlanjutan dan fleksibilitas dan karakteristik ini harus ditopang dengan level teknologi militer dan kemampuan intelijen yang telah maju. Fondasi fundamental dalam dalam membangun kekuatan pertahanan juga melalui upaya-upaya peningkatan keterampilan pasukan militer dan perawatan secara efektif peralatan-peralatan militer. Telah tercantum dalam konsep pertahanan baru Jepang, bahwa tiga prioritas utama dalam pengoperasian pasukan pertahanan bela diri Jepang. Pertama, yaitu ketika situasi di dalam lingkungan sekitar Jepang sedang terancam dan maka oleh itu pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan melakukan segala cara termasuk diplomasi dalam rangka mencegah konflik muncul. Kedua, pemerintah akan menanggapi munculnya berbagai masalah yang terjadi dan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lainnya. Ketiga, Jepang akan menyuarakan bentuk-bentuk kerjasama dengan negara lain di berbagai level demi menghadapi tantangan keamanan yang semakin beragam dan kompleks.

3. Memperkuat Aliansi Jepang-Amerika Serikat

Kerjasama yang terjalin antara Jepang dan Amerika Serikat terus diperjuangkan demi menciptakan perdamaian dan keamanan Jepang. Kerjasama yang dibangun oleh Jepang dan Amerika Serikat mampu memberikan rasa aman yang besar kepada negara-negara disekitar wilayah Jepang. Hubungan Jepang dan Amerika

Serikat tersebut adalah hubungan yang secara luas mencakup bidang politik, ekonomi dan masyarakat. Dalam hal ini akhirnya Jepang meningkatkan kerjasama yang lebih erat antara pasukan *Japan Self Defense Force* dengan pasukan militer Amerika Serikat dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan keamanan dan pasukan pertahanan Jepang.

4. Kerjasama dengan Komunitas Internasional

Kementerian Pertahanan Jepang menyuarakan pentingnya dalam memainkan peran dalam permasalahan global. Dalam fenomena ini, keamanan non-tradisional menjadi fokus utama pemerintah Jepang. Dalam hal ini, pemerintah Jepang akan meningkatkan kerjasama praktis dengan dibantu kemampuan *Japan Self Defense Forces* dan juga berupaya untuk membangun kerjasama regional dan mendukung peningkatan kapabilitas negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini, Jepang berencana melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Korea Selatan. Jepang juga mempromosikan upaya untuk rangka kerjasama keamanan multilateral dan regional seperti *ASEAN Regional Forum* di kawasan Asia Pasifik.

Perubahan yang terdapat dalam kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Jepang dalam NDPG yang direvisi tahun 2005 tersebut bukanlah menjadi pemicu untuk bangkitnya militerisme Jepang dan niatan Jepang untuk menjadi pemain yang dominan dalam hal keamanan internasional. Karena NDPG memberikan hal-hal baru terkait pentingnya dalam menjalin hubungan atau aliansi pertahanan, salah satu contohnya yaitu Jepang dengan Amerika Serikat. Dalam NDPG tersebut juga mencantumkan China sebagai masalah keamanan bagi Jepang.⁷⁶

Dalam NDPG tahun 2005, disampaikan bahwa untuk mengembangkan pertahanannya, Jepang telah menyiapkan langkah-langkah pengembangan kapabilitas pertahanannya berupa operasi gabungan dengan militer Amerika Serikat dan membangun infrastruktur pelatihan dan pendidikan serta untuk intelijen dan komunikasi.⁷⁷ Hal lain yang dilakukan Jepang yaitu menggabungkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam angkatan bersenjata Jepang. Jepang menggabungkan dua hal tersebut untuk menangkal kemungkinan serangan cyber guna meningkatkan efisiensi operasional dan organisasi. Dalam NDPG tahun 2005, Jepang memaparkan kondisi

⁷⁶Ibid

⁷⁷Ibid

yang ada dalam lingkup keamanan lingkungan di luar Jepang.⁷⁸ Pandangan Jepang bahwa untuk menghadapi kondisi ketergantungan yang meningkat yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan dunia, seperti proliferasi senjata pemusnah massal, ancaman rudal misi balistik dan ancaman terorisme internasional. Penggunaan kekuatan militer dalam memainkan peran pada lingkup masyarakat internasional menjadi lebih dari sekadar respon terhadap konflik bersenjata. Jepang memandang adanya indikasi dari negara-negara di sekitar untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan mereka. Selain itu Jepang juga melihat kekuatan militer digunakan sebagai alat yang juga digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Dikarenakan semakin tingginya ketergantungan antar negara-negara dalam mempromosikan dan memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral di kawasan Asia Pasifik, maka Jepang merasa perlu untuk mempertimbangkan kondisinya tersebut. Pertimbangan Jepang meliputi masalah-masalah seperti strategi pertahanan, letak garis pantai dan ancaman bencana alam juga menjadi faktor yang dipertimbangkan Jepang dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

3.1.3. Transformasi *Japan Defense Agency* Menjadi Kementerian Pertahanan

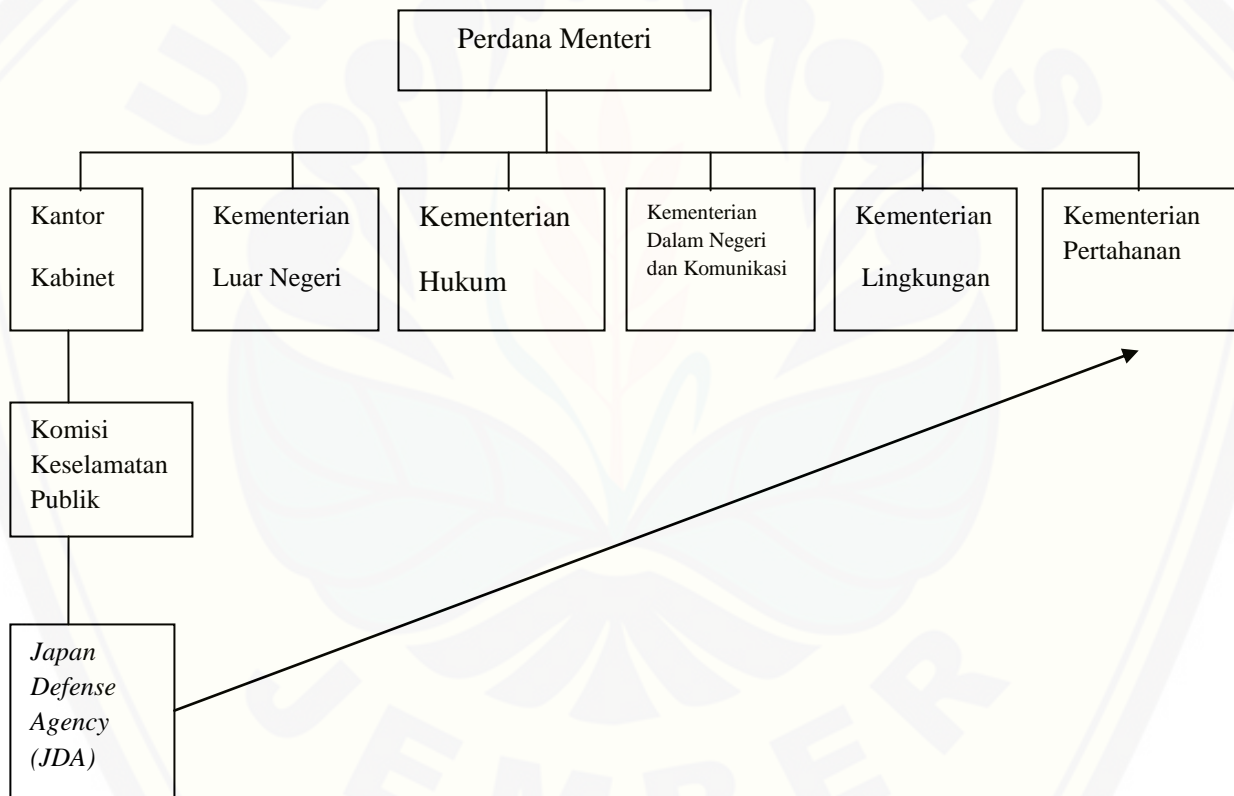
Pada tanggal 9 Januari 2007, 53 tahun setelah pendirian Biro Pertahanan Jepang (*Japan Defense Agency*), lahirlah Kementerian Pertahanan Jepang.⁷⁹ Kementerian tersebut merupakan transformasi dari *Japan Defense Agency* sebelumnya. Pemerintah Jepang berinisiatif untuk memperluas jangkauan kebijakan pertahanan untuk menjadi lebih independen dengan munculnya Kementerian Pertahanan tersebut. Dalam hal ini, Direktur *Japan Defense Agency* menjadi Menteri Pertahanan dan telah disiapkan untuk merespon lebih cepat dan akurat segala sesuatu masalah pertahanan dan keamanan nasional Jepang. Dengan adanya perubahan status *Japan Defense Agency* menjadi Kementerian Pertahanan tersebut akan memberikan wewenang secara penuh terhadap Kementerian Pertahanan Jepang untuk menentukan kebijakan dan anggaran terkait keamanan dan pertahanan Jepang. Kementerian Pertahanan kini juga dapat secara langsung mengajukan rencana undang-undang dalam pertemuan kabinet dan

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ministry of Defense.2007 “About Ministry” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/about/history.html> pada tanggal 11 Februari 2015

memberikan permohonan anggaran pertahanan kepada kementerian keuangan tanpa harus melalui kementerian- kementerian lainnya

Diagram 3.1. Perubahan Posisi *Japan Defense Agency* di dalam Struktur Pemerintahan Jepang



Sumber: Minister of Defense. 2007. Ministry Defense Of Japan diakses dari http://www.mod.go.jp/e/about/organization/chart_a.html pada tanggal 11 Februari 2015

Tanggung jawab utama pertahanan nasional Jepang akan berpindah dari Perdana Menteri kepada Menteri Pertahanan, namun untuk kontrol sipil terhadap *Self Defense Force*, Perdana Menteri masih memegang kontrol sebagai panglima tertinggi dalam tujuan untuk memobilisasi demi kepentingan pertahanan dan mengegakkan hukum dan

ketertiban. Perubahan bentuk ini merupakan usaha untuk lebih menekankan peran diplomasi Jepang dalam level bilateral maupun multilateral terutama dalam pertemuan tingkat menteri. Menteri Pertahanan tersebut dibantu oleh dua wakil menteri yang masing-masing bersifat Parlementer dan Administratif. Wakil menteri parlementer bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang memiliki kaitan dengan kementeriannya, sedangkan wakil menteri administratif bertugas mengendalikan kinerja biro-biro internal. Menteri pertahanan Jepang tersebut juga dibantu oleh Dewan Administrasi Fasilitas Pertahanan dan Biro-Biro Internal. Perubahan status menjadi kementerian pertahanan didesain untuk meningkatkan fungsi pembentukan dan perencanaan kebijakan pertahanan dan keamanan dan untuk meningkatkan respon terhadap situasi darurat untuk membangun sebuah sistem yang mempermudah usaha-usaha menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

3.1.4. Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Guidelines, NDPG*) Jepang Tahun 2011

Jepang telah mengeluarkan empat NDPG yang berisikan pedoman dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasionalnya, yaitu NDPG tahun 1976, 1995, 2004 dan yang kembali direvisi pada akhir tahun 2010.⁸⁰ Dalam NDPG tahun 2011 tersebut terdapat perubahan dan peningkatan penggunaan kekuatan yang terdapat dalam NDPG tersebut. Salah satunya ialah perubahan konsep dalam pertahanan Jepang. Pada masa sebelumnya melalui konsep dasar pertahanan (*Basic Defense Force Concept*) menitik beratkan pada pembangunan kekuatan pertahanan dan lebih pasif dalam menciptakan daya tangkal melalui *Japan Self Defense Force* dan pada NDPG tahun 2004, konsep dasar tersebut berubah menjadi *Dynamic Defense Force* yang memaksa *Japan Self Defense Force* melakukan tindakan yang lebih aktif yaitu dengan menjalankan serangkaian operasi militer secara rutin dengan kegiatan-kegiatan seperti operasi intelijen dalam kondisi normal sekalipun.⁸¹ Pergeseran persepsi dalam menerima ancaman-ancaman pada pertahanan dan keamanan nasional juga ikut memperluas misi *Self Defense Force*, dimana ancaman tidak lagi dipandang sebagai ancaman keamanan secara tradisional, namun juga mencantumkan ancaman-ancaman non-tradisional ke

⁸⁰Ministry of Defense.2010. "Content of the 2010 NDPG" diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

⁸¹Ibid

dalam NDPG tahun 2011 tersebut. Ancaman-ancaman non-tradisional tersebut semacam ancaman terroris, bencana alam, kemanusiaan dan lainnya.

Perubahan-perubahan penting yang dapat dilihat dalam NDPG tahun 2011 ialah perluasan wewenang dalam perumusan kebijakan pertahanan yang semakin dijelaskan secara rinci oleh pemerintah Jepang. Jika dalam NDPG tahun sebelumnya hanya menekankan pertahanan dalam negeri dalam menghadapi ancaman-ancaman invasi skala kecil. Dalam NDPG 2011 juga mencantumkan wilayah-wilayah daerah sekitar Jepang yang terancam batas teritorialnya meskipun tidak dijelaskan secara rinci pada NDPG tahun 2004. NDPG tahun 2011 juga menjelaskan secara eksplisit tentang tantangan keamanan Jepang di kawasan Asia Pasifik. Dalam NDPG tahun 2011 juga menekankan peran baru *Japan Self Defense Force* untuk mengembangkan kekuatan yang multi fungsi dan fleksibel, dan juga menekankan bahwa peningkatan kapabilitas militer Jepang tidak hanya secara kuantitas, namun juga secara kualitas kekuatan yang dimiliki.

Sejak NDPG 2011 dibentuk hingga saat ini, Pemerintahan Jepang telah berganti tiga kali, yaitu sejak masa pemerintahan Perdana Menteri Naoto Kan, kemudian masa pemerintahan Perdana Menteri Yoshihiko Noda dan yang terakhir masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Terkait tiga masa pemerintahan tersebut, era Perdana Menteri Shinzo Abe dapat dikatakan sebagai yang paling agresif dalam membuat kebijakan pertahanan. Hal ini memiliki kaitan dengan kondisi keamanan regional kawasan Asia Timur yang tidak stabil dengan ancaman dari Korea Utara dan China.

3.1.5. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*) Pada Tahun 2013

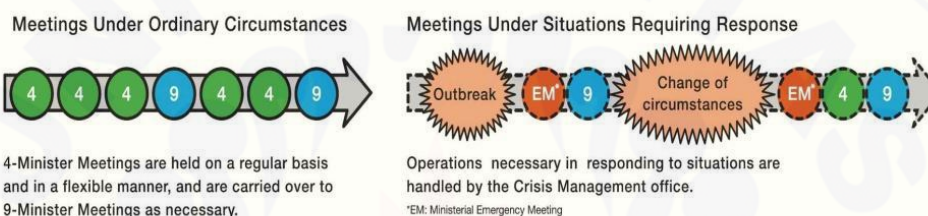
Peningkatan kapabilitas militer Jepang adalah upaya mencapai kemandirian dalam hal pertahanan dan hal ini pernah diutarakan oleh Peter J. Katzenstein yang mengutarakan bahwa setelah Jepang kemudian akan mengalihkan fokusnya ke pembangunan kapabilitas militer.⁸² Kemandirian dalam hal militer tersebut dapat membawa Jepang untuk bebas menentukan identitas dan kebijakan pertahanan dan keamanannya. Tujuan Jepang tersebut diinstitutionalkan dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional (*National Security Council*) yang berkewenangan membentuk landasan keamanan bagi Jepang.

⁸² Peter J. Katzenstein. 2001. *Regional States: Japan and Asia, Germany in Europe*. Bremen. Hal 29.

Diagram 3.2. Struktur *National Security Council*

Organization of the National Security Council
(Japanese NSC)

Four-Minister Meeting	Nine-Minister Meeting	Ministerial Emergency Meeting
<ul style="list-style-type: none"> - Prime Minister - Chief Cabinet Secretary - Foreign Minister - Defense Minister 	<p style="text-align: center;">When needed</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prime Minister - Deputy Prime Minister - Chief Cabinet Secretary - Foreign Minister - Defense Minister - 5 other relevant ministers 	<p style="text-align: center;">At times of emergency</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prime Minister - Chief Cabinet Secretary - Other Ministers to be designated



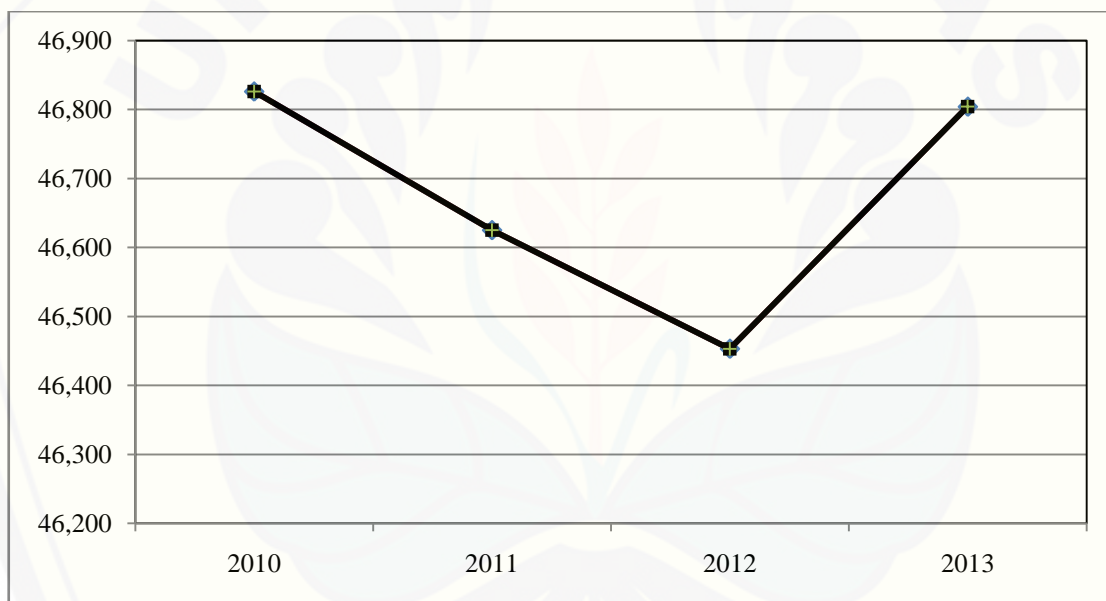
Sumber: The Government of Japan, “Japan’s Proactive Contribution to Peace”, *Japan Gov*, diakses dari: http://www.japan.go.jp/tomodachi/Features/contribution_peace.html, diakses pada tanggal 31 Agustus 2015

Cikal bakal pendirian NSC berdasarkan pertimbangan atas peningkatan tensi keamanan internasional yang harus dihadapi Jepang. Dalam operasionalnya, NSC melakukan sejumlah rapat rutin yang disebut dengan rapat empat menteri (*Four Minister Meeting*), yang terdiri dari Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Sekretaris Kabinet. *Four Minister Meeting* menjadi rapat inti yang digelar rutin guna merumuskan orientasi kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang baik jangka pendek atau jangka panjang. Begitu juga jika terjadi permasalahan serius yang menyangkut pertahanan dan keamanan nasional Jepang maka akan digelar rapat sembilan menteri (*Nine-Minister Meeting*) yang terdiri dari anggota *Four-Minister Meeting* ditambah dengan sejumlah kementerian terkait dalam pemerintahan Jepang. NSC juga membentuk Sekretariat Keamanan Nasional yang berisikan 67 anggota yang dibagi menjadi 6 bagian.

3.1.6. Peningkatan Anggaran Pertahanan Jepang Pada Tahun 2013

Ketika memasuki tahun kedua pada periode kedua pemerintahan Shinzo Abe, pemerintah Jepang mengumumkan peningkatan anggaran belanja di bidang pertahanan Jepang dari 46,5 Triliun Yen menjadi 46,8 Triliun Yen.⁸³ Kebijakan ini sesuai dengan janji Perdana Menteri Shinzo Abe ketika melakukan kampanye pemilihan perdana menteri pada masa sebelumnya. Perdana Menteri Shinzo Abe menjanjikan untuk memperkuat militer dalam mempertahankan kontrol Jepang pada kepulauan-kepulauan yang terletak di kawasan laut China selatan yang juga diklaim oleh China. Kenaikan anggaran belanja di bidang pertahanan ini adalah yang pertama sejak 11 tahun terakhir.

Grafik 3.1. Anggaran Pertahanan Jepang 2010-2013 (¥ 100)



Sumber: Ministry of Defense.2013. “Defense Programs and Budget Of Japan: Overview of FY2013 Budget” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

Dalam konsep anggaran pertahanan Jepang tahun 2013 telah difokuskan untuk beberapa hal yang menyangkut peningkatan kapabilitas kekuatan militer Jepang dan peningkatan hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Diantaranya sebagai berikut:

⁸³Ministry of Defense.2013. “Defense Programs and Budget Of Japan: Overview of FY2013 Budget” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

1. Peningkatan respon terhadap berbagai macam bentuk ancaman

Kebijakan-kebijakan dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman kepada keamanan negara. Oleh karena itu dalam konsep anggaran pertahanan Jepang tahun 2013 dicantumkan kebijakan penambahan personil *Japan Self Defense Force* sebanyak 287 personil dengan total pasukan 225.377 personil. Secara kualitas, personil-personil *Japan Self Defense Force* juga semakin dituntut untuk dapat menjadi pelindung warga-warga Jepang seperti ketika kawasan Jepang dilanda bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Dalam peningkatan kualitas personil, *Japan Self Defense Force* akan dibimbing dan dilatih oleh angkatan laut Amerika Serikat. Personil *Japan Self Defense Force* juga akan diedukasi tentang segala aktivitas dalam menjaga perdamaian dunia dan cara berpartisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Dalam meningkatkan kualitas beberapa perlengkapan alutsista, Pemerintah Jepang telah menganggarkan dana sebesar 27,8 Juta Yen untuk biaya perbaikan peralatan-peralatan alutsista, pengadaan bahan bakar dan peralatan komunikasi. Perbaikan peralatan-peralatan alutsista tersebut diutamakan pada peralatan-peralatan seperti Helikopter Patrol, Kapal Laut Destroyer dan Pesawat Airbone E767 dan E-2C.

2. Memperkuat hubungan aliansi Jepang dan Amerika Serikat

Hubungan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat telah berlangsung sejak era setelah perang dunia II. Bagi Jepang, hubungan aliansi dengan Amerika Serikat sangat membantu posisi Jepang dalam memainkan peran pada kawasan Asia Timur. Peran tersebut dalam menjaga keamanan kawasan yang sering bergejolak dikarenakan aktivitas percobaan nuklir Korea Utara dan ancaman serangan dari China. Berbagai bentuk kebijakan dalam memperkuat hubungan aliansi keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat telah disahkan dalam draft anggaran dana pertahanan Jepang tahun 2013.

3. Upaya stabilisasi lebih lanjut terhadap sektor keamanan internasional

Dalam tekanan untuk menstabilisasi keamanan internasional, termasuk didalamnya kawasan Asia Pasifik, bentuk-bentuk kerjasama humanitarian, dan berbagai sektor seperti dialog bilateral dan multilateral akan semakin diperjuangkan. Dalam hal ini, peran *Japan Self Defense Force* untuk aktivitas internasional perlu diperkuat untuk menekankan nilai independen dan proaktif dalam mencegah penggunaan senjata pemusnah massal, penggunaan rudal balistik, ancaman teroris dan operasi perdamaian.

4. Lain-lainnya

Dalam meningkatkan peran *Japan Self Defense Force* terhadap kebutuhan masyarakat Jepang sekitar, pemerintah Jepang akan terus menerapkan langkah-langkah untuk mencapai keselarasan antara fasilitas pertahanan Jepang dengan masyarakat Jepang di sekitarnya, serta langkah-langkah untuk memfasilitasi penempatan pasukan AS di Jepang. Dalam menciptakan keselarasan tersebut, pemerintah Jepang mendirikan pembangunan daerah residensial yang memiliki fungsi kedap suara agar dapat melindungi penghuni rumah dari suara- suara yang dihasilkan oleh aktivitas- aktivitas *Japan Self Defense Force*.

5. Rekonstruksi pembangunan fasilitas-fasilitas Militer pasca gempa besar Jepang

Perbaikan-perbaikan alutsista seperti pesawat tempur yang ikut terkena bencana tsunami. Perbaikan pesawat tempur yang berjumlah 7 unit dan beberapa perbaikan gedung- gedung penunjang aktivitas *Japan Self Defense Force* seperti barak tentara.

3.1.6.1. Perbandingan Anggaran Pertahanan Jepang tahun 2013 dengan Negara-Negara lainnya.

Meskipun Pemerintah Jepang masih membatasi anggaran sektor pertahanan sebesar 1% dari Produk Domestik Bruto (*gross domestic product, GDP*), hal tersebut tidak memberikan gambaran bahwa Jepang mempunyai anggaran di sektor pertahanan yang lebih kecil dibandingkan negara lain yang mempunyai jumlah persen anggaran pertahanan lebih besar dari GDP negara tersebut.

Tabel 3.1. 15 Negara dengan Anggaran Pertahanan Terbesar pada tahun 2013 (US\$)

Peringkat	Negara	Anggaran Pertahanan Tahun 2013 (US\$)	Persentase Anggaran berdasarkan GDP (%)
1	Amerika Serikat	640 US\$	3,8 %
2	China	188 US\$	2 %
3	Russia	87,8 US\$	3,5 %
4	Saudi Arabia	67 US\$	8,1 %
5	Perancis	61,2 US\$	2,6 %
6	Inggris	57,9 US\$	2,4 %
7	Jerman	48,8 US\$	1,4 %
8	Jepang	48,6 US\$	1 %
9	India	47,4 US\$	2,5 %

10	Korea Selatan	33,9 US\$	2,8 %
11	Italia	32,7 US\$	1,6 %
12	Brazil	31,5 US\$	1,4 %
13	Australia	24 US\$	1,6 %
14	Turki	19,1 US\$	2,3 %
15	UEA	19 US\$	4,7 %

Sumber: Giji Rajendran.2014. *Top 15 Defence Budgets 2013* diakses dari

<http://www.iiss.org/en/militarybalanceblog/blogsections/2014-3bea/february-f007/defence-spending-a132>

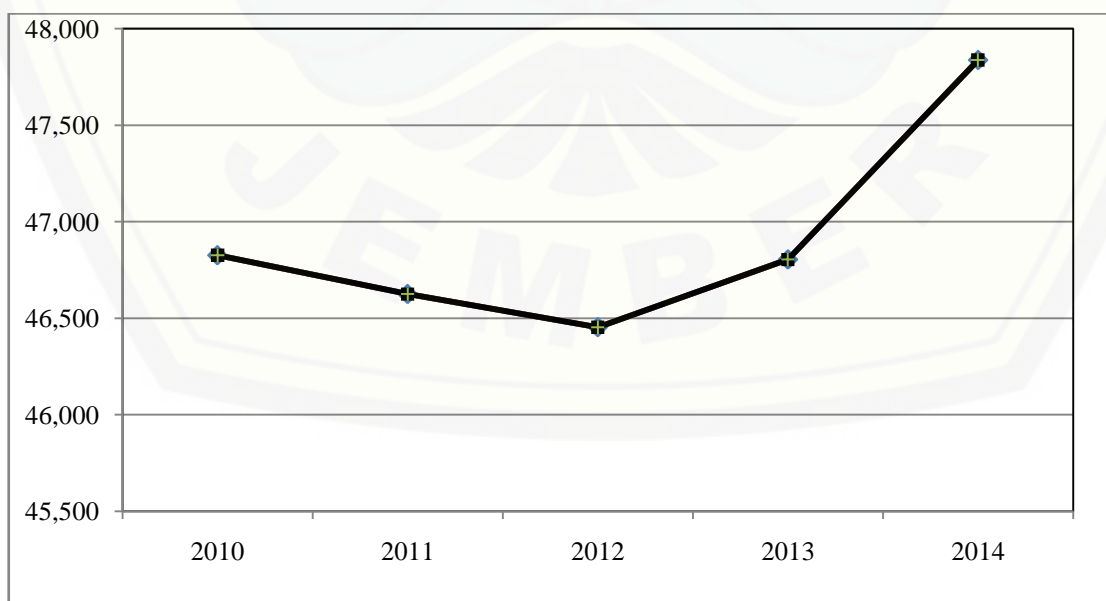
pada tanggal 11 Februari

Negara dengan kekuatan ekonomi seperti Jepang, meskipun hanya memberikan sebagian kecil dari kekuatan GDP nya untuk sektor pertahanan namun dapat memberikan perubahan yang besar dalam pengembangan alat-alat militer. Terlepas dari angka 1% dari GDP Jepang yang dialokasikan untuk sektor pertahanan tersebut, Jepang merupakan salah satu negara dengan anggaran militer terbesar di dunia.

3.1.7. Peningkatan Anggaran Pertahanan Jepang Pada Tahun 2014

Ketegangan di kawasan Laut China yang tidak semakin surut, justru semakin kompleks ketika pihak Vietnam dan Filipina juga bersitegang dengan China atas klaim teritorial membuat Jepang kembali memutuskan untuk melakukan suatu perubahan dalam kebijakan pertahanannya. Pemerintahan Jepang memutuskan untuk kembali menaikkan anggaran pertahanan Jepang tahun 2014 menjadi 47,8 Triliun Yen, setelah tahun sebelumnya menganggarkan 46,8 Triliun Yen.

Grafik 3.2. Anggaran Pertahanan Jepang 2010-2014 (¥100 million)



Sumber: Ministry of Defense.2014. “*Defense Programs and Budget Of Japan: Overview of FY2014 Budget*” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/260130.pdf pada tanggal 11 Februari 2015

Dalam konsep anggaran pertahanan Jepang tahun 2014 telah difokuskan untuk beberapa hal yang menyangkut peningkatan kapabilitas kekuatan militer Jepang dan peningkatan hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Diantaranya sebagai berikut:

1. Pencegahan yang efektif dalam merespon berbagai macam ancaman pada berbagai macam situasi

Bertujuan untuk membangun kapabilitas pertahanan yang mampu melindungi keamanan laut dan udara di sekeliling Jepang, dapat mencegah serangan rudal balistik, serangan dunia maya, ancaman bencana alam dan memperkuat intelijen. Dalam melindungi keamanan laut Jepang, telah direncanakan pengawasan dengan penyebaran personil *Japan Self Defense Force* di kawasan Yonagumi dan pembelian beberapa pesawat pengawas keamanan laut tiper *Airbone*, sedangkan untuk keamanan udara telah direncanakan pembelian 4 unit pesawat tempur tipe F-35A beserta pengembangan untuk fasilitas pelatihan penggunaan pesawat tempur tipe F-35A di kawasan Misawa dan modernisasi pesawat tempur tipe F-15 sebanyak 12 unit. Sedangkan dalam mencegah ancaman serangan rudal balistik telah direncanakan pembelian alat penembak rudal balistik tipe PAC-3 dan pengembangan kerjasama dengan Amerika Serikat terhadap pembuatan misil pencegah rudal balistik (*Advanced Ballistic Missile Defense Interceptor Missile*) tipe SM-3Block IIA.

2. Upaya stabilisasi keamanan wilayah Asia-Pasifik dan peningkatan keamanan lingkungan global

Dalam rangka untuk memastikan keamanan kawasan Asia-Pasifik, yaitu dengan memperkuat hubungan kerjasama bilateral dan multilateral, aktif dalam menghadapi tantangan keamanan global, dan proaktif dalam kegiatan perdamaian internasional. Proaktif yang dimaksud disini ialah aktif mempromosikan bantuan kerjasama pertahanan dan keamanan terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara, salah satunya dengan menginisiasi terbentuknya *ASEAN Defense Minister Meeting-Plus*. Selain itu juga berpartisipasi dalam latihan militer multilateral yang diadakan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka berperan aktif dalam meningkatkan keamanan global seperti ancaman bajak laut Somalia di sekitar perairan Timur Tengah.

3. Memperkuat hubungan aliansi Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 2014

Dalam rangka untuk mengurangi peran daerah Okinawa sebagai tempat pangkalan militer Amerika Serikat dan mengurangi beban masyarakat daerah tersebut, maka pemerintah Jepang berusaha melakukan langkah-langkah konkret terkait penempatan pangkalan militer Amerika Serikat. Langkah-langkah konkret yang dimaksud ialah seperti relokasi pangkalan militer Amerika Serikat dari Okinawa menuju Guam, relokasi letak *Marine Corps Air Station (MCAS) Futenma*, relokasi pesawat latihan militer Amerika Serikat dari pangkalan udara Kadena menuju Guam dan pelaksanaan program *Special Action Committee on Okinawa (SACO)*.

4. Kebijakan-kebijakan perekrutan dan pendidikan personil *Japan Self Defense Force*

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia *Japan Self Defense Force* dalam pengabdianya menjaga pertahanan Jepang, maka pemerintah Jepang akan melakukan rencana komprehensif terkait rekrutmen, penempatan personil *Japan Self Defense Force* dan juga meningkatkan kuantitas dan kualitas personil cadangan *Japan Self Defense Force*. Dalam meningkatkan kuantitas jumlah pasukan cadangan *Japan Self Defense Force* menghabiskan dana sekitar 60 Juta Yen, sedangkan dalam peningkatan fungsi rekrutment personil *Japan Self Defense Force* menghabiskan biaya senilai 50 Juta Yen.

5. Kebijakan-kebijakan terkait pengawasan bawah laut

Mengkaji ulang beberapa metode dalam pengawasan bawah laut sekitar teritorial Jepang. Seperti konversi teknologi mesin, turbin dan suku cadang pada beberapa peralatan angkatan laut *Japan Self Defense Force* seperti pada kapal tempur tipe *Destroyer*, Helikopter tipe MCH-101, Pesawat pengangkut tipe C-130H dan Pesawat tipe P-3C. Selain itu juga dilakukan studi dan penelitian tentang pengenalan program konsep PBL (*Performance Based Logistic*) yang menekankan kontrak pembelian peralatan alusista.

6. Reformasi Kementerian Pertahanan Jepang

Reformasi terhadap Kementerian Pertahanan Jepang yang dimaksud ialah untuk menyelesaikan beberapa masalah kesalah pahaman antara Kementerian Pertahanan Jepang dengan *Japan Self Defense Force*. Reformasi kementerian pertahanan juga mencakup peningkatan fungsi secara operasional dan organisasional yang telah diimplementasikan untuk *Japan Self Defense Force* lebih proaktif dan efisien. Reformasi tersebut dimaksimalkan dengan beberapa kebijakan seperti pendirian pos cabang Kementerian Pertahanan Jepang di setiap daerah di Jepang, pendirian ruangan wartawan untuk menyalurkan informasi- informasi yang perlu dikeluarkan kepada publik.

3.1.8 Perubahan Larangan Ekspor Peralatan Militer Pada Tahun 2014

Usaha Pemerintah Jepang dalam memperkuat militernya berlanjut pada tahun 2014 setelah meningkatkan anggaran militernya yaitu dengan merubah larangan ekspor peralatan militer untuk pertama kali setelah 40 tahun.⁸⁴ Pada masa sebelumnya Jepang dilarang untuk mengekspor peralatan militer kecuali kepada Amerika Serikat. Kebijakan ini bertolak belakang dengan 3 prinsip dalam peraturan ekspor peralatan militer (*Three Principles on Arms Exports*) yang telah diatur oleh parlemen (*Diet*) Jepang pada tahun 1967 sebagai dari bagian doktrin kebijakan pertahanan dan luar negeri.⁸⁵ Dalam peraturan ekspor peralatan militer sebelumnya mengatur bahwa Jepang dilarang mengekspor peralatan militer kepada negara-negara berideologi Komunis, negara-negara yang terkena larangan impor peralatan militer oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dan negara-negara yang terlibat dalam konflik internasional.⁸⁶ Peraturan ini adalah dalam rangka meminimalisir Pemerintah Jepang untuk terlibat dalam konflik skala Internasional. Pada bulan Februari tahun 1976, Pemerintah Jepang mengajukan pedoman kebijakan dalam parlemen Jepang bahwa

⁸⁴Japan Times.2014."New Arms Export Principles, Guidelines are Adopted by Abe Cabinet" diakses dari http://www.japantimes.co.jp/news/2014/04/01/national/politics-diplomacy/new-arms-export-principles-guidelines-are-adopted-by-abe-cabinet/#.VN74J_mUch8 pada tanggal 14 Februari 2015

⁸⁵Ministry of Foreign Affairs.1967. "Japan Policies to Control Arms Export" diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/> pada tanggal 12 Februari 2015

⁸⁶Ibid

segala sesuatu yang menyangkut ekspor peralatan militer tersebut yang berada di luar jangkauan 3 prinsip tersebut harus sesuai prinsip Jepang sebagai negara pecinta damai.⁸⁷

Sedangkan Departemen Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang yang mengontrol ekspor peralatan militer Jepang berdasarkan kurs mata uang dan hukum perdagangan internasional. Dalam ekspor peralatan militer tersebut, peralatan-peralatan militer tersebut harus terdaftar dalam pengawas perdagangan ekspor karena peralatan-peralatan militer tersebut membutuhkan lisensi agar dapat diekspor ke seluruh destinasi. Ekspor peralatan militer tersebut diperketat demi menjaga pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai tambahan, perdagangan peralatan militer antara negara asing dengan pihak Jepang memerlukan izin dari *Mission, Enemy, Terrain and Troops (METT)* Amerika Serikat.⁸⁸ Sedangkan jenis peralatan militer yang termasuk dalam 3 prinsip peraturan ekspor peralatan militer adalah yang termasuk dalam pengawas perdagangan ekspor sebagai *item 1 of the annexed list* yaitu sebagai berikut:⁸⁹

1. Senjata Api dan senjata-senjata yang dapat mengeluarkan cahaya atau asap
2. Amunisi senjata api
3. Bahan peledak beserta peledaknya
4. Kendaraan Militer
5. Kapal Laut Militer
6. Pesawat Militer
7. Pelindung badan anti-peluru dan helm militer
8. Peralatan militer dalam medeteksi bahan-bahan yang mengandung bahan kimia, bahan berbakteri dan bahan-bahan yang mengandung radio aktif.
9. Segala peralatan militer yang difungsikan untuk menguji kekuatan ledakan bom dan menguji kemampuan senjata api

Namun pada bulan Mei 2014, Pemerintah Jepang merubah peraturan larangan ekspor peralatan militer tersebut.⁹⁰ Pemerintah Jepang mengganti peraturan ekspor peralatan militer (*Three Principles on Arms Export*) digantikan dengan peraturan

⁸⁷Ibid

⁸⁸Ibid

⁸⁹Ministry of Foreign Affairs.1967. "Arms and Arms Production-related Equipment Listed as Item 1 of The Annexed List 1 of the Export Trade Control Order" diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/annex1.html> pada tanggal 14 Februari 2015

⁹⁰Stephen Harner.2014. "Abe's New 'Three Principles on Arms Exports' Deserve Support" diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2014/02/24/abes-new-three-principles-on-arms-exports-deserve-support/> diakses pada 14 Februari 2015

transfer peralatan teknologi dan pertahanan (*Three Principles on Transfer of Defense Equipment and Technology*). Pada peraturan yang baru mengganti larangan mengekspor peralatan militer kepada negara-negara berideologi Komunis menjadi larangan mengekspor peralatan militer kepada negara-negara yang mendukung kelompok terorisme dan mengganti larangan terhadap negara yang terlibat dalam konflik internasional dengan larangan terhadap negara yang melanggar perjanjian atau kesepakatan Internasional.

Dalam peraturan yang baru tersebut ditetapkan tiga prinsip utama dalam transfer peralatan teknologi dan pertahanan hanya diperbolehkan pada :

1. Kerjasama transfer peralatan teknologi dan pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan kerjasama internasional. Hal ini ditujukan kepada pemerintahan – pemerintahan luar negeri dan PBB beserta badan-badannya.
2. Kerjasama transfer peralatan teknologi dan pertahanan yang memiliki kontribusi terhadap keamanan Jepang. Dalam hal ini kerjasama yang dimaksud menekankan kerjasama produksi dan pengembangan peralatan teknologi dan pertahanan tersebut bisa dalam bentuk penelitans dengan negara lain terutama Amerika Serikat.
3. Kerjasama transfer peralatan teknologi dan pertahanan yang memiliki efek besar pada perubahan pandangan terhadap keamanan Jepang.

Peraturan tersebut ini merupakan hasil adopsi dari Dewan Keamanan Nasional Jepang (*Japan National Security Council*) berkonsultasi dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (*Ministry of Economy, Trade and Industry, METI*) , Kementerian Pertahanan (*Ministry of Defense, MOD*), Kementerian Luar Negeri (*Ministry of Foreign Affairs, MOFA*) dan Sekertariat keamanan nasional (*National Security Secretariat, NSS*).

3.2. Faktor Eksternal Dalam Transformasi Kebijakan Pertahanan Jepang

Pada periode kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tahun 2011 secara resmi mengumumkan strategi *rebalancing* yang difokuskan terhadap kawasan Asia Pasifik. Strategi ini juga diperkenalkan dalam artikel yang ditulis menteri luar negeri Amerika Serikat saat itu Hillary Clinton di tabloid Foreign Policy yang berjudul *America's Pacific Century*.⁹¹ Di dalam tulisan tersebut Clinton menegaskan bahwa strategi ini berusaha menggeser fokus politik luar negeri Amerika Serikat dari kawasan timur tengah menuju Asia timur. Hal tersebut ditandai dengan penarikan tentara – tentara Amerika Serikat dari Irak serta penempatan tentara Amerika Serikat di Australia dan Singapura. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah memperkuat indikasi terdapat perubahan strategi dalam kebijakan militer Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik. Perubahan fokus tersebut dilakukan dengan pendekatan kerjasama kepada negara aliansinya melalui kunjungan kenegaraan ataupun dialog bilateral dalam berbagai bidang terutama pertahanan dan keamanan.

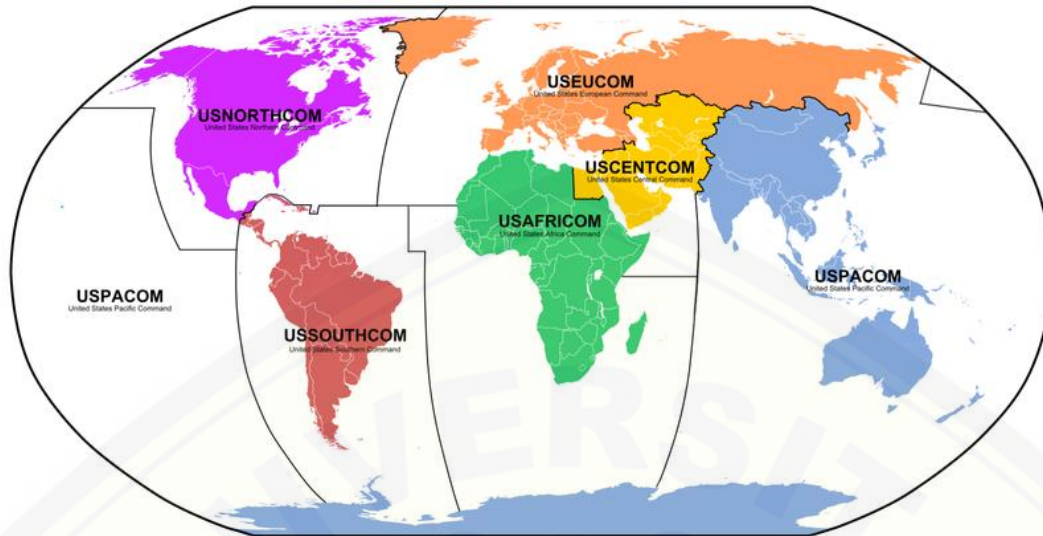
“Kita melihat masa depan kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan juga menjadi prioritas tertinggi dalam membuka kesempatan kerjasama ekonomi bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Kawasan Asia Pasifik yang negara-negaranya mempunyai total kekuatan nuklir terbesar akan menentukan nasibnya sebagai kawasan yang penuh konflik atau kawasan yang penuh akan kerjasama antar negara di waktu yang akan datang.”⁹²

Pidato oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2011 tersebut memperlihatkan pandangan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik sebagai pusat dari aktivitas politik dan ekonomi dunia di abad ke 21. Usaha yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negeri Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Pasifik. Strategi ini difokuskan pada sejumlah bidang, seperti kerjasama ekonomi, penguatan aliansi.

⁹¹ Hillary Clinton. 2011. “America’s Pacific Century” diakses dari <http://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/> pada tanggal 14 September 2015

⁹² Sekretariat Gedung Putih Amerika Serikat. 2011. Remarks By President Obama to the Australian Parliament diakses dari <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament> diakses pada tanggal 17 September 2015.

Gambar 3.1. Definisi Kawasan Asia Pasifik menurut *United States Pacific Command* (USPACOM)



Sumber: Wikipedia. 2008. PACOM area of responsibility diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Pacific_Command#/media/File:Unified_Combatant_Commands_map.png

Pada tahun 2013, sebuah pidato oleh Tom Donilon yang menjabat sebagai penasehat keamanan nasional Amerika Serikat menjelaskan 5 area spesifik tujuan dari strategi *rebalancing* tersebut yaitu :⁹³

1. Memperkuat hubungan dengan negara – negara aliansi
2. Kerjasama yang lebih dalam dengan negara-negara berkembang
3. Membangun hubungan kerjasama yang stabil, produktif dan konstruktif dengan Cina
4. Memperkuat institusi regional
5. Turut serta membangun arsitektur ekonomi regional kawasan Asia Pasifik

Dalam tujuan memperkuat hubungan dengan negara-negara aliansi, hubungan dengan Jepang adalah yang paling diperkuat oleh Amerika Serikat. Sejak 2013 terdapat beberapa kesepakatan kerjasama militer yaitu pembelian radar X-band dari Amerika Serikat kepada Jepang yang rencananya akan ditempatkan di sekitar garis pantai Kyoto

⁹³ Tom Donilon.2013. “The United States and the Asia-Pacific in 2013” diakses dari <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/03/11/remarks-tom-donilon-national-security-advisor-president-united-states-an> pada tanggal 14 September 2015

untuk melacak misil-misil yang diluncurkan oleh Korea Utara.⁹⁴ Selain itu juga terdapat kesepakatan oleh Jepang dengan Amerika Serikat terkait pembelian pesawat tempur F-35 sebanyak 42 unit dengan 4 unit pertama akan diterima oleh Jepang pada bulan maret tahun 2017.⁹⁵

Pada 3 Oktober 2013, Amerika Serikat dan Jepang meluncurkan *Joint Statement of The Security Consultative Committee: Toward a More Robust Alliance and greater Shared Responsibilities* yang pada intinya pihak Amerika Serikat memberi Jepang peluang untuk lebih mandiri dalam kebijakan pertahanan dan lebih proaktif dalam menjaga keamanan kawasan Asia Timur.⁹⁶ Dalam arti lain Amerika Serikat memberi jalan bagi Jepang untuk mengamandemen dasar-dasar konstitusi termasuk salah satunya pasal 9 dalam konstitusi Jepang. Hal ini merupakan kelanjutan dari salah satu argumen pada publikasi CSIS yang ditulis oleh Richard Armitage dan Joseph Nye Jr. tahun 2012 yang menyinggung salah satu konstitusi Jepang yaitu pasal 9 sebagai kendala anakronistik dalam hubungan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat.⁹⁷ Pasal 9 tersebut yang berisi larangan Jepang dalam terlibat perang sangat menghalangi perkembangan aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat dan juga menambahkan bahwa kebijakan Shinzo Abe dalam menyikapi konstitusi tersebut sangat dibutuhkan. Dalam dokumen tersebut juga membahas kerjasama yang semakin erat antara Jepang dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan maritim, keamanan dunia maya, proliferasi senjata pemusnah massal, penanganan bencana alam dan penanganan ancaman nuklir dan misil Korea Utara.

⁹⁴ The Asahi Simbun. 2013. "Japan to Bolster Missile Defense with U.S. X-band radar system" diakses dari http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201302250114 pada tanggal 14 September 2015

⁹⁵ Kiyoshi Takenaka .2013. "Japan Military Chief says F-35 is Best Fighters" diakses dari <http://www.reuters.com/article/2013/03/27/us-japan-defence-idUSBRE92Q0SF20130327> pada tanggal 14 September 2015

⁹⁶ Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. 2013. Joint Statement of the Security Consultative Committee: Toward a More Robust Alliance and Greater Shared Responsibilities diakses dari <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/10/215070.htm> pada tanggal 15 September 2015

⁹⁷ Richard L. Armitage, Joseph S. Nye.2012. The US-Japan Alliance. Anchoring Stability in Asia diakses dari http://csis.org/files/publication/120810_Armitage_USJapanAlliance_Web.pdf pada tanggal 21 September 2015

BAB 4

KONSEP PROACTIVE CONTRIBUTION TO PEACE DALAM KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TAHUN 2014

4.1. Publikasi *National Security Strategy* oleh *National Security Council*

Pada 17 Desember 2013, *National Security Council* untuk pertama kali mengeluarkan *National Security Strategy* (NSS) sebagai strategi keamanan nasional yang menjadi payung dari NDPG dan buku putih Kementerian Pertahanan Jepang. Sebelumnya, kebijakan keamanan Jepang berpedoman pada NDPG. Berdasarkan landasan NDPG tersebut, kemudian difokuskan oleh kementerian pertahanan Jepang menjadi buku putih kementerian pertahanan Jepang. Buku putih yang disusun kementerian pertahanan Jepang berisikan program-program yang bertujuan untuk memformulasikan landasan NDPG, serta rencana anggaran pertahanan pertahunnya untuk melancarkan program NDPG tersebut. Namun kini terdapat perubahan pada proses formulasi tersebut. Perumusan NDPG mengacu kepada pedoman strategi keamanan yang lebih luas yaitu *National Security Strategy* (NSS) yang dirumuskan oleh *National Security Council* (NSC). NSS merepresentasikan kebijakan dasar keamanan Jepang baik itu untuk jangka pendek atau jangka panjang selama kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional Jepang. NSS pertama yang dicanangkan oleh NSC mencantumkan konsep *Proactive Contribution to Peace*, yang pada akhirnya konsep tersebut juga menjadi pedoman bagi kementerian pertahanan Jepang dalam menyusun NDPG 2014.⁹⁸

⁹⁸ National Security Council.2013. *National Security Strategy*. Tokyo, Diakses pada tanggal 31 Agustus 2015

4.2. Garis Besar Program Pertahanan Nasional (*Nation Defense Program Guidelines, NDPG*) Jepang Tahun 2014

Jepang telah mengeluarkan empat NDPG yang berisikan pedoman dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasionalnya, yaitu NDPG tahun 1976, 1995, 2005, 2011 dan yang terakhir dan terbaru ialah NDPG tahun 2014. Proses perumusan NDPG 2014 telah dimulai sejak awal tahun 2013 setelah Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan akan melakukan peninjauan ulang terhadap NDPG sebelumnya yaitu NDPG tahun 2011.⁹⁹ NDPG tahun 2014 mengedepankan konsep “ *Proactive Contribution to Peace* ” dalam merumuskan kebijakan- kebijakan pertahanan Jepang. Dalam NDPG tahun 2014 tersebut, Jepang berusaha meningkatkan kekuatan militer sebagai usaha *deterrence* kepada dunia global dan juga untuk meningkatkan partisipasi Jepang dalam berkontribusi terhadap perdamaian internasional. Hal ini merupakan kelanjutan dari NDPG 2011 yang mempunyai tujuan untuk mencegah segala macam ancaman yang ditujukan kepada keamanan nasional Jepang. NDPG 2014 dan konsep “ *Proactive Contribution to Peace* ” merupakan langkah besar dalam perubahan paradigma pertahanan Jepang selama ini. Jika mengingat sebelumnya bagaimana Jepang dalam menjaga sektor pertahanannya selalu dengan memanfaatkan kehadiran pasukan militer Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan dalam dan luar negeri Jepang.¹⁰⁰

NDPG 2014 merupakan serangkaian tujuan yang didasarkan sebagai bentuk adaptasi Jepang terhadap kondisi keamanan dalam dan luar negeri Jepang. Adaptasi ini menjadi penting untuk dilakukan ketika sebuah negara seperti Jepang ingin menjaga eksistensi Jepang di kawasan regional dan internasional. Selain dalam menjaga eksistensi, tujuan untuk menjaga kedaulatan juga menjadi tujuan utama Jepang. Karena dengan meningkatkan kapabilitas pertahanan akan menjamin terciptanya stabilitas iklim pertahanan dan keamanan regional maupun internasional.

⁹⁹Ministry of Defense.2013.Press Confrence by Minister of Defense, January 25th 2013” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html> pada tanggal 12 April 2015

¹⁰⁰Ministry of Defense.2014. “National Defense Program Guidelines, FY 2014,-“ diakses dari http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf pada tanggal 12 April 2015

4.3. *Proactive Contribution To Peace* sebagai Dasar Prinsip Jepang di Dunia Internasional

Ketika Jepang mulai menganut konsep Pasifisme pasca Perang Dunia II, terdapat beberapa batasan dalam tindakan-tindakan Jepang untuk ambil bagian dalam menciptakan perdamaian dunia. Batasan – batasan tersebut muncul dari dalam dan luar negeri Jepang. Batasan – batasan dari luar seperti yang telah terikat dalam perjanjian – perjanjian dengan Amerika Serikat pasca Perang Dunia II. Sedangkan batasan dari dalam negeri Jepang bisa definisikan didasarkan dari konsep Pasifisme Jepang pasca Perang Dunia II. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, konsep menjadi negara pecinta damai (*Heiwa Kokka*) adalah sebuah prinsip yang tidak lebih dari penolakan terhadap tindakan militerisme. Menjadi negara pecinta damai (*Heiwa Kokka*) dipahami oleh Jepang untuk tidak lagi menggunakan kekuatan militer dalam memenuhi ambisi dan memulai terjadinya perang. Mempertahankan kebijakan dalam menggunakan kekuatan secara minimum dalam penggunaan kekuatan militer untuk membela diri telah dianggap sebagai kontribusi terbaik Jepang demi perdamaian dunia pasca Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II, konsep Pasifisme tersebut membuat meminimalisir peran militer Jepang sebagai peran utama dalam membangun dan menjaga perdamaian, dan terkadang muncul keinginan untuk menggunakan militer demi tujuan suatu negara yang menginginkan perdamaian. Rakyat- rakyat Jepang yang telah merasakan kekalahan ketika Perang Dunia II menjadi tidak percaya dengan legitimasi terhadap kekuatan militer sebagai bagian dari negara, dan hal ini mendorong untuk menekan kebijakan pertahanan dan luar negeri Jepang untuk meminimalisir kemungkinan penggunaan metode secara militeristik. Untuk melakukan ini, Jepang berusaha menjaga jarak dari aspek politik dalam dinamika hubungan internasional dan membatasi aktivitasnya dalam sengketa- sengketa wilayah yang terdapat di daerah luar wilayahnya. Bagaimanapun pada kenyataannya, perdamaian tidak dapat terwujud tanpa adanya kekuatan militer. Kekuatan militer bisa menjadi alat pemusnah perdamaian, namun fungsi ganda kekuatan militer juga dapat menjadi sangat diperlukan untuk menjaga perdamaian. Hal ini dibutuhkan Jepang untuk memulai kontribusi yang proaktif untuk perdamaian dunia bersama dengan menerima konsep peran kekuatan militer untuk menciptakan perdamaian.

Kebijakan luar negeri Jepang banyak dipengaruhi oleh konsep Pasifisme dari Perdana Menteri Yoshida Shigeru pada tahun 1948 hingga 1954.¹⁰¹ Doktrin ini dikenal sebagai Doktrin Yoshida yang menekankan ketergantungan keamanan dengan Amerika Serikat dan mengedepankan gaya diplomatik non konfrontasional. Pada tahun 1977, Perdana Menteri Jepang Fukuda Takeo mempopulerkan Doktrin Fukuda dalam kebijakan- kebijakan luar negeri Jepang.¹⁰² Doktrin tersebut bertujuan untuk membangun kerjasama yang sangat erat antara Jepang dengan negara- negara Asia Tenggara. Doktrin Fukuda tersebut berisikan tiga prinsip yaitu Jepang tidak akan memberikan ancaman secara militeristik kepada negara- negara Asia Tenggara, Jepang akan mengedepankan hubungan dari hati ke hati terhadap negara- negara Asia Tenggara, dan Jepang akan mengembangkan segala bentuk kerjasama yang terjalin dengan negara- negara Asia Tenggara.¹⁰³

Selama era perang dingin, setelah terjadi beberapa gejolak pada dunia, pada akhirnya menghasilkan kemenangan bagi negara – negara barat dengan ideologi demokrasinya. Pasca perang dingin, dunia telah mengalami perubahan dalam konteks politik internasional yang awalnya berpola bipolar menjadi unipolar dan justru menjadi multipolar seperti sekarang. Dunia multipolar menciptakan dunia dalam kekacauan yang sulit terdeteksi dimana letak persaingan kekuatan – kekuatan terbesar antar negaranya. Invasi Amerika Serikat terhadap Afghanistan dan Irak dalam rangka program “*War on Terror*” menciptakan kekacauan besar di kawasan Timur Tengah. Hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda – tanda berakhirnya kekacauan tersebut dan yang terjadi justru kekacauan tersebut menjalar ke beberapa negara Timur Tengah lainnya seperti Mesir dan Suriah. Hal ini menegaskan Amerika Serikat gagal dalam mengimplementasikan posisi negaranya sebagai Polisi Dunia. Oleh karena itu sejak era Presiden Barrack Obama di Amerika Serikat lebih menunjukkan perubahan poros kebijakan luar negeri dan pertahanan yang awalnya selalu ditujukan untuk kawasan Timur Tengah berubah haluan untuk ditujukan terhadap kawasan Asia Timur. Dalam hal ini jelas yang ditujukan ialah untuk membendung pengaruh Cina yang semakin besar di kawasan Pasifik dan sementara itu Cina justru semakin meningkatkan kontrol atas pengawasan laut Cina selatan dan laut Cina timur.

¹⁰¹ David M Potter,.. 2008. “Evaluation of Japan,s Postwar Foreign Policy”. Nanzan University. Japan

¹⁰² Peng Er, Lam. 2013. Japan,s Relations with Southeast Asia: The Fukuda Doctrine and Beyond. London. Routledge. Hal XV

¹⁰³Ibid

Dengan tatanan politik internasional yang berubah menjadi semakin rumit seperti sudah dijelaskan sebelumnya, maka Jepang sebagai salah satu sekutu terkuat Amerika Serikat di kawasan Asia Timur diharapkan melakukan perubahan peran demi dapat beradaptasi dan berkontribusi pada tatanan politik internasional yang baru. Perubahan peran yang dimaksud ialah Jepang diharapkan menjadi lebih aktif dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas bagi kawasan dan dunia. Dengan kata lain, Jepang diharapkan melakukan perubahan prinsip terutama dalam konsep pasifisme. Perubahan yang diharapkan sejalan dengan peningkatan aktifitas Jepang dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia tidak lain ialah menerapkan konsep *proactive contribution to peace*.

4.4 Penafsiran Ulang Pasal 9 Sebagai Implikasi Penerapan Konsep *Proactive Contribution to Peace*

Pasal 9 (*article 9*) dalam konstitusi Jepang adalah suatu pasal yang didalamnya mengatur tentang pelarangan melakukan perang terhadap negara lain. Pasal 9 tersebut muncul setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, yakni pada tanggal 3 Mei 1947. Perumusan pasal 9 tersebut sangat erat dengan campur tangan Amerika Serikat. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II tersebut juga memaksa pemerintah Jepang mengganti Konstitusi Meiji yang sebelumnya sudah bertahan selama 58 tahun menjadi konstitusi Jepang atau konstitusi 1947. Konstitusi Meiji sendiri ialah konstitusi kekaisaran Jepang yang termasuk dalam bagian Restorasi Meiji yang juga mengatur sistem Monarki Konstitusional Jepang. Dalam Konstitusi Meiji menempatkan Kaisar Jepang sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan Konstitusi Jepang tahun 1947 adalah konstitusi yang menetapkan pemerintahan berdasarkan sistem Parlementer dan Kaisar Jepang hanya berfungsi sebagai simbol negara. Konstitusi ini dibentuk atas tekanan negara-negara sekutu pasca Perang Dunia II agar Jepang mengganti Konstitusi Meiji yang bentuk pemerintahannya berbentuk Monarki dengan bercirikan Otoriter Militeristik menjadi bergaya Parlementer dengan bercirikan Demokrasi Liberal.

Pasal 9 yang terdapat dalam konstitusi Jepang sebagai berikut:

“Bercita-cita tulus menciptakan perdamaian Internasional yang dilandasi hukum dan ketertiban. Rakyat Jepang selamanya tidak mengakui perang untuk menyelesaikan permasalahan Internasional. Untuk melengkapi paragraf sebelumnya, kekuatan militer di darat, laut dan udara serta aspek kekuatan militer potensial lainnya tidak akan di pertahankan. Hak negara untuk menyatakan perang tidak akan diakui.”¹⁰⁴

Karena perubahan pasal tersebut, Jepang menjadi pemain yang pasif dalam bidang militer. Sektor militer menjadi sepenuhnya dikendalikan Amerika Serikat. Saat ini kekuatan militer Jepang berpusat pada pasukan tentara bela diri Jepang (*Japan Self Defence Force, JSDF*) yang ditempatkan di pulau-pulau disekitar Jepang dan tidak diizinkan untuk beroperasi di luar negeri. Perubahan konstelasi politik dan keamanan pasca Perang Dingin di kawasan Pasifik menimbulkan situasi baru yang bisa mengancam keamanan Jepang dan bahkan juga mengancam Amerika Serikat juga. Ancaman-ancaman tersebut muncul pada negara-negara tetangga Jepang seperti, China dan Korea Utara.

Pada pasal 9 sebelumnya dalam konstitusi Jepang hanya mengatur hak untuk membela diri (*self defense*) dari ancaman atau serangan bersenjata terhadap negara Jepang. Sebelumnya pasal 9 tersebut mengandung prinsip sebagai berikut:

1. Hak untuk mempertahankan dan membela diri yang diizinkan untuk Jepang pada konstitusinya harus sesuai dengan kebutuhan

Sejak setelah Perang Dunia II, Jepang memutuskan untuk menjadi pasif dalam dunia perang, dan berfokus menjadi negara penjunjung perdamaian. Begitu juga pada rakyat Jepang yang telah memutuskan untuk turut menyuarakan perdamaian dunia dan juga dalam konstitusi yang berisi pernyataan penolakan perang.

2. Pandangan pemerintahan Jepang terhadap pasal 9 dalam konstitusi

Dalam konstitusi, Jepang hanya diizinkan untuk menggunakan kekuatan secara minimum untuk kebutuhan peningkatan kapabilitas pertahanan. Tidak diperbolehkan juga dalam kondisi apapun untuk mempunyai teknologi

¹⁰⁴ Japan Kantei 1947. “The Constitution of Japan” diakses dari http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html pada tanggal 4 Maret 2015

persenjataan yang cenderung ofensif dan dapat menimbulkan kerusakan besar.

3. Batasan-batasan geografis dalam melaksanakan hak membela diri

Penggunaan kekuatan militer secara minimum dalam rangka melaksanakan hak bela dirinya tidak selalu terbatas pada batas-batas geografis wilayah Jepang. Sulit untuk memberikan definisi secara umum karena sangat bergantung terhadap situasi yang terjadi. Meski demikian, pemerintahan tetap patuh pada konstitusi bahwa tidak akan mengizinkan untuk pengiriman pasukan di darat, laut maupun udara dalam tujuan menyerang negara lain.

4. Hak membela diri

Jepang mempunyai hak untuk membela diri. tetapi hak tersebut tidak dapat diartikan sebagai hak untuk menyatakan perang terhadap negara lain. Meskipun secara konstitusi hak setiap negara ketika berperang dibawah naungan hukum internasional, termasuk wewenang untuk menimbulkan kerusakan pada wilayah musuh. Namun disisi lain Jepang juga akan menggunakan kekuatan seminimal mungkin dalam rangka mempertahankan diri.

Namun pada tanggal 1 Juli 2014, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memutuskan untuk melakukan penafsiran ulang makna dari penggunaan kekuatan militer Jepang dalam pasal 9 konsitusi Jepang.¹⁰⁵ Dalam penafsiran ulang yang dilakukan pemerintah Jepang, Perdana Menteri Shinzo Abe menggantinya dan memunculkan prinsip-prinsip baru yaitu dalam memakai kekuatannya harus memenuhi 3 kondisi yaitu:¹⁰⁶

5. Ketika suatu kekuatan bersenjata mengancam Jepang atau mengancam negara lain yang memiliki kedekatan dengan Jepang dan juga mengancam keselamatan rakyat-rakyat Jepang.
6. Ketika tidak ada pilihan lagi untuk menghadapi ancaman teritorial dan demi menjamin keselamatan rakyatnya.
7. Menggunakan kekuatan militer secara minimum.

¹⁰⁵ Linda Sieg, Kiyoshi Takenaka. 2014. "Japan takes historic step from post-war pacifism, OKs fighting for allies" diakses dari <http://www.reuters.com/article/2014/07/01/us-japan-defense-idUSKBN0F52S120140701> pada tanggal 4 Maret 2015

¹⁰⁶Ibid

Studi – studi sebelumnya mengungkapkan ada beberapa alasan yang melatar belakangi pemerintahan Jepang era Perdana Menteri Shinzo Abe dalam merevisi *article 9* dalam konstitusi Jepang. Penulis memiliki asumsi tersendiri dalam menjelaskan tentang alasan-alasan yang melatar belakangi pemerintahan Jepang dalam merevisi *article 9* dalam konstitusi Jepang. Penulis menggunakan asumsi faktor konsep *proactive contribution to peace* yang telah diformulasikan dalam *National Security Strategy* dan NDPG tahun 2014 sebagai faktor utama yang melatar belakangi kebijakan revisi pasal 9 konstitusi Jepang. Dalam periode kedua pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe bertujuan untuk melanjutkan agenda kebijakan-kebijakan pertahanan yang belum selesai dilahirkan ketika periode pertama Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2006 hingga 2007. Agenda-agenda kebijakan pertahanan tersebut bertujuan untuk agar Jepang dan Amerika Serikat membangun kerjasama keamanan yang seimbang antara kedua belah pihak, mengurangi ketergantungan Jepang dengan Amerika Serikat di bidang keamanan, penggunaan militer Jepang untuk ambil bagian dalam penyelesaian konflik- konflik internasional dan mendukung perubahan konstitusional yang sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pengaruh militer Jepang di dunia Internasional. Agenda-agenda kebijakan pertahanan tersebut salah satunya ialah amandemen *article 9* dalam konstitusi Jepang pada tahun 2014.¹⁰⁷

Pada bulan Juli tahun 2014, Jepang merevisi *Article 9* dalam konstitusinya yang pada akhirnya memperbolehkan Jepang untuk membantu negara sekutunya jika mendapat serangan dari negara lain. Faktor utama yang menjadi bagian dalam perumusan kebijakan tersebut ialah konsep *Proactive contribution to peace* yang dipopulerkan sejak periode kedua pemerintahan Shinzo Abe.

Definisi *proactive contribution to peace* Jepang ialah:¹⁰⁸

Menjadi Proaktif untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia yang didasarkan pada prinsip kooperatif dalam hubungan internasional. Selain itu, hal ini juga membutuhkan sistem dan skema pertahanan yang komprehensif dalam rangka mencegah dan merespon berbagai macam ancaman, memperkuat aliansi Jepang dan Amerika Serikat, aktif dalam menyuarakan kerjasama keamanan dengan negara lain dan membangun kapabilitas pertahanan yang terintegrasi dan

¹⁰⁷ Stephanie A Weston,.. 2014. The Dilemma of Japan,s Proactive Pacifism in Asia.Fukuoka University Press.Japan. Hal 171

¹⁰⁸Ministry Of Defense. 2013. National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond. Japan.

efektif. Prinsip ini berdasarkan kebijakan pertahanan nasional yang berada dibawah konsitusi dan tidak akan menjadi kekuatan militer yang dapat memunculkan ancaman kepada negara lain.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, sektor diplomatik dan pertahanan nasional Jepang telah mengupayakan transformasi konsep dari pasif pasifisme pasca Perang Dunia II menjadi lebih proaktif.¹⁰⁹ Hal ini bukan berarti membuang jauh- jauh konsep Pasifisme pasca Perang Dunia II, namun upaya- upaya untuk mempertahankan konsep tersebut dan sementara untuk memperbaiki kekurangannya maka Jepang memutuskan untuk meningkatkan kekuatan nasional untuk menghadapi perubahan pada lingkungan internasional terutama sejak berakhirnya Perang Dingin. Memori- memori pasca Perang Dunia II dan penyesalan- penyesalan akan yang dirasakan akibat tindakan negara mereka dalam perang menimbulkan rasa tertekan pada rakyat Jepang. Oleh karena itu rakyat- rakyat Jepang berharap agar Jepang tidak lagi ambil bagian dalam invasi- invasi perang setelah Jepang terlahir kembali sebagai negara pecinta damai (*Heiwa Kokka*).¹¹⁰ Pasca Perang Dingin, terutama ketika periode pertama Perdana Menteri Shinzo Abe, kebijakan-kebijakan pertahanan dan luar negeri Jepang menjadi lebih proaktif dan asertif.¹¹¹ Usaha-usaha proaktif tersebut terlihat ketika Jepang berusaha menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan peningkatan fungsi militer secara operasional dan institusional dengan meluncurkan teknologi sistem anti rudal balistik dan perubahan status *Japan Defense Agency* menjadi Kementerian Pertahanan Jepang pada tahun 2007.¹¹² Status *Japan Defense Agency* pada sebelumnya tidak memiliki kekuatan yang penuh dalam pengambilan kebijakan jika dibandingkan dengan kementerian – kementerian yang lain.¹¹³ Perubahan tersebut otomatis membuat Kementerian Pertahanan Jepang mempunyai wewenang penuh dalam menentukan anggaran dan mengajukan rancangan undang- undang terkait bidang keamanan dan pertahanan. Kementerian Pertahanan Jepang juga memiliki wewenang yang lebih luas dibanding dengan *Japan Defense Agency* karena dapat menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang. Kebijakan tersebut adalah bagian dalam membawa Jepang dari negara menjungjung tinggi perdamaian (*peace state*) menjadi negara yang lebih

¹⁰⁹ Mataka Kamiya.2014. A Nation of Proactive Pacifism – National Strategy for 21st Century Japan. *Japan Foreign Policy Forum No. 18. Hal. 1*

¹¹⁰Ibid

¹¹¹ Henry Laurence.2007. Japan,s Proactive Foreign Policy and The Rise of The BRICS. *Asian Perspective, Vol 31, No. 4.*

¹¹²Ibid

¹¹³ Takao Sebata,2010. “Japan Defense Policy and Bureaucratic Politics”. Plymouth. University Press of America. Hal.50

berkontribusi dalam politik internasional (*international state*).¹¹⁴ Kebijakan luar negeri dan pertahanan Jepang didasarkan pada keyakinan bahwa bukti kontribusi kepada dunia internasional tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga dalam sektor keamanan.¹¹⁵

Konsep *proactive contribution to peace* kembali ditekankan ketika periode kedua pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Hal ini terlihat ketika pada tahun 2013, konsep tersebut dipaparkan dalam NDPG tahun 2014. Dalam salah satu pidatonya pada tahun 2014, Shinzo Abe menjelaskan bahwa segala sesuatu perubahan yang terdapat pada *article 9* bertujuan agar Jepang dapat lebih bekerja sama dengan negara lain agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap stabilitas internasional.¹¹⁶ Konsep *proactive contribution to peace* berdasarkan asumsi Kenichi Ito sebagai Presiden forum hubungan internasional Jepang terhadap konsep doktrin Yoshida yang dipopulerkan oleh mantan Perdana Menteri Jepang Shigeru Yoshida pada tahun 1946.¹¹⁷ Kenichi Ito berasumsi bahwa konsep pasifisme pasif dalam doktrin Yoshida telah mengurangi pengaruh kebijakan keamanan dan pertahanan Jepang untuk menghormati fungsi penggunaan kekuatan militer dan juga doktrin tersebut menghambat transformasi kebijakan – kebijakan Jepang pada dunia internasional.¹¹⁸ Kenichi Ito percaya bahwa sudah sepantasnya Jepang harus menjelaskan strategi politik luar negerinya yang dibutuhkan untuk mencapai kepentingan nasional.¹¹⁹

Filosofi *proactive contribution to peace* yang tercantum dalam NDPG 2014 juga bertujuan untuk melanjutkan kerjasama keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat yang sudah berlangsung hampir 60 tahun. Jepang sebagai sekutu terbesar Amerika Serikat di benua Asia tetap menjadi penyokong dana tersesar untuk penempatan pangkalan militer Amerika Serikat di benua Asia. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memperkuat peran aliansi Jepang dengan Amerika Serikat, namun juga bertujuan meningkatkan partisipasi Jepang dalam misi- misi PBB. Salah satunya ialah ketika Shinzo Abe mengungkapkan keinginannya untuk ambil bagian dalam operasi

¹¹⁴ Bhubhinder Singh,. 2008. Japan Security Policy:from a peace state to an international state. London. White Rose East Asia Centre University Of Sheffield.

¹¹⁵Ibid

¹¹⁶ Shinzo Abe. 2013. Remark by Prime Minister Shinzo Abe on the Occasion of Accepting Hudson Institute's 2013 Herman Kahn Award diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/25hudson_e.html pada tanggal 2 Mei 2015

¹¹⁷ Kenichi Ito.2014. The 37th Policy Recommendations Positive Pacifism and Japan,s Course of Action diakses dari <http://www.jfir.or.jp/e/pr/pdf/37.pdf> pada tanggal 2 Mei 2015

¹¹⁸Ibid

¹¹⁹Ibid

internasional pembersihan ranjau di Selat Hormuz.¹²⁰ Operasi Internasional tersebut dibawah naungan PBB. Tujuan- tujuan lainnya ialah untuk melindungi kapal laut militer Amerika Serikat di samudera Pasifik, mencegah ancaman rudal balistik yang ditujukan kepada Amerika Serikat, memperluas wewenang Jepang dalam penggunaan senjata yang telah sesuai dengan regulasi operasi perdamaian internasional, dan memberikan bantuan logistik terhadap pasukan perdamaian PBB. Setelah era Perang Dingin berakhir, Jepang telah meningkatkan partisipasinya dalam misi perdamaian dunia yang digagas oleh PBB. Jepang juga menjadi pemberi donor terbesar kedua untuk PBB dan juga menjadi pemberi bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance, ODA*) terbesar di dunia pada sejak tahun 1990 hingga tahun 2000 dan ditambah Jepang dengan memperluas fungsi *Japan Self Defense Force* dalam berbagai misi penjaga perdamaian di area non konflik.¹²¹ Jepang melanjutkan fungsinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan ikut mempromosikan program non proliferasi senjata nuklir.

Dalam hal penerapan konsep *proactive contribution to peace* dalam bentuk penafsiran ulang terhadap *article 9* dalam konstitusi Jepang, diharapkan mampu membawa Jepang untuk terlibat dalam kebijakan – kebijakan terkait keamanan internasional dalam rangka pembelaan diri secara kolektif (*Collective Self Defense*). Pembelaan diri secara kolektif tersebut dilakukan jika terdapat serangan langsung terhadap suatu negara yang mempunyai kedekatan erat dengan Jepang sehingga turut menimbulkan ancaman terhadap eksistensi Jepang dan hak rakyat – rakyatnya untuk hidup dalam kebebasan.¹²² Dalam penafsiran ulang tersebut, hak untuk pembelaan diri secara kolektif meliputi ancaman baik yang ditujukan terhadap Jepang maupun terhadap rakyat-rakyatnya.¹²³

Shinzo Abe menggambarkan penerapan konsep *Proactive contribution for peace* bahwa seperti yang akan dilakukan Jepang ketika akan menangkal serangan – serangan yang diarahkan terhadap kapal – kapal Amerika Serikat dalam mengevakuasi rakyat – rakyat Jepang jika ada ancaman yang mengancam teritorial Jepang atau usaha Jepang untuk menghadang misil dari Korea Utara jika ditujukan terhadap pangkalan militer

¹²⁰ Lionel Pierre Fatton. 2014. Japan's New Defense Posture. diakses dari <http://thediplomat.com/2014/07/japans-new-defense-posture/> pada tanggal 8 April 2015

¹²¹ Stephanie A. Wetson. op cit. Hal. 6

¹²² Ministry of Foreign Affairs. 2014. Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan's Survival and Protect its People diakses dari http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html pada tanggal 3 Mei 2015

¹²³ Ibid

Amerika Serikat di Guam merupakan contoh hipotesa bagaimana fungsi pasukan militer untuk dikerahkan.¹²⁴ Perdana Menteri Shinzo Abe juga mengesampingkan kemungkinan untuk membentuk operasi militer Jepang seperti ketika operasi militer Amerika Serikat di Irak pada tahun 2003.¹²⁵ Namun Shinzo Abe juga menegaskan bahwa keamanan di sekitar kawasan Asia Timur yang semakin susah diprediksi yang juga menjadi justifikasi untuk melakukan penafsiran ulang *article 9* tetap tidak akan merubah status Jepang sebagai negara pasifis.¹²⁶ Shinzo Abe juga berasumsi bahwa dengan berusaha menjunjung hak untuk pembelaan diri secara kolektif sejalan dengan Amerika yang berupaya meningkatkan pencegahan terhadap ancaman – ancaman di sekitar kawasan pasifik, sehingga dapat mengurangi kemungkinan Jepang untuk terlibat dalam perang.

¹²⁴Shinzo Abe.2014. Press Confrence by Prime Minister Shinzo Abe diakses

dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201406/0624kaiken.html pada tanggal 2 Mei 2015

¹²⁵ Yomiuri Shimbun.2014. “New Defense Era for Japan: Collective Right OK’d in Severe Security Environment” diakses dari <http://the-japan-news.com/news/article/0001394249> pada tanggal 2 Mei 2015

¹²⁶Shinzo Abe.2014. Press Confrence by Prime Minister Shinzo Abe diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201405/0515kaiken.html pada tanggal 2 Mei 2015

BAB 5 KESIMPULAN

Negara seperti Jepang yang pernah menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia kemudian mengalami kehancuran hebat pasca Perang Dunia II tentunya mempunyai motivasi untuk kembali diperhitungkan perannya dalam dunia politik internasional. Meskipun Jepang masih memiliki ketergantungan di bidang pertahanan dan keamanan dengan Amerika Serikat namun semakin lama tekanan bagi Jepang tersebut akan hilang seiring dengan adanya perubahan – perubahan kebijakan dan prinsip dalam negara Jepang tersebut. Selama kurun waktu 25 tahun pasca berakhirnya Perang Dingin, Jepang semakin serius dalam pembangunan dan perubahan kebijakan pertahanan demi semakin beradaptasi dan meningkatkan eksistensinya dalam lingkungan keamanan internasional. Di sisi lain berubahnya situasi lingkungan keamanan Jepang pasca Perang Dingin mendorong pemerintah Jepang untuk mengubah strategi dan doktrin pertahanannya yang sampai berakhirnya Perang Dingin memegang teguh konsep pasifisme secara pasif dan hanya bergantung terhadap kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat. Namun dengan kembali munculnya instabilitas keamanan di kawasan Asia Timur memaksa Jepang untuk merombak ulang strategi dan doktrin kebijakan- kebijakan pertahanannya. Konsep *Proactive contribution to peace* diterapkan sebagai konsep yang mendasari pengambilan kebijakan terkait pertahanan dan keamanan Jepang sebagaimana telah diformulasikan di dalam NSS dan NDPG 2014. Sebagai puncaknya dalam usaha Jepang mentransformasikan kebijakan – kebijakan dan strategi pertahanannya, pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan penafsiran ulang terhadap *article 9* dalam konstitusi Jepang. Penafsiran ulang pasal 9 juga merupakan bentuk implikasi dari NSS dan NDPG 2014 dalam menerapkan konsep *proactive contribution to peace* yang menginginkan Jepang lebih proaktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adamsky, Dima P.. 2010."The Culture of Military Innovation: The Impact of Cultural Factors on the Revolution in Military Affairs in Russia, the US, and Israel". California. Stanford University Press

Amstutz, Mark. R.. 1999."International Conflict and Cooperation: an introduction to world politics". McGraw Hill

Caedel, Martin.1980. Pacifism in Britain, 1914-1945: The Defining of a Faith.Oxford. Clarendon Press

David M Potter. 2008. "Evaluation of Japan,s Postwar Foreign Policy". Nanzan University. Japan

Fadhli, Aulia. 2007. Menjadi Pemenang Seperti Bangsa Jepang. Yogyakarta : Pinus

Gordon, Andrew.2003."In The Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present". New York. Oxford University Press

Gray, Colin S. 2002. "Strategy for Chaos: Revolutions in Military Affairs and the Evidence of History". London. Frank Cass Publisher

Hadi, Sutrisno.1984. Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM

Hook. Gleen D. 2001. Japan,s International Relations: Politics Economics and Security. London. Routledge Taylor & Francis Group

Hughes, Christoper W. 1999."Japan's Economic Powers and Security: Japan and North Korea". London: Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series

Hughes, Christoper W.1999."Japan's Economic Powers and Security: Japan and North Korea". London: Sheffield Centre for Japanese Studies/Routledge Series

Hundley, Richard O. 1999. "Past Revolutions, Future Transformations: What can the History of Revolution in Military Affairs Tell Us about Transforming US military?". Rand Publishing

Jukes, Geoffrey. 2002.The Russo-Japanese War 1904-1905.Oxford.Osprey Publishing.

- Kartini, Kartono. 1990. Metodologi Riset. Bandung: CV.Mandar Maju
- Kingston, Jeff. 2011. Contemporary Japan History, Politic and Social Change since 1980s. West Sussex. Wiley Blackwell.
- Klein, K.H. dan Kunkel, J.C. 1990. In the Interest of Peace: A Spectrum of Philosophic Views. New Hampshire. Longwood Academic
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. Politik Luar Negeri dan Pelaksanaan Dewasa ini
- Mas' oed, Mochtar. 1990. " Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi". Jakarta: LP3ES
- May, Larry. 2012. Selective, Refusal, Contingent Pacifism and International Legal Theory. Berkeley. University of California
- Mendl, Wolf. 1995. Japan, s Asia Policy Regional Security. New York. Routledge
- Nish, Ian. 2002. Japanese Foreign Policy In The Interwar Period. London. Praeger Publisher
- Peng Er, Lam. 2013. Japan, s Relations with Southeast Asia: The Fukuda Doctrine and Beyond. London. Routledge
- Rodee, Carlton Clymer. 1988. "Pengantar Ilmu Politik". Jakarta. Rajawali Press
- Schell, Jonathan. 2007. The Seventh Decade: The New Shape of Nuclear Danger. Macmillan
- Tow, William T. 2012. "Bilateral Perspectives on Regional Security Australia, Japan and the Asia-Pacific Region". London: Palgrave and Macmillan.
- Jurnal , Disertasi, Tesis, Skripsi dan Karya Ilmiah lainnya:**
- Bitzinger, Richard A.. 2008. "The Revolution in Military Affairs and the Global Defense Indrsutry". Security Challenges. Volume 4. Number 4
- Cai, Yuan. 2008. The Rise and Decline of Japanese Pacifism.. Adelaide. New Voice Vol.2

Ito, Kenichi. 2014. The 37th Policy Recommendations Positive Pacifism and Japan,s Course of Action diakses dari <http://www.jfir.or.jp/e/pr/pdf/37.pdf>

Kamiya, Mataka.2014. A Nation of Proactive Pacifism – National Strategy for 21st Century Japan. Japan Foreign Policy Forum No. 18

Karina, Ajeng. 2012. Peningkatan Kekuatan Militer Jepang Pasca NDPG 2005.Jember. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Jember.

Kawai, Kazuo.1950. Mokusatsu, Japan’s Response to the Postdam Declaration. Los Angeles.Pacific Historical Review, Vol. 19, No. 4.University of California Press

Laurence, Henry.2007. Japan,s Proactive Foreign Policy and The Rise of The BRICS. Asian Perspective, Vol 31, No. 4.

Samuels, Richard J..1994. Recalculating Autonomy: Japan,s Choices In The New World Order. Seattle. The National Bureau of Asian Research Vol.5, No 4

Sebata, Takao.2010. “Japan Defense Policy and Bureaucratic Politics”. Plymouth. University Press of America.

Singh, Bhubhindar. 2008. Japan Security Policy:from a peace state to an international state. London. White Rose East Asia Centre University Of Sheffield.

Swan, William L.1996. Japan ,s Intentions for Its Greater East Asia Co-Prosperity Sphere as Indicated In Its Policy Plans for Thailand. Singapore. Journal of Southeast Asian Studies vol.27. National University of Singapore

Weston, Stephanie A. 2014. The Dilemma of Japan,s Proactive Pacifism in Asia.Fukuoka University Press.Japan

Sumber Internet :

Abe, Shinzo. 2013. Remark by Prime Minister Shinzo Abe on the Occasion of Accepting Hudson Institute’s 2013 Herman Kahn Award diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201309/25hudson_e.html

Abe, Shinzo.2014. Press Confrence by Prime Minister Shinzo Abe diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201406/0624kaiken.html

Abe, Shinzo.2014. Press Confrence by Prime Minister Shinzo Abe diakses dari http://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201405/0515kaiken.html

Faiola, Anthony. 2006. “Japan Upgrades Its Defense Agency” diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/15/AR2006121501707.html>

Fatton, Lionel Pierre. 2014. Japan’s New Defense Posture. diakses dari <http://thediplomat.com/2014/07/japans-new-defense-posture/>

Harner, Stephen. 2014. “Abe's New 'Three Principles on Arms Exports' Deserve Support” diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2014/02/24/abes-new-three-principles-on-arms-exports-deserve-support/>

Harner, Stephen.2014. “Abe's New 'Three Principles on Arms Exports' Deserve Support” diakses dari <http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2014/02/24/abes-new-three-principles-on-arms-exports-deserve-support/>

Haryono, Willy.2014. “Jepang Cabut Larangan Ekspor Peralatan Militer” diakses dari <http://internasional.metrotvnews.com/read/2014/04/01/225509/jepang-cabut-larangan-ekspor-peralatan-militer>

History Channel.2014. Imperial Japan diakses dari <http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-ww2/imperial-japan>

History Channel.2014. Sino – Japanese War diakses dari <http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-ww2/sino-japanese-war>

History Channel.2015. Japan Surrenders diakses dari <http://www.history.com/this-day-in-history/japan-surrenders>

History Channel.2015.Bombing on Hiroshima and Nagasaki diakses dari <http://www.history.com/topics/world-war-ii/bombing-of-hiroshima-and-nagasaki>

Japan Guide.2002. Militarism and WW2 (1912-1945) diakses dari <http://www.japan-guide.com/e/e2129.html>

Japan Kantei 1947. “The Constitution of Japan” diakses dari http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html

Japan Times.2014.”New Arms Export Principles, Guidelines are Adopted by Abe Cabinet” diakses dari http://www.japantimes.co.jp/news/2014/04/01/national/politics-diplomacy/new-arms-export-principles-guidelines-are-adopted-by-abe-cabinet/#.VN74J_mUch8

Kato, Norihiro. 2014. “Japan Breaks With Peace” diakses dari http://www.nytimes.com/2014/07/17/opinion/norihiro-kato-japans-break-with-peace.html?_r=0

Lekic, Slobodan.2005. A Soviet Push Helped Force Japan to Surrender diakses dari <http://www.themoscowtimes.com/news/article/a-soviet-push-helped-force-japan-to-surrender/210764.html>

McKirby, Euan.2014. “Japan Nation Mulls End of Pacifism” diakses dari <http://edition.cnn.com/2014/07/01/world/asia/japan-constitution-protests/>

Ministry of Defense. 2013. Press Confrence by Minister of Defense, January 25th 2013” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html>

Ministry of Defense. 1947. “Chapter II. The Reuncitation of War. Article 9 dalam The Constitution of Japan, 1946” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html

Ministry of Defense. 1947. “Chapter II. The Reuncitation of War. Article 9 dalam The Constitution of Japan, 1946” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/dp01.html

Ministry of Defense. 2004. “Nation Defense Program Guidelines FY 2005-“ diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf

Ministry of Defense. 2010. “Content of the 2010 NDPG“ diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf

Ministry of Defense. 2014. “National Defense Program Guidelines, FY 2014,-“ diakses dari http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf

Ministry Of Defense.1976. “Japan’s Defense Policy and The Japan-U.S. Security Arrangements“ diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf

Ministry of Defense.2004. “National Defense Program Guidelines, FY 2005,-“ diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/national_guidelines.pdf

Ministry of Defense.2006.Chapter 2 The Basics of Japan,s Defense Policy.Diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/2-2-1.pdf

Ministry of Defense.2006.Chapter 2 The Basics of Japan,s Defense Policy.Diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/2-2-1.pdf

Ministry of Defense.2007 “About Ministry” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/about/history.html>

Ministry of Defense.2010. “Content of the 2010 NDPG“ diakses dari http://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2012/21_Part2_Chapter2_Sec2.pdf

Ministry of Defense.2013. “Defense Programs and Budget Of Japan: Overview of FY2013 Budget” diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_budget/pdf/250516.pdf

Ministry of Defense.2013.Press Confrence by Minister of Defense, January 25th 2013” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html>

Ministry of Defense.2013.Press Confrence by Minister of Defense, January 25th 2013” diakses dari <http://www.mod.go.jp/e/pressconf/2013/01/130125.html>

Ministry of Foreign Affairs.1957. Basic Defense Policy diakses dari http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/english.pdf

Ministry of Foreign Affairs.1967. “Arms and Arms Production-related Equipment Listed as Item 1 of The Annexed List 1 of the Export Trade Control Order” diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/annex1.html>

Ministry of Foreign Affairs.1967. “Japan Policies to Control Arms Export” diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/>

Ministry of Foreign Affairs.1967. Japan Policies on The Control of Arms Export diakses dari <http://www.mofa.go.jp/policy/un/disarmament/policy/>

Ministry of Foreign Affairs.2014.Cabinet Decision on Development of Seamless Security Legislation to Ensure Japan’s Survival and Protect its People diakses dari http://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page23e_000273.html

National Diet Library. 1945. "Postdam Declaration" diakses dari

<http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>

National Diet Library. 1945. "Postdam Declaration" diakses dari

<http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c06.html>

National Institute for Defense Studies. 2011. East Asian Strategic Review 2011:

Chapter 8. Diakses dari http://www.nids.go.jp/english/publication/east-asian/pdf/2011/east-asian_e2011_08.pdf

Reynolds, Isabel. 2013. "Japan Defense Budget to Increase for First Time in 11 Years"

diakses dari <http://www.bloomberg.com/news/print/2013-01-29/japan-s-defense-spending-to-increase-for-first-time-in-11-years.html>

Sieg, Linda dan Takenaka, Kiyoshi. 2014. "Japan takes historic step from post-war pacifism, OKs fighting for allies" diakses dari

<http://www.reuters.com/article/2014/07/01/us-japan-defense-idUSKBN0F52S120140701>

Stockholm International Peace Research Institute. 2014 diakses dari

http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/Milex_April_2014

Taiwan Document Project. 1895. Treaty of Shimonoseki diakses dari

<http://www.taiwanbasic.com/treaties/Shimonoseki.htm>

The Asahi Simbun. 2014. "Asahi poll: 63% oppose Abe's attempt to lift ban on collective self-defense" diakses dari

http://ajw.asahi.com/article/behind_news/politics/AJ201404070067

United Nations. 1951. San Francisco Peace Treaty diakses dari

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20136/volume-136-I-1832-English.pdf>

Yomiuri Shimbun. 2014. "New Defense Era for Japan: Collective Right OK'd in Severe Security Environment" diakses dari <http://the-japan-news.com/news/article/0001394249>

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Article 9 of Japan Constitution

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well, as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

1 Constitution and the Right of Self-Defense

Since the end of World War II, Japan made a decision not to repeat the ravages of war and has worked hard, aiming to build a peace-loving nation. The Japanese people desire lasting peace, and the principle of pacifism is enshrined in the Constitution, of which Article 9 prescribes the renunciation of war, the possession of war potential, and the right of belligerency by the state. Of course, since Japan is an independent nation, these provisions do not deny Japan's inherent right of self-defense as a sovereign state. Since the right of self-defense is not denied, the Japanese Government interprets this to mean that the Constitution allows Japan to possess the minimum level of armed force needed to exercise that right. Therefore, Japan, under the Constitution, maintains the Self-Defense Forces (SDF) as an armed organization, holding its exclusively national defense-oriented policy as its basic strategy of defense, and continues to keep it equipped and ready for operations.

2 The Government's View on Article 9 of the Constitution

1 Permitted Self-Defense Capability

Under the Constitution, Japan is permitted to possess the minimum necessary level of self-defense capability. The specific limit is subject to change relative to the prevailing international situation, the level of military technologies, and various other factors, and it is discussed and decided through annual budget deliberations and other factors by the Diet on behalf of the people. Whether such capability constitutes a "war potential" that

is prohibited by Article 9, Paragraph 2 of the Constitution must be considered within the context of Japan's overall military strength. Therefore, whether the SDF should be allowed to possess certain armaments depends on whether such possession would cause its total military strength to exceed the constitutional limit.

The possession of armaments deemed to be offensive weapons designed to be used only for

the mass destruction of another country, which would, by definition, exceed the minimum necessary level, is not permissible under any circumstances. For example, the SDF is not allowed to possess intercontinental ballistic missiles (ICBM), long-range strategic bombers, or attack aircraft carriers.

2 Measures for Self-Defense Permitted under Article 9 of the Constitution

In the cabinet decision (which will be described in the next section) made on July 1st 2014, measures for self-defense permitted under Article 9 of the Constitution were defined as follows. The language of Article 9 of the Constitution appears to prohibit "use of force" in international relations in all forms. However, when considered in light of "the right (of the people) to live in peace" as recognized in the Preamble of the Constitution and the purpose of Article 13 of the Constitution which stipulates, "their (all the people's) right to life, liberty, and the pursuit of happiness" shall be the supreme consideration in governmental affairs, Article 9 of the Constitution cannot possibly be interpreted to prohibit Japan from taking measures of self-defense necessary to maintain its peace and security and to ensure its survival. Such measures for self-defense are permitted only when they are inevitable for dealing with imminent unlawful situations where the people's right to life, liberty, and the pursuit of happiness is fundamentally overturned due to an armed attack by a foreign country, and for safeguarding these rights of the people. Hence, "use of force" to the minimum extent necessary to that end is permitted. This is the basis, or so-called the basic logic, of the view consistently expressed by the Government to date with regard to "use of force" exceptionally permitted under Article 9 of the Constitution, and clearly shown in the document "Relationship between the Right of Collective Self-Defense and the Constitution" submitted by the Government to the Committee on Audit of the House of Councillors on October 14, 1972.

This basic logic must be maintained under Article 9 of the Constitution. To date, the Government has considered that "use of force" under this basic logic is permitted only when an "armed attack" against Japan occurs. However, in light of the situation in which the security environment surrounding Japan has been fundamentally transformed and continuously evolving by shifts in the global power balance, the rapid progress of technological innovation, and threats such as weapons of mass destruction, etc., in the future, even an armed attack occurring against a foreign country could actually threaten Japan's survival, depending on its purpose, scale and manner, etc. Japan, as a matter of course, will make the utmost diplomatic efforts, should a dispute occur, for its peaceful settlement and take all necessary responses in accordance with the existing domestic laws and regulations developed based upon the constitutional interpretation to date. It is still required, however, to make all necessary preparations in order to ensure Japan's survival and protect its people.

Under such recognition and as a result of careful examination in light of the current security environment, the Government has reached a conclusion that not only when an armed attack against Japan occurs but also when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens Japan's survival and poses a clear danger to fundamentally overturn people's right to life, liberty and pursuit of happiness, and when there is no other appropriate means available to repel the attack and ensure Japan's survival and protect its people, use of force to the minimum extent necessary should be interpreted to be permitted under the Constitution as measures for self defense in accordance with the basic logic of the Government's view to date.

As a matter of course, Japan's "use of force" must be carried out while observing international law. At the same time, a legal basis in international law and constitutional interpretation need to be understood separately. In certain situations, the aforementioned "use of force" permitted under the Constitution is, under international law, based on the right of collective self-defense. Although this "use of force" includes those which are triggered by an armed attack occurring against a foreign country, they are permitted under the Constitution only when they are taken as measures for self-defense which are inevitable for ensuring Japan's survival and protecting its people, in other words, for defending Japan.

■ **Newly determined three conditions for the "use of force" as measures for self-defense permitted under Article 9 of the Constitution**

○ **When an armed attack against Japan has occurred, or when an armed attack against a foreign country that is in a close relationship with Japan occurs and as a result threatens**

Japan's survival and poses a clear danger to fundamentally overturn people's right to life, liberty and pursuit of happiness.

○ **When there is no appropriate means available to repel the attack and ensure Japan's survival and protect its people.**

○ **Use of force to the minimum extent necessary.**

3 Geographic Boundaries within which the Right of Self-Defense may be Exercised

The use of the minimum necessary force to defend Japan under the right of self-defense is not necessarily confined to the geographic boundaries of Japanese territory, territorial waters, and airspace. However, it is difficult to give a general definition of the actual extent to which it may be used, as this would vary with the situation. Nevertheless, the Government interprets that the Constitution does not permit armed troops to be dispatched to the land, sea, or airspace of other countries with the aim of using force; such overseas deployment of troops would exceed the definition of the minimum necessary level of self-defense.

4 Right of Belligerency

Article 9, Paragraph 2 of the Constitution prescribes that "the right of belligerency of the state will not be recognized." However, the "right of belligerency" does not mean the right to engage in battle; rather, it is a general term for various rights that a belligerent nation has under international law, including the authority to inflict casualties and damage upon the enemy's military force and to occupy enemy territory. On the other hand, Japan may of course use the minimum level of force necessary to defend itself. For example, if Japan inflicts casualties and damage upon the enemy's

military force in exercising its right of self defense, this is conceptually distinguished from the exercise of the right of belligerency, even though those actions do not appear to be different. Occupation of enemy territory, however, would exceed the minimum necessary level of self-defense and is not permissible.



Lampiran 2:

NATIONAL DEFENSE PROGRAM GUIDELINES

for FY 2014 and beyond

December 17, 2013

I. NDPG's Objective

In light of the current security environment surrounding Japan, the Government of Japan sets out the “National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond” as new guidelines for Japan’s national defense, based on “Defense Capability Build-up in FY2013” (approved by the Security Council and the Cabinet on January 25, 2013) and the “National Security Strategy” (approved by the National Security Council and the Cabinet on December 17, 2013).

II. Security Environment Surrounding Japan

1. As interdependence among countries expands and deepens, there is a growing risk that unrest in the global security environment or a security problem in a single country or region could immediately develop into a security challenge or destabilizing factor for the entire international community. The multipolarization of the world continues as a result of shifts in the balance of power due to the further development of countries such as China and India and the relative change of influence of the United States (U.S.). At the same time, the U.S. is expected to continue to play the role in maintaining world peace and stability as it retains the largest national power.

There are ongoing regional conflicts involving various countries as well as an increase in the number of so-called “gray-zone” situations, that is, neither pure peacetime nor contingencies over territory, sovereignty and maritime economic interests.

The proliferation of weapons of mass destruction (WMD) and ballistic missiles continues to be a deep concern despite non-proliferation efforts by the international community. The presence of countries with weak governance and failed states feeds the

expansion and spread of international terrorism. These problems continue to pose imminent security challenges.

In the maritime domain, piracy acts have taken place in various parts of the world, and there have been cases where coastal states unilaterally asserted their rights and took action based on their own assertion concerning international maritime law, thereby unduly infringing the freedom of the high seas.

Securing the stable use of outer space and cyberspace as global commons is becoming a significant security challenge for the international community including Japan against the backdrop of rapid technology innovation. In addition, military strategies and military balance in the future are anticipated to be significantly affected by the progress and proliferation of technologies such as those related to precision guided munitions, unmanned vehicles, stealth capability and nanotechnology.

2. In the Asia-Pacific region, including areas surrounding Japan, countries are enhancing and strengthening their cooperative relationships to resolve security challenges. Specific and practical cooperation and collaboration have progressed to settle challenges particularly in non-traditional security fields. In the meantime, gray-zone situations over territory, sovereignty and maritime economic interests tend to linger, raising concerns that they may develop into more serious situations.

North Korea is military-focused and deploys a massive military force. It is also proceeding with the development, deployment and proliferation of WMDs including nuclear weapons and ballistic missiles which may be used to deliver such weapons, and it maintains a large-scale special operations force. Through these activities, North Korea is maintaining and strengthening its asymmetrical military capabilities.

North Korea has also repeatedly heightened tension in the region by conducting military provocations in the Korean Peninsula and by escalating its provocative rhetoric and behavior against Japan and other countries. Such North Korean military

trend constitutes a serious destabilizing factor to the security not only of Japan but of the entire region and the international community. Therefore, Japan needs to pay utmost attention to such activities.

In particular, North Korea's ballistic missile development has presumably entered a new stage, as technological improvements have been made to extend the range and increase the accuracy of its missiles through a series of missile launches. Also, North

Korea has conducted nuclear tests in defiance of calls for restraint from the international community, so the possibility cannot be ruled out that it has successfully miniaturized nuclear weapons for warheads and equipped them on ballistic missiles. North Korea's nuclear and missile development, coupled with its provocative rhetoric and behavior, such as suggesting a missile attack on Japan, pose a serious and imminent threat to Japan's security.

As for China, while it is greatly expected to play an active role in a more cooperative manner in the region and the world, it has been continuously increasing its defense expenditures and has been rapidly reinforcing its military in a wide range of areas. As part of such effort, China is believed to be making efforts to strengthen its asymmetrical military capabilities to prevent military activity by other countries in the region by denying access and deployment of foreign militaries to its surrounding areas. However, China has not clearly stated the purposes and goals of the military buildup and therefore, transparency concerning its military and security is not fully achieved.

In addition, China is rapidly expanding and intensifying its activities in the maritime and aerial domains in the region including in the East China Sea and the South China Sea. In particular, China has taken assertive actions with regard to issues of conflicts of interest in the maritime domain, as exemplified by its attempts to change the status quo by coercion. As for the seas and airspace around Japan, China has intruded into Japanese territorial waters frequently and violated Japan's airspace, and has engaged in dangerous activities that could cause unexpected situations, such as its announcement of establishing an "Air Defense Identification Zone" based on its own assertion thereby infringing the freedom of overflight above the high seas. China is also expanding and intensifying its activities in the maritime and aerial necessary to take every possible measure to prepare for large-scale disasters.

5. In light of the above, while the probability of a large-scale military conflict between major countries, which was a concern during the Cold War era, presumably remains low, various security challenges and destabilizing factors are emerging and becoming more tangible and acute. As a result, the security environment surrounding Japan has become increasingly severe, since the formulation of "National Defense Program Guidelines, FY2011 and beyond" (approved by the Security Council and the Cabinet on December 17, 2010). As the security challenges and destabilizing factors are diverse and wide-ranging, it is difficult for a single country to deal with them on its own. Under these circumstances, it is increasingly necessary not only that the military sector cooperate with the non-military sector but also that countries which share interests in responding to shared security challenges cooperate and actively respond to maintain

regional and global stability.

III. Japan's Basic Defense Policy

1. Basic Policy

In light of the National Security Strategy, Japan will strengthen its diplomatic and defense capabilities along the policy of “Proactive Contribution to Peace” based on the principle of international cooperation, thereby expanding the role it can play. At the same time, Japan will contribute even more proactively in securing peace, stability and prosperity of the international community while achieving its own security as well as peace and stability in the Asia-Pacific region by expanding and deepening cooperative relationships with other countries, with the Japan-U.S. Alliance as its cornerstone.

Under this basic principle, Japan will build a comprehensive defense architecture and strengthen its posture for preventing and responding to various situations. In addition, Japan will strengthen the Japan-U.S. Alliance and actively promote bilateral and multilateral security cooperation with other countries while closely coordinating defense and diplomatic policies. Japan will also seek to establish an infrastructure necessary for its defense forces to fully exercise their capabilities.

When implementing these measures, under the Constitution, Japan will efficiently build a highly effective and joint defense force in line with the basic principles of maintaining an exclusively defense-oriented policy, not becoming a military power that poses a threat to other countries, while adhering to the principle of civilian control of the military and observing the Three Non-Nuclear Principles.

With regard to the threat of nuclear weapons, the extended deterrence provided by the U.S. with nuclear deterrence at its core, is indispensable. In order to maintain and enhance the credibility of the extended deterrence, Japan will closely cooperate with the U.S. In addition, Japan will take appropriate responses through its own efforts, including ballistic missile defense (BMD) and protection of the people. At the same time, Japan will play a constructive and active role in international nuclear disarmament and non-proliferation efforts so as to achieve the long-term goal of creating a world free of nuclear weapons.

2. Japan's Own Efforts

Recognizing that a country's security depends first and foremost on its independent efforts, Japan will make full-scale efforts on its own initiative to prevent

various situations and will seamlessly respond to them as the situation evolves with the National Security Council as the control tower, while maintaining cooperation with its ally, partners and other countries concerned.

(1) Building a comprehensive defense architecture

Given the increasingly severe security environment, Japan will efficiently develop a highly effective joint defense force and make efforts to employ it with a high level of flexibility and readiness based on joint operations. Japan will also ensure close regular interagency cooperation in normal times. In the event of various situations, the Government, under strong political leadership, will appropriately and promptly make decisions. Japan will seamlessly respond to situations as they unfold, in a whole-of-the-government approach, to ensure the protection of the lives and property of its people and the sovereignty of Japan's territorial land, waters and airspace, in coordination with local governments, private sectors, and others.

Japan will also continue to develop various systems to respond to a variety of disasters and protect its people and will enhance the capability to quickly evacuate Japanese nationals from foreign countries in an emergency situation and ensure their safety. In order to take such approaches appropriately, Japan will increase the effectiveness of its situation and disaster response posture by systemizing various related plans and formulating and reviewing them as well as expanding the use of simulations, comprehensive training and exercises.

(2) Japan's defense forces – building a Dynamic Joint Defense Force

Japan's defense forces are the ultimate guarantee of national security, and represent Japan's will and ability to deter threats from directly reaching Japan and defeat them if threats should reach Japan.

In the times of an ever-changing security environment surrounding Japan, defense forces need to be constantly reviewed to adapt to the environment. To this aim, Japan needs to allocate limited resources in a focused and flexible way to prioritize the functions and capabilities from a comprehensive perspective, identified through joint operation-based capability assessments of the Self-Defense Force's (SDF's) total functions and capabilities against various situations.

Amid the increasingly severe security environment surrounding Japan, the SDF, in addition to its regular activities, needs to respond to various situations, including "gray zone" situations which require SDF commitment. The frequency of such situations and the duration of responses are both increasing. Therefore, Japan will

regularly conduct persistent intelligence, surveillance and reconnaissance (hereinafter “ISR”) activities. Moreover, the SDF will conduct strategic training and exercises in accordance with the development of the situation and swiftly build a response posture including advance deployment of units in response to the security environment and rapid deployment of adequate units. Thus Japan will demonstrate its will and highly developed capability to prevent further escalation. In dealing with situations, depending on their development, minimizing damage by effective response through achieving maritime supremacy and air superiority is essential in safeguarding the lives and property of the Japanese people, and the sovereignty of Japan’s territorial land, waters and airspace.

Therefore, Japan will enhance its deterrence and response capability by improving the mission-capable rate of equipment and its employment to conduct tailored activities swiftly and sustainably based on joint operations, as well as by developing defense capabilities adequate both in quantity and quality that underpin various activities to realize a more robust defense force.

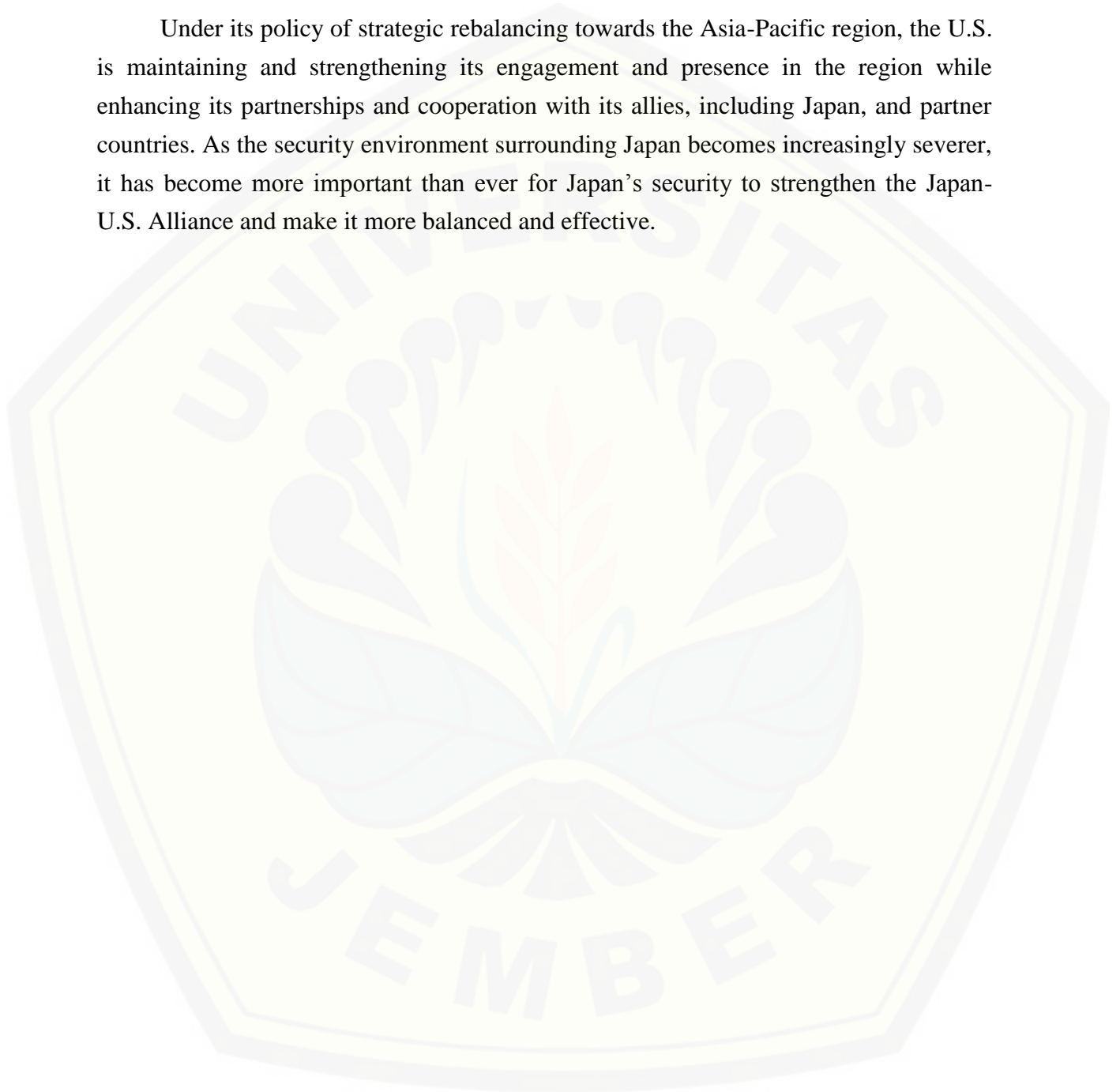
At the same time, from the perspective of “Proactive Contribution to Peace” based on the principle of international cooperation, Japan will strengthen its bilateral and multilateral cooperative relationships in order to ensure the stability of the Asia-Pacific region, which is closely related to its own security. Japan will also engage in international peacekeeping and other similar activities (peacekeeping operations by the United Nations, non-traditional security initiatives including Humanitarian Assistance/Disaster Relief (HA/DR), and other internationally collaborative activities to improve the international security environment) and other efforts more proactively than before as efforts to address the global security challenges, in light of the diversified roles and increased opportunities of the defense force.

From these viewpoints, given the changes in the security environment, the defense force based on this NDPG should prioritize particularly important functions and capabilities through optimal resource allocation as a whole. The defense force also must be an effective one which enables conducting a diverse range of activities to be seamless as well as dynamic and adapting to situations as they demand. To that end, Japan will build a Dynamic Joint Defense Force, which emphasizes both soft and hard aspects of readiness, sustainability, resiliency and connectivity, reinforced by advanced technology and capability for C3I, with a consideration to establish a wide range of infrastructure to support the SDF’s operation.

3. Strengthening of the Japan-U.S. Alliance

The Japan-U.S. Security Arrangements based on the Japan-U.S. Security Treaty, together with Japan's own efforts, constitute the cornerstone for Japan's national security. The Japan-U.S. Alliance centered on bilateral security arrangements functions as public goods that contribute to the stability and prosperity not only of Japan but also of the Asia-Pacific region and the world at large.

Under its policy of strategic rebalancing towards the Asia-Pacific region, the U.S. is maintaining and strengthening its engagement and presence in the region while enhancing its partnerships and cooperation with its allies, including Japan, and partner countries. As the security environment surrounding Japan becomes increasingly severer, it has become more important than ever for Japan's security to strengthen the Japan-U.S. Alliance and make it more balanced and effective.



(1) Strengthening deterrence and response capabilities of the Japan-U.S. Alliance

In order to ensure Japan's national security by maintaining and strengthening the commitment of the U.S. towards Japan and the Asia-Pacific region, Japan will revise the Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation, further enhance Japan-U.S. defense cooperation and reinforce the deterrence provided by the Japan-U.S. Alliance and the alliance's contingency response capabilities, while strengthening Japan's own capabilities as a premise for these efforts.

At the same time, in response to the increasingly severe security environment, while increasing the presence of Japan and the U.S. in the western Pacific region, Japan will build seamless cooperation with the U.S. ranging from situations on a day-to-day basis to various situations, including cooperation in responding to "gray-zone" situations.

To that end, Japan will continue to expand joint training and exercises, joint ISR activities and the joint/shared use of facilities and areas with the U.S. It will also tighten the Japan-U.S. operational cooperation and policy coordination including contingency response and medium-to long-term strategies, such as BMD, bilateral planning, and Extended Deterrence Dialogue.

(2) Strengthening and expanding cooperation in a broad range of fields

The Japan-U.S. Alliance will contribute to the peace and stability of the world, including the Asia-Pacific region, by strengthening cooperation not only in the fields of anti-piracy efforts, capacity building assistance, HA/DR, peacekeeping and counter terrorism but also in maritime affairs, outer space and cyberspace.

As for disaster response, Japan will further strengthen its cooperation between the SDF and the U.S. forces within and outside Japan in light of the fact that the U.S. forces, including its USFJ facilities and areas, greatly contributed to the safety of the Japanese people during the Great East Japan Earthquake.

In addition, Japan will constantly strengthen and expand the Japan-U.S. cooperative relationship over a broad range of fields, including efforts for intelligence cooperation and information security, and cooperation in the field of defense equipment and technology, to build a firmer and effective alliance.

(3) Steady implementation of measures relating to the stationing of U.S. Forces in Japan

Japan will provide stable support for the smooth and effective stationing of U.S. forces in Japan through various measures, including Host Nation Support (HNS). At the same time, efforts will be made to steadily implement the realignment of U.S. forces in Japan and mitigate the impact on local communities while maintaining the deterrence provided by U.S. forces. In particular, Japan will seek to mitigate the impact on Okinawa, located in a critically important location in terms of national security and where the stationing of U.S. forces significantly contributes to the deterrence of the Japan-U.S. Alliance, by realignment, consolidation and reduction of USFJ facilities and areas including through the relocation of Marine Corps Air Station Futenma as well as the dispersion of the impact and other measures, in light of the heavy concentration of such facilities and areas there.

4. Active Promotion of Security Cooperation

(1) Cooperation in the Asia-Pacific region

In the Asia-Pacific region, specific cooperative measures have been taken mainly in non-traditional security fields, including disaster relief. Multilateral frameworks such as the ASEAN Regional Forum (ARF), the ASEAN Defense Ministers' Meeting-Plus (ADMM-Plus) and the East Asia Summit (EAS) have been developed and the regional integration initiative led by ASEAN has been making progress. However, security challenges are becoming more serious than ever in North East Asia. Japan will promote a variety of further cooperative initiatives in a multi-layered manner to ease the atmosphere of confrontation and the sense of curiosity toward one another in the region. Japan will promote close cooperation with the Republic of Korea (ROK), which is in a position to support the U.S. presence in North East Asia together with Japan, and will make efforts to establish a foundation for further cooperation with the ROK, for example by concluding an agreement on security information protection and an acquisition and cross-servicing agreement. Japan will further deepen its relationship with Australia, with which Japan shares security interests and security cooperation has been advancing, and strengthen cooperation in fields such as international peacekeeping activities. Japan will also actively conduct joint training and other activities so as to improve interoperability with Australia.

Moreover, efforts will be made to promote the partnerships among U.S. allies in the Asia-Pacific region by strengthening cooperative relationships under trilateral frameworks among Japan, the U.S. and ROK and among Japan, the U.S. and Australia.

As Chinese activities have a significant impact on regional security, Japan will promote security dialogue and exchanges with China in order to enhance mutual understanding and will develop confidence-building measures to prevent unexpected situations. Japan will maintain a calm and firm stance in dealing with the rapid expansion and intensification of Chinese activities on the sea and in the air surrounding Japan.

Japan will promote security dialogues with Russia, including the Foreign and Defense Ministerial Consultations (“2+2”), high-level exchanges, and unit-to-unit exchanges in order to deepen understanding about the intention of Russian military activities and develop mutual trust with Russia. In addition, Japan will enhance bilateral training and exercises with Russia to promote regional stability.

Japan will also further strengthen its relationships with partner countries in the region, including Southeast Asian countries, and will actively promote joint training and exercises and capacity building assistance. In addition, Japan will strengthen its cooperation with these countries in the field of disaster management in light of the increasing frequency and growing scale of disasters in the region. Japan will strengthen its relationship with India in a broad range of fields, including maritime security, through joint training and exercises as well as joint implementation of international peacekeeping activities.

As capacity building assistance is effective in stabilizing the security environment and strengthening bilateral defense cooperation, Japan will promote it in full coordination with diplomatic policy initiatives, including the Official Development Assistance, and aligning it with joint training and exercises and international peacekeeping activities. Japan will also strengthen cooperation with relevant countries which actively provide such support, thereby expanding the range of countries receiving support as well as its scope.

Under ongoing multilateral security cooperation and dialogue in the Asia-Pacific region, Japan in cooperation with the United States and Australia will proactively contribute to building cooperative relationships in the region. Moreover, Japan will actively participate in multilateral joint training and exercises and play a major role in enhancing confidence-building measures among countries in the region, attaching importance to multilateral frameworks such as the ARF and the ADMM-Plus.

(2) Cooperation with the international community

It is very difficult for a single country to respond to global security challenges on its own. Moreover, as the roles of military forces have diversified, there are increasing opportunities for such forces to play an important role not only in preventing and responding to conflicts and maintaining peace but also in supporting post-conflict reconstruction, building peace and promoting confidence-building and friendly relationships.

Therefore, Japan will promote various initiatives to improve the global security environment on a regular basis in cooperation with the international community. Japan will continue and strengthen various initiatives concerning arms control, disarmament, nonproliferation and capacity building assistance in order to respond to global security challenges, including regional conflicts, expansion and spread of international terrorism, failed states, proliferation of weapons of mass destruction and problems related to the sea, outer space and cyberspace, while regularly cooperating with its ally and relevant countries with which it shares security interests and with international organizations and other relevant bodies. In this respect, Japan will further strengthen its cooperation with the European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO), the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and with the United Kingdom, France and other European countries and will work with them in responding to these challenges. Japan will also promote cooperation and exchanges with regard to equipment and technology with these countries and organizations. In order to stabilize the security environment in the Asia-Pacific region and improve the global security environment based on the policy of “Proactive Contribution to Peace” based on the principle of international cooperation, Japan will actively promote various international peace cooperation activities, including international peace cooperation assignments and emergency relief activities, in a multi-layered manner. To this end, Japan will ensure close cooperation between the defense and foreign affairs authorities, with comprehensive consideration given to the significance of the dispatch of SDF units, the

situation of countries accepting SDF units and Japan's political and economic relationships with recipient countries.

With regard to international peace cooperation activities and other similar activities in particular, Japan will continue to actively conduct activities utilizing the SDF's capabilities and will increase the number of SDF personnel it dispatches to assume positions of responsibility at organizations such as the local mission headquarters and the United Nations Department of Peacekeeping Operations. In addition, Japan will conduct a study on various challenges it has to overcome to enable the dispatch of SDF personnel in a broad range of fields, and take necessary measures. Japan will also contribute to the training of domestic and foreign personnel engaging in peacebuilding by making use of the SDF's experience and knowledge.

IV. Future Defense Forces

1. The Role of the Defense Force

Japan's future defense forces will be developed as described in III. 2 (2) above, and will be capable of effectively fulfilling the expected roles in the following fields, and will maintain the necessary posture.

(1) Effective deterrence of and response to various situations

In order to respond to various situations in a timely and appropriate manner, and certainly protect the lives and property of its people and the sovereignty of its land, sea and airspace, Japan will achieve intelligence superiority through persistent ISR activities in an extensive surrounding area to constantly gain an understanding of military developments in other countries and to detect any signs of development at an early stage.

Through such activities, Japan will clearly express its resolve not to tolerate the change of the status quo by force, thereby preventing various situations from occurring.

At the same time, Japan will swiftly and seamlessly respond to situations including gray zone situations, and will establish the necessary posture to continuously address a protracted situation. Moreover, Japan will implement an effective response tailored to each situation, even in cases when multiple events occur in a consecutive or concurrent manner.

When implementing the initiatives above, the following points are emphasized in particular:

a. Ensuring security of the sea and airspace surrounding Japan

In addition to persistent ISR in an extensive area around Japan, Japan will immediately take appropriate measures to deal with any incursions into its territorial airspace. Japan will respond effectively and promptly to gray-zone situations or any other acts that may violate its sovereignty. Furthermore, should the acts in question become protracted or escalate, Japan will respond seamlessly as the situation evolves, taking all possible measures for the defense and security of the sea and airspace surrounding Japan.

b. Response to an attack on remote islands

In responding to an attack on remote islands, Japan will intercept and defeat any invasion, by securing maritime supremacy and air superiority, with the necessary SDF units swiftly deployed to interdict, in addition to the units deployed in advance in accordance with the security environment. Moreover, should any remote islands be invaded, Japan will recapture them. In doing so, any ballistic missile or cruise missile attacks will be dealt with appropriately.

c. Response to ballistic missile attacks

Japan will promptly detect any signs of a ballistic missile launch and facilitate a swift, sustained response by establishing a multi-layered defense posture. Should any damage result, Japan will take steps to minimize it. Moreover, in the event of an attack by guerrillas or special operations forces concurrent with a ballistic missile attack, Japan will protect key facilities including nuclear power plants and search and destroy the infiltrating units.

d. Responses in outer space and cyberspace

In regard with outer space and cyberspace, Japan will build up persistent ISR capabilities to prevent any acts that could impede efficient action by the SDF. Furthermore, should any situation arise, Japan will identify the event without delay and swiftly repair any damage, while taking necessary steps to contain it. Moreover, in light of society's growing dependence on outer space and cyberspace, Japan will make effective use of the SDF's capabilities when endeavoring to strengthen collaboration with relevant organizations and clarify the division of roles, thereby contributing to comprehensive, government-wide initiatives.

e. Responses to major disasters

Should a major disaster occur, Japan will swiftly transport and deploy the requisite units and take all possible measures as part of its initial response, and maintain its presence in the longer term, when required. Moreover, as well as providing a meticulous response to the needs of disaster-stricken citizens and local government bodies, Japan will engage in appropriate partnerships and cooperation with local governments and the private sector, in order to save lives, carry out emergency repairs, and provide livelihood support.

(2) Stabilization of the Asia-Pacific and improvement of global security environments

Through persistent ISR in the area surrounding Japan and the timely and appropriate implementation of training, exercises, and various other activities, Japan will ensure the stability of the security environment in the Asia-Pacific region as a whole including the vicinity of Japan.

Moreover, working in partnership with its ally and partners, Japan will promote multi-tiered initiatives, including bilateral and multilateral defense cooperation and exchange, joint training and exercises, and capacity building assistance, effectively fulfilling its key role in initiatives focused on the stabilization of the security environment, including the building and strengthening of intra-regional cooperative frameworks in the Asia-Pacific region.

As the roles played by military capacity diversify, in order to respond appropriately to global security issues including regional conflicts, the expansion and spread of international terrorism, failed states, and the proliferation of weapons of mass destruction, Japan will strengthen various initiatives focused on arms control, disarmament and non-proliferation, as well as actively promote international peace cooperation activities, anti-piracy initiatives and capacity building assistance, thereby working on improvement of the global security environment.

Japan will attach importance to the following in particular, when engaging in the aforementioned initiatives.

a. Holding training and exercises

As well as the timely and appropriate implementation of SDF training and exercises, Japan will promote bilateral and multilateral joint training and exercises in the Asia-Pacific region, proactively and visibly demonstrating our nation's resolve and advanced capabilities focused on regional stabilization. In addition, it will build and strengthen cooperative relationships with relevant countries.

b. Promoting defense cooperation and exchange

Enhancing mutual understanding and relationships of trust with other countries and international organizations is the cornerstone of efforts to stabilize the security environment. Japan will take further steps to promote multi-layered defense cooperation and exchange, such as building and strengthening cooperative relationships focused on wide-ranging security issues of common interest including HADR and ensuring the stable use of the seas, outer space and cyberspace.

c. Promoting capacity building assistance

Utilizing the capabilities of the SDF, Japan will continuously engage in capacity building assistance such as human resource development and technical support on a regular basis in order to enhance the ability of developing countries themselves, thereby improving the security environment with particular focus on active creation of stability in the Asia-Pacific region.

d. Ensuring maritime security

As it is particularly vital for Japan as a maritime state to maintain an “Open and Stable Seas” order which serves as the cornerstone of peace and prosperity, Japan will take all possible measures to secure the safety of maritime traffic. Japan will also conduct anti-piracy activities in cooperation with countries concerned, and will promote various efforts including capacity building assistance of coastal states in this field and enhancement of joint training and exercises by taking various opportunities in waters other than those surrounding our country.

e. Implementing international peace cooperation activities

Working in partnership with non-governmental organizations and other relevant organizations, Japan will actively engage in international peace cooperation assignments and emergency relief activities to meet diverse needs, from peacekeeping to peacebuilding, placing greater emphasis on playing more of a leading role. In doing so, as well as enhancing its readiness posture to facilitate rapid overseas dispatch according to the situation, Japan will strengthen its sustainable preparedness for a protracted overseas deployment.

f. Cooperating with efforts to promote arms control, disarmament, and nonproliferation

Japan will be actively involved in arms control and disarmament activities undertaken by the United Nations and other bodies. In doing so, Japan will make active, effective use of the SDF’s knowledge, including through personnel contribution. Moreover, the proliferation of weapons of mass destruction and missiles that can serve as their means of delivery, as well as the proliferation of arms and goods and

technology which could be diverted to military use pose severe threats to the peace and stability not only of Japan but also of the international community as a whole. Thus, Japan will cooperate with relevant countries and international organizations and other relevant bodies in promoting nonproliferation initiatives.

2. Priorities in strengthening architecture of the Self Defense Forces

(1) Basic approach

The SDF will maintain an appropriate structure to effectively fulfill the abovementioned roles of defense forces. As such, Japan has conducted capability assessments based on joint operations in relation to various potential contingencies to identify the functions and capabilities that should be prioritized in order to pursue more effective build-up of the defense force.

Based on the results of the capability assessments, in the defense capability buildup, the SDF will prioritize the development of capacities to ensure maritime supremacy and air superiority, which is the prerequisite for effective deterrence and response in various situations, including defense posture buildup in the southwestern region. Furthermore, the SDF will emphasize the establishment of rapid deployment capabilities with a consideration to establishing a wide-ranging logistical support foundation. At the same time, in terms of preparation for a Cold-War era style invasion such as the landing of large-scale ground forces, the SDF will possess the minimum necessary level of expertise and skills required to respond to unforeseen changes in the situation in the future and to maintain and inherit them, and thereby further promote efforts to achieve even greater efficiency and rationalization.

(2) Functions and capabilities to be emphasized

From the perspective of efficiently developing an effective defense force, the SDF will selectively strengthen the following functions and capabilities in particular, paying attention to enhance joint functions with interoperability with the U.S. forces.

a. ISR capabilities

In order to ensure effective deterrence and response to various situations, while utilizing unmanned equipment, Japan will implement extensive persistent ISR on objectives such as aircraft and vessels in the seas and airspace surrounding it, and the SDF will adopt a flexible approach to boosting its ISR posture according to the developments of situations.

b. Intelligence capabilities

Japan will strengthen its system for intelligence collection, processing

information, and analyzing and sharing the collected information, so that the SDF can promptly detect and swiftly respond to signs of various situations and take necessary measures based on medium-to long-term military trends mainly in its vicinity.

In doing so, the SDF will seek to augment its various information collection capabilities, including HUMINT, OSINT, SIGINT, and IMINT, as well as persistent ISR capabilities using unmanned aerial vehicles. Also, the SDF will engage in integrated efforts to strengthen its geospatial intelligence capabilities to combine various types of intelligence on images and maps to exploit them in a sophisticated manner, while establishing a framework for the integrated and systematic nurturing of highly capable personnel in information gathering analysis.

c. Transport capability

In order to secure swift and large-scale transport and deployment capability, and to swiftly deploy and move necessary units, the SDF will strengthen integrated transport capacity including maritime and airborne transport capacity, with collaboration with the civilian transport sector. In doing so, the SDF will avoid redundancy in functions by clarifying roles and assignments among various means of transport, considering their respective characteristics.

d. Command and control, and information and communications capabilities

In order to establish a command and control system that can manage units nationwide in a mobile, joint integrated manner, the SDF will take steps to deploy the Ground Self-Defense Force (GSDF), Maritime Self-Defense Force (MSDF) and Air Self-Defense Force (ASDF) personnel in the main headquarters of each service, making effective use of the knowledge and experience held by each respective service. Furthermore, the SDF will facilitate swift, resilient nationwide operation of the GSDF's units such as basic operational units (divisions and brigades) through the establishment of a new central headquarters to control all of the regional armies, as well as greater efficiency and streamlining of the command and control function in each regional army headquarters, and other measures.

Moreover, the SDF will strive to enhance and strengthen its information and communications capabilities that are prerequisites for supporting nationwide operation, starting with the communications infrastructure on remote islands and data link functions among the three services.

e. Response to an attack on remote islands

In order to ensure maritime supremacy and air superiority which is a prerequisite for effective response to an attack on remote islands, the SDF will strengthen its ability to deal with attacks by aircraft, naval vessels, and missiles, etc.

Moreover, while strengthening the integrated capabilities to seek to interdict any attack on Japan's remote islands at sea, the SDF will newly develop sufficient amphibious operations capability, which enables the SDF to land, recapture and secure without delay in the case of an invasion of any remote islands.

Furthermore, the SDF will enhance its logistical support capabilities, so that SDF units can swiftly and continuously respond in the event of a situation in the southwestern region.

In addition, the SDF will also examine the desirable air defense posture in remote islands in the Pacific.

f. Response to ballistic missile attacks

To counter North Korea's improved ballistic missile capability, Japan will pursue comprehensive improvement of its response capability against the threat of ballistic missiles.

With regard to the BMD system, Japan will enhance readiness, simultaneous engagement capability and sustainable response capability to strengthen the capability to protect the entire territory.

Based on appropriate role and mission sharing between Japan and the U.S., in order to strengthen the deterrent of the Japan-U.S. Alliance as a whole through enhancement of Japan's own deterrent and response capability, Japan will study a potential form of response capability to address the means of ballistic missile launches and related facilities, and take means as necessary.

g. Responses in outer space and cyberspace

While strengthening information collection capability using satellites equipped with a variety of sensors, and reinforcing command, control and telecommunications capabilities, the SDF will secure effective, stable use of outer space so that satellites can continuously exercise their capabilities even in contingencies by enhancing the survivability of satellites through such initiatives as space situational awareness. In implementing such initiatives, the SDF will form organic partnerships with research and development institutions in Japan, as well as with the U.S.

As for cyberspace, Japan will enhance integrated persistent surveillance and response capabilities and expertise and latest equipment will be continuously developed and secured in order to prevent actions that hinder efficient SDF activities.

h. Responses to major disasters, etc.

In the event of a large-scale natural disaster such as a Nankai Trough earthquake, or an atypical disaster such as a nuclear emergency, it is of vital importance to respond swiftly from the initial stages of the impact and carry out such tasks as information gathering on the extent and nature of the damage from the air by aircrafts, rescue operations and emergency repairs. In this regard, the SDF will develop a response posture sustainable for long-term operation, through swift transportation and deployment of appropriately size units, and by establishing a rotating staffing posture based on a joint operational approach.

i. Responses focused on international peace cooperation activities and other similar activities

In international peace cooperation activities and other similar activities, the SDF will strengthen the necessary protective capabilities to carry out its operations, ensuring the safety of personnel and units. Moreover, the SDF will work on enhancing transport and deployment capability, information communication capability with a view to long term activities in Africa and other remote locations, and strengthening logistic and medical service structure for smooth and continuous operation.

From the standpoint of carrying out international peace cooperation activities more effectively, Japan will consider measures for making more effective use of the SDF Operational Facility for Deployed Air Force for Anti-Piracy Operation in Djibouti.

Furthermore, while strengthening intelligence gathering capability required for operations, the SDF will enhance its education, training and personnel management systems in order to facilitate the continuous dispatch of adequate personnel for overseas cooperation activities.

3. Architecture of each service of the Self-Defense Forces

The organization, equipment and disposition in each service of the SDF are outlined in (1) to (3) below. The specifics of major organizations and equipment in the future are as shown in the Annex table.

(1) Ground Self-Defense Force (GSDF)

In order to be able to respond swiftly and deal effectively and nimbly with an attack on offshore islands and various other situations, the GSDF will maintain rapidly deployable basic operational units (rapid deployment divisions, rapid deployment brigades and an armored division) furnished with advanced mobility and ISR capabilities. In addition, the GSDF will maintain mobile operating units sustaining specialized functions in order to effectively perform such operations as airborne operations, amphibious operations, special operations, air transportation, defense against NBC (nuclear, biological, and chemical) weapons, and international peace cooperation activities.

Keeping in mind that the role of these highly-proficient rapidly deployable basic operational units is to swiftly deploy and move via the integrated transport capacity referred to in 2 (2) c. above, the GSDF will maintain half of these in Hokkaido, given the excellent training environment there.

The defense posture in the remote islands of the southwestern region will be enhanced and strengthened via the permanent stationing of the units where the SDF is not currently stationed, the deployability of the aforementioned units, and the establishment of organic partnerships and networks with the MSDF and ASDF.

- b. The GSDF will maintain surface-to-ship guided missile units in order to prevent invasion of Japan's remote islands while still at sea, as far as possible.
- c. The GSDF will maintain surface-to-air guided missile units in order to effectively provide air defense to protect operational units and key areas, working in tandem with the surface-to-air guided missile units referred to in (3) d. below.
- d. The GSDF will review the organization and equipment of the basic operational units (divisions and brigades) other than the rapidly deployable ones referred to in a. above, with a particular focus on tanks/howitzers and rockets. Following thorough rationalization and streamlining, these units will be deployed appropriately, according to geographical characteristics.

(2) Maritime Self Defense Force (MSDF)

- a. The MSDF will maintain destroyer units and ship-based patrol helicopter units strengthened by increased numbers of equipment, including the new destroyers, with additional multifunctional capability and with a compact-type hull, in order to effectively conduct persistent ISR and antisubmarine operations etc., thereby facilitating agile response in such areas as the defense of the seas surrounding Japan, the security of maritime traffic, and international peace cooperation activities etc.

Along with the surface-to-air guided missile units referred to in (3) d. below, the destroyer units will maintain Aegis-equipped destroyers capable of providing Japan with multi-layered defense against ballistic missile attacks.

- b. The MSDF will maintain submarine units strengthened by increased numbers of them, in order to effectively conduct patrol and defense of the seas surrounding Japan, as well as regularly engage in broad underwater intelligence gathering and warning and surveillance in those seas.
- c. The MSDF will maintain fixed-wing patrol aircraft units in order to effectively conduct patrol and defense of the seas surrounding Japan, as well as regularly engage in broad maritime intelligence gathering and warning and surveillance in those seas.
- d. The MSDF will maintain minesweeper units in order to effectively conduct minesweeping operations in the seas surrounding Japan in collaboration with the new destroyers with additional multifunctional capability and with the compact-type hull referred to in a. above.

(3) Air Self-Defense Force (ASDF)

- a. The ASDF will maintain air warning and control units consisting of warning and control units and air warning units. Warning and control units will be equipped with ground-based warning and control radar that can detect and track any ballistic missiles flying into Japanese air space, as well as providing persistent ISR in most air space over Japan and the surrounding areas. Air warning units will be enhanced in order to conduct effective warning, surveillance and control in the air over long periods in the event of “gray zone” situations.
- b. The ASDF will maintain fighter aircraft units reinforced by highly capable fighter aircrafts in order to provide aerial defense for Japan based on a comprehensive posture that brings together fighter aircrafts and relevant support functions. In addition, the ASDF will maintain enhanced aerial refueling and transport units that will enable fighter aircraft units and air warning units, etc. to carry out various operations sustainably in the air space surrounding Japan.
- c. The ASDF will maintain air transport units in order to effectively carry out the mobile deployment of ground-based units etc., and international peace cooperation activities etc.

- d. The ASDF will maintain surface-to-air guided missile units providing multi-layered defense for Japan against ballistic missile attacks, together with the Aegis destroyers referred to in (2) a. above, as well as protecting key areas in tandem with the surface-to-air guided missile units referred to in (1) c. above.

V. Basic Foundations for SDF

To ensure that the diverse activities required of the SDF are carried out in a timely and appropriate manner, it is not sufficient simply to upgrade the main elements of the organization and its equipment; it is also imperative to strengthen the various foundations underpinning the defense force, in order to ensure that it can function as effectively as possible. The key aspects of this are as follows.

1. Training and Exercises

Through routine training and exercises, the SDF will ceaselessly review and examine various plans for dealing with situations, as well as strive to enhance and strengthen its training and exercises in order to improve the tactical skills in each of its branches. In doing so, as well as making more effective use of the excellent training environment in Hokkaido, the SDF will work in partnership with relevant organizations and the civilian sector, in order to ensure systematic implementation of more practical training and exercises.

In the southwestern region, where there are limitations on the exercise areas, etc. of the SDF, the SDF will secure a favorable training environment through the joint use of U.S. military facilities and areas, while remaining sensitive to relationships with the local community, so that timely and appropriate training and exercises can be carried out, including Japan-U.S. bilateral training and exercises.

2. Operational Infrastructure

The SDF will improve survivability, including the recovery capabilities of military camps and bases, etc., in order to maintain the support functions that serve as the operational infrastructure for units, so that units can be deployed swiftly and respond to various situations effectively.

Moreover, in light of the fact that some SDF facilities are currently dilapidated, the SDF will implement a steady repair and maintenance program, as well as expansion

of the necessary quarters in order to ensure an emergency call-up of personnel in the event of various situations, thereby enhancing readiness.

The SDF will undertake necessary deliberations concerning civilian airports and ports, including approaches to the various systems on a day-to-day basis, in order to ensure that such facilities can be used as part of the operational infrastructure for the SDF, etc. from an early stage, depending on the situation. Furthermore, it will implement various family support measures, in order to alleviate the anxieties both of troops serving away from home and of their families while they are away.

The SDF will enhance and strengthen the operational infrastructure in terms of equipment and materials, such as improving the operational availability of equipment, by taking all possible measures to maintain and upgrade SDF equipment, as well as securing and stockpiling the necessary ammunition.

3. Personnel and Education

Given that equipment has become more advanced and complex, and missions more diverse and internationalized in recent years, the SDF will implement measures to reform the personnel management system, in order to ensure the edge of its troops and the effective use of human resources amid a severe fiscal situation, taking into consideration a variety of elements, including skills, experience, physical strength and morale.

Accordingly, the SDF will implement measures to ensure an appropriate composition of ranks and age distribution, taking into account the various missions and characteristics of each branch of the SDF.

The SDF will implement measures to make effective use of human resources, such as more effective use of female SDF personnel and expansion of reappointment, and measures related to honors and privileges. In order to strengthen the joint operations structure, the SDF will enhance education and training, and, through secondments to the Joint Staff and relevant ministries and agencies, retain adequate personnel who have a broad outlook and ideas, as well as wide-ranging experience in Japan's security-affairs, and who can respond flexibly and rapidly to various situations as part of the government.

In light of the deterioration of the recruiting environment resulting from social factors such as the declining birthrate and popularization of higher education, the SDF will promote a diverse range of recruitment measures to spread the perception that the SDF is an attractive job option.

Furthermore, as it is the responsibility of the Government of Japan to secure the livelihoods of the SDF personnel, who are compelled to resign at a younger age than ordinary civil servants, the SDF will promote support for re-employment by strengthening collaboration with local governments and relevant organizations.

In order to support sustainable operation of units in situations that are becoming increasingly diversified and protracted, the SDF will promote utilization of reserve personnel in broad areas, including those with professional skills such as aviators, and will take measures to improve the sufficiency of reserve personnel.

4. Medical

In order to keep SDF personnel in good health and enhance their ability to engage in a diverse range of missions, such as various situation responses and international peace cooperation activities, the SDF will establish an efficient and high-quality medical care structure, through endeavors including upgrading of SDF hospitals into hubs with enhanced functions, and improvements in the management of the National Defense Medical College Hospital. The SDF will also attach greater importance to securing and training of such medical staff as medical officers, nurses and emergency medical technicians.

The SDF will consider such matters as revisions of regulations of emergency medical treatment on situation responses, and improve first aid capabilities on the frontline, and will put in place a posture for rapid medical evacuation that takes into account the viewpoints of enhanced joint capabilities.

5. Defense Production and Technological Bases

Retaining an adequate level of defense production and technological bases is essential not only for the production, operation, maintenance and upkeep of equipment, but also for research and development of equipment that fits the operational environment, and for the expected potential to contribute to enhancing deterrence. At the same time, against the backdrop of the severe fiscal situation and rises in the equipment unit price as it becomes increasingly sophisticated and complex, the numbers of units of procured equipment are on the decline. Moreover, the environment

surrounding Japan's defense production and technological bases is becoming more severe. For instance, the competitiveness of foreign companies is growing, as a result of the advance of large-scale and cross-border restructuring and consolidation of the defense industry.

In this kind of environment, the Ministry of Defense will formulate a strategy that sets forth its future vision for Japan's defense production and technological bases as a whole and will promote participation in international joint development and production and adapting defense equipment to civilian use, in order to maintain and reinforce such bases without delay.

With regard to contribution to peace and international cooperation, there are increasing opportunities to cooperate in a more effective manner through, for example, the utilization and provision to disaster-stricken countries and others of heavy machinery and other defense equipment carried to sites by the SDF. Moreover, internationally, it has become the mainstream to participate in international joint development and production projects in order to improve the performance of defense equipment while dealing with the rising costs of the equipment. In this context, from the perspective of "Proactive Contribution to Peace" based on the principle of international cooperation, Japan is required to engage more proactively in peacebuilding efforts and international cooperation by utilizing defense equipment in various ways, and to participate in joint development and production of defense equipment and other related items.

Against this backdrop, while giving due consideration to the roles that the Three Principles on Arms Exports and their related policy guidelines have played so far, the Government of Japan will set out clear principles on the overseas transfer of arms and military technology, which fit the new security environment. In this context, considerations will be made with regard to defining cases where transfers are prohibited; limiting cases where transfers could be allowed with strict examination; and ensuring appropriate control over transfers in terms of unauthorized use and third party transfer.

6. Efficient Acquisition of Equipment

In order to achieve effective and efficient acquisition of equipment, including in research and development activities, the Ministry of Defense will strengthen project management throughout the life-cycle of equipment through introducing a project manager system, as well as through considering the possibility of further introducing long-term contracts and further upgrading the contract system to provide cost reduction incentives to companies, aiming to improve cost-effectiveness throughout the life-cycle

of equipment.

Moreover, the Ministry of Defense will try to improve readiness and response capabilities through reforms of the logistics posture through effective use of capacity in the private sector. Furthermore, it will ceaselessly pursue greater transparency in the acquisition process and increased rationalization of the contract system, and strive to achieve more rigorous procedures for the acquisition of equipment.

7. Research and Development

The Ministry of Defense will ensure consistency with the priorities for upgrading defense capability when commencing research and development, in order to guarantee that research and development that meets the operational needs of the SDF is prioritized in view of the severe fiscal situation.

In conjunction with this, the Ministry of Defense will promote research and development based on a medium- to long-term perspective, taking into account the latest trends in science and technology, changes in combat modality, cost-effectiveness and the potential for international joint research and development, with a view to implementing research and development that can ensure Japan's technological superiority against new threats in strategically important areas.

From the aspect of security, it is necessary to utilize civilian technology effectively also in the field of security through regularly assessing the trend in science and technology including information related to technological development as well as consolidating the capabilities of the government, industry and academia. Under such recognition, the Ministry of Defense will strive to make effective use of civilian technology that can also be applied to defense (dual-use technologies), by enhancing partnerships with universities and research institutes, while strengthening technology control functions to prevent the outflow of advanced technologies. The Ministry of Defense will examine its research and development initiative for achieving the aforementioned objectives.

8. Collaboration with Local Communities

The Ministry of Defense and the SDF will further strengthen collaboration with relevant organizations, including local governments, the police and the fire service, in order to enable the SDF to provide accurate response to various situations. Such close partnerships with local governments, etc. are exceedingly important from the perspective not only of the effective improvement and smooth operation of defense

facilities, but also of the recruitment of SDF personnel, as well as the provision of re-employment support for them.

Accordingly, as well as continuing to advance measures targeting the areas around defense facilities, with a view to their improvement and operation, the Ministry of Defense and SDF will routinely engage in various measures such as intensive public relations activities focused on their policies and activities, in order to secure the understanding and cooperation of local governments and communities. Given that the presence of SDF units makes a substantial contribution to the maintenance and revitalization of local communities in some areas, and supports community medicine through emergency patient transport using SDF search and rescue aircraft in others, the Ministry of Defense and the SDF will give consideration to the attributes of each area in the reorganization of units and deployment of military camps and bases, etc., in order to secure the understanding of local governments and residents. At the same time, in operating the military camps and bases, etc., the Ministry of Defense will pay attention to the contribution of the operation to the local economy.

9. Boosting Communication Capabilities

The Ministry of Defense and SDF will strengthen strategic public relations and communication to enhance the dissemination of information via a diverse range of media, in order to secure domestic and overseas understanding which is vital to effectively conduct SDF duties.

10. Enhancing the Intellectual Base

The Ministry of Defense will promote education on security-related matters at educational institutions, in order to enhance understanding of security and crisis management among the populace. Moreover, in addition to strengthening the Ministry of Defense and SDF research systems, with a particular focus on the National Institute for Defense Studies, the Ministry of Defense will promote various partnerships, including education and research exchange with other research and educational institutions within the government, as well as universities and think-tanks both within Japan and overseas.

11. Promoting Reform of the Ministry of Defense

The Ministry of Defense will further promote reforms by constantly reviewing its work methods and organization in order to foster a sense of unity among civilian officials and uniformed personnel, total optimization in building up defense capability, strengthening SDF's joint operation functions and enhancing policy-making and communication functions.

VI. Additional Points

1. These Guidelines set out the form of Japan's defense force over the next decade or so. The National Security Council will conduct regular, systematic review over the course of implementation of the various measures and programs. Smooth, swift and accurate transition to the future defense force will be facilitated through validations based on joint operational capability assessment while advancing such initiatives in a timely and appropriate manner.
2. When major changes in the situation are anticipated during the review and verification process, necessary examination of the security environment at that time will be taken into account and these guidelines will be revised adequately.
3. In light of the increasingly tough fiscal conditions, Japan will strive to achieve greater efficiency and streamlining in the defense capability buildup to curb costs, and harmonize with other initiatives in other fields to ensure that Japan's defense force as a whole can smoothly fulfill its expected function.

Annex Table

Category		Present (as of the end of FY2013)	Future	
Ground Self-Defense Force	Authorized Number of Personnel		159,000	
	Active-Duty Personnel		151,000	
	Reserve-Ready Personnel		8,000	
	Major Units	Rapid Deployment Units	Central Readiness Force 1 armored division	3 rapid deployment divisions 4 rapid deployment brigades 1 armored division 1 airborne brigade 1 amphibious rapid deployment brigade 1 helicopter brigade
			Regional deployment Units	8 divisions 6 brigades
			Surface-to-Ship Guided Missile Units	5 surface-to-ship guided missile regiments
			Surface-to-Air Guided Missile Units	8 anti-aircraft artillery groups/regiments
Maritime Self-Defense Force	Major Units	Destroyer Units	4 flotillas (8 divisions)	
		Submarine Units	5 divisions	
		Minesweeper Units	5 divisions	
		Patrol aircraft Units	1 flotilla	
	Major Equipment	Destroyers (Aegis-Equipped Destroyers)	47 (6)	54 (8)
		Submarines	16	22
		Combat Aircraft	approx. 170	approx. 170
Air Self-Defense Force	Major Units	Air Warning & Control Units	8 warning groups 20 warning squadrons 1 AEW group (2 squadrons)	28 warning squadrons 1 AEW group (3 squadrons)
		Fighter Aircraft Units	12 squadrons	13 squadrons
		Air Reconnaissance Units	1 squadron	-
		Aerial Refueling/Transport Units	1 squadron	2 squadrons
		Air Transport Units	3 squadrons	3 squadrons
		Surface-to-Air Guided Missile Units	6 groups	6 groups

	Major Equipment	Combat Aircraft Fighters	approx. 340 approx. 260	approx. 360 approx. 280
--	-----------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

Note1: The current numbers of tanks and howitzers/rockets (authorized number as of the end of FY2013) are respectively approx. 700 and approx. 600, which will be reduced respectively to approx. 300 and approx. 300 in the future.

Note2: Regarding major equipment/units that may also serve for BMD missions, their acquisition/formation will be allowed within the number of Destroyers (Aegis-Equipped Destroyers), Air Warning & Control Units and Surface-to-Air Guided Missile Units specified above.

